

CARA PANDANG

Edisi Agustus 2022

Inspirasi Terkini!

?

**SURVEI DINI
PILPRES 2024**



9 772746 105042

**BEREBUT WARISAN
PAMOR JOKOWI**

**LPSK SIAP LINDUNGI
BHARADA E SEBAGAI
JUSTICE COLLABORATOR**

**MENYOAL TRANSPARANSI
LEMBAGA FILANTROPI**

PLATFORM

CARA PANDANG.com

Inspirasi Terkini!

Carapandang.com hadir dalam wujud multimedia dengan konten yang tidak hanya berupa teks dan foto, tetapi juga videografis, infografis, majalah online dan podcast.

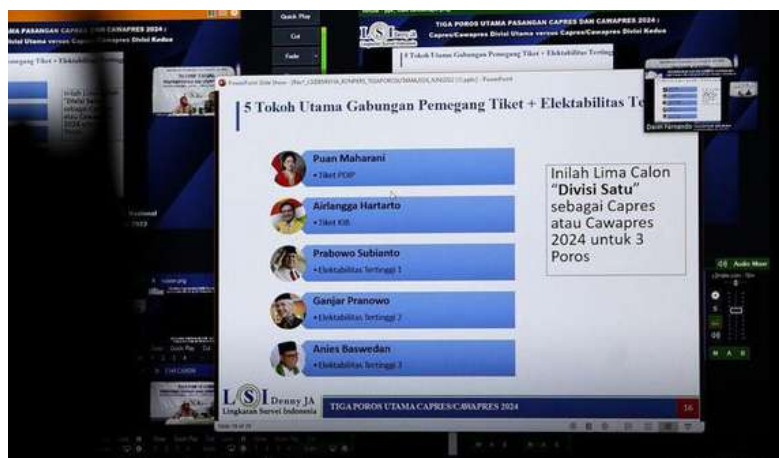
Melalui Carapandang.com, khalayak diharapkan mendapatkan banyak informasi terkini dan terinspirasi.

Telah Tersedia di Play Store



DAFTAR ISI

<u>KILAS</u>	
SRI LANKA DILANDA PERANG SAUDARA	4
<u>TAJUK</u>	
SURVEI DINI PILPRES 2024	5
<u>LAPORAN UTAMA</u>	
BEREBUT WARISAN PAMOR JOKOWI	9
UPAYA MEMPERCEPAT TAJUK PILPRES 2024	13
<u>LAPORAN KHUSUS</u>	
BUKTI INSTITUSI PENGELOLAAN PETERNAKAN LEMAH	16
INTEGRASI PENGELOLAAN MENYELAMATKAN PETERNAKAN	20
MENYOAL TRANSPARANSI LEMBAGA FILANTROPI	23
JAGA KREDIBILITAS LEMBAGA FILANTROPI	26
RAPIMNAS JMSI 2022 AKSELERASI PROGRAM DAN PENGUATAN ORGANISASI	29
<u>EKONOMI</u>	
MENGUJI KETAHANAN STARTUP	33
BADAI BARU PEMULIHAN EKONOMI	36
DIDIMAX DAN INVESTASI YANG MENGGEMBIRAKAN	39
<u>HUKUM</u>	
PATGULIPAT RUU KUHP	41
LPSK SIAP LINDUNGI BHARADA E SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR	43
<u>PENDIDIKAN</u>	
MENCARI MODEL BELAJAR PASCA PANDEMI	46
CITAYAM FASHION WEEK PANGGUNG BARU KOMUNITAS SUBKULTUR	49
<u>INTERNASIONAL</u>	
PANGAN GLOBAL GOYANG EFEK PERANG	54



LAPORAN UTAMA

SURVEI POLITIK (YANG) TERLALU DINI

6

Menjamurnya lembaga survei di Indonesia yang diduga banyak ditunggangi oleh kepentingan elit politik tertentu berpotensi membelah opini publik. Padahal, secara filosofis, fungsi lembaga survei adalah memberikan informasi mengenai persepsi publik atas suatu fenomena. Lantas, bagaimana seharusnya lembaga survei bekerja menjelang pemilihan umum 2024.

PRESIDENSI G20 DI TENGAH TEKANAN

58

OPINI

PROSPEK DAN DILEMA INDUSTRI HALAL

61

KEKERASAN SEKSUAL DAN TUMBUHNYA KESADARAN PEREMPUAN

64

PEREMPUAN BUKAN PROPERTI PELECEHAN

66

RESENSI

MEMBACA PEMBELAAN AKYOL PADA KEBEBASAN

69

SEMUA TENTANG RASA

72

WARTAWAN DI PUSARAN POLITIK?

74

BAHASA

TERJEBAK BAHASA IKLAN

76

FILM

THOR: LOVE AND THUNDER, MENDOMINASI BOX OFFICE

78

ARTIS

ARTIS ANDIKA MAHESA BERSYUKUR BISA LULUS PAKET C

81

FUJINTI UTAMI PUTRI DITUNTUT BERAKTING CEWEK JUTEK

80

KOLOM

PENDIDIKAN BERBALUT KONSERVATISME AGAMA

82



SRI LANKA DILANDA PERANG SAUDARA

Sri Lanka adalah negara di tengah gejolak; Presiden Gotabaya Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri pada Kamis (15/07) setelah melarikan diri dari Sri Lanka.

Penjabat presiden saat ini, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, mencoba menjalankan pemerintahan dari “lokasi yang aman” setelah kantornya diserbu dan kediaman pribadinya dibakar oleh pengunjuk rasa.

Perdana Menteri Wickremesinghe menerapkan jam malam dan memerintahkan militer untuk melakukan ‘apapun yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban’. Meski demikian perang saudara tetap tak terelakkan. Masyarakat sudah terlanjur kecewa, terlebih dihadapkan pada situasi kritis.

Pasokan bahan bakar, makanan, obat-obatan dan kebutuhan pokok lain di Sri Lanka terbatas, membuat harga-harga membumbung tinggi. Para pengunjuk rasa menyalahkan elit politik atas krisis yang terjadi di negara itu. Sejumlah faktor yang memicu krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka, di antaranya karena biaya hidup tinggi, krisis akibat perang Rusia-Ukraina, sektor pariwisata bangkrut akibat covid-19, pertanian organik yang merugikan, dan ketidakseimbangan perdagangan di dalam negeri.



DISERBU DEMONSTRAN, PRESIDEN SRI LANKA MELARIKAN DIRI

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dikabarkan melarikan diri, tak lama sebelum pengunjuk rasa menyerbu kediamannya, Sabtu (9/7/2022). Para pengunjuk rasa mengepung kediaman Rajapaksa untuk menuntut pengunduran dirinya akibat krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.

CARA PANDANG
Inspirasi Terkini

- Para pengunjuk rasa yang diperkirakan berjumlah ribuan jiwa itu menyalahkan Presiden yang dianggap salah mengurus negara.
- Sri Lanka telah menderita selama berbulan-bulan mengalami kekurangan makanan dan bahan bakar, pemadaman listrik yang lama, dan inflasi yang tinggi, setelah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital.
- Negara pulau berpenduduk 22 juta jiwa itu saat ini sedang mengalami kelangkaan devisa yang parah.
- Sri Lanka telah gagal membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dolar AS dan telah melakukan pembicaraan bailout atau dana talangan dengan Dana Moneter Internasional.

DATA: REPUBLIKA | RISET: TIM | GRAFIS: OBIE

CARA PANDANG
Inspirasi Terkini

Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman Penanggung Jawab: Michael Malik Pemimpin Redaksi : Nafik Muthohirin Redaktur Pelaksana : Amir Fiqi, Zainal Arifin Redaktur : Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan Desain Grafis : Hengki, Soki Rahman Wardi, Taqi khana IT : Zulfikar Iskandar Fotografer : Robby Firmansyah, Jirga Reporter : Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi Sirkulasi: Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521 email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

SURVEI DINI PILPRES 2024

Membicarakan pemilihan presiden (pilpres) pada Februari 2024 nanti, adalah diskusi yang terlalu dini. Lebih-lebih, mencocok-cocokkan siapa calonnya. Belakangan, gerak cepat beberapa elite politik memang mewarnai perbincangan publik.

Publik mulai digiring untuk melihat, siapa saja yang kira-kira akan berjaga pada Pilpres 2024 nanti. Beberapa nama yang familiar misalnya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Erick Tohir. Bahkan, Prabowo Subianto juga disebut-sebut masih ingin meramaikan Pilpres 2024. Meski koalisi partai politik itu perlu dibangun, tapi meramaikan pembicaraan pilpres pada masa jabatan pemerintahan yang masih relatif panjang, adalah hal yang kurang etis.

Pemerintah dan partai pengusung koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seharusnya tetap fokus pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan manusia yang bersifat jangka panjang dan tidak terikat rutinitas pemilu lima tahun sekali. Pada konteks ini, pemerintah seyogianya membantu mengarahkan para elitnya untuk fokus pada tanggung jawab masing-masing, menyelesaikan tugas yang menjadi mandat masyarakat.

Kalaupun elite partai politik hendak membicarakan potensi koalisi pada pilpres 2024, semestinya hal itu dilakukan dalam tujuan membentuk kolaborasi substansial, yang memang dimaksudkan untuk membangun republik ini dalam jangka panjang.

Maka itu, pembicaraan koalisi pilpres 2024, semestinya memunculkan 'program' apa yang hendak ditawarkan kepada publik, masalah apa yang masih

perlu diperbaiki oleh para elite bangsa, bukan 'siapa' yang akan menjadi calon.

Di sisi lain, untuk mewujudkan koalisi substansial seperti itu, lembaga survei memiliki peran mendasar yang tidak mudah. Lebih-lebih, lembaga survei, yang sebetulnya berfungsi untuk mengetengahkan informasi yang bermanfaat, merangkum persepsi publik

mengenai suatu fenomena, dan bersifat independen, justru di beberapa kesempatan berdiri karena sokongan elite. Bahkan, tidak jarang, lembaga survei malah bekerja sebagai corong puak politik tertentu. Di sini, lembaga survei menghadapi tantangan dari publik, betulkah bisa independen?

Dalam konteks pilpres 2024, maka, lembaga survei berperan penting untuk meyakinkan publik bahwa ia tidak bias informasi dan tidak membelah publik. Sebab, masyarakat sudah begitu terbelah (*fragmented society*) sebagai eksekusi pilpres 1 dekade belakangan. Lembaga survei, di sisi lain, juga perlu menyampaikan persepsi publik mengenai isu-isu krusial yang harus dibereskan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, lembaga survei, selain bekerja untuk menyajikan informasi mengenai elite, juga perlu bekerja sebagai 'penyambung lidah' rakyat.

Kita mungkin masih ingat bahwa pengalaman pilpres 2014 dan 2019 adalah perpecahan yang begitu bersejarah bagi anak bangsa. Kami bahkan menyebutnya salah satu yang terburuk dalam catatan republik ini. Momen itu, ajang pilpres dikonfigurasi sedemikian rupa oleh kelompok elite untuk menguntungkan puaknya sendiri, sedang rakyat berdarah-darah. Tentu, pada 2024 nanti, perpecahan semacam itu kita harapkan tidak terjadi. Semoga.





SURVEI POLITIK (YANG) TERLALU DINI

Menjamurnya lembaga survei di Indonesia yang diduga banyak ditunggangi oleh kepentingan elit politik tertentu berpotensi membelah opini publik. Padahal, secara filosofis, fungsi lembaga survei adalah memberikan informasi mengenai persepsi publik atas suatu fenomena. Lantas, bagaimana seharusnya lembaga survei bekerja menjelang pemilihan umum 2024.

Setiap momen politik, seperti jelang pemilihan presiden (Pilpres) atau legislatif (Pileg), kehadiran sejumlah lembaga survei memiliki peran strategis untuk mengukur kekuatan elektabilitas calon pemimpin maupun partai. Bak jamur di musim hujan, lembaga-lembaga survei baru bermunculan, tidak pernah dikenal sosok pendiri maupun rekam jejak portofolio sebagai peneliti, namun tiba-tiba mengeluarkan hasil riset yang menggegerkan publik.

Kehadiran dan keterlibatan lembaga-lembaga survei itu penting, karena secara ideal berperan sebagai penyeimbang dan pengontrol demokratisasi nasional. Persoalannya, sejumlah lembaga survei abal-abal bekalgan muncul. Disebut abal-abal karena hanya berorientasi pada keuntungan dan kepentingan tertentu untuk menjatuhkan lawan dari klien politik yang menggunakan jasanya.

Walhasil, lembaga-lembaga survei abal-abal itu mengabaikan aspek kerja-kerja riset yang ideal. Penggunaan metodologi dan pengukuran reliabilitasnya hanya disesuaikan untuk kepentingan klien, pun demikian dengan pertanyaan dan obyek penelitiannya telah disesuaikan sejak awal untuk menempatkan kliennya di peringkat paling atas dibanding calon-calon lainnya.

Kemudian, rekayasa survei dilanjutkan dengan mempropagandakannya melalui desiminasi hasil riset di media sosial dan media-media *mainstream*. Tak jarang, lembaga-lembaga survei itu membentuk kelompok *buzzer* yang sengaja untuk mendongkrak popularitas klien dan sekaligus menjatuhkan lawan politiknya.

Menurut sejarah, pada awalnya survei politik banyak digunakan di

negara-negara demokrasi pada akhir perang dunia II. Di Amerika Serikat (AS), survei politik mulai dijalankan pada akhir 1940. Meskipun di awal banyak terjadi kesalahan metodologis dalam pelaksanaannya, tetapi seiring berjalannya waktu, metodologi survei telah berkembang dan memiliki banyak ragam.

Sementara itu, di Indonesia, lembaga survei semakin menjamur. Bahkan, banyak lembaga survei yang secara sengaja berfungsi sebagai konsultan politik terutama oleh tokoh-tokoh yang akan berlaga dalam berbagai ajang pemilihan pemimpin di negara ini. Oleh karenanya, politik dan lembaga survei tak dapat terpisahkan.

Sebab, setiap proses politik akan terukur dan objektif manakala ada keterlibatan lembaga survei di dalamnya. Namun, lembaga survei juga harus independen dan berada pada jalur yang lurus agar kehadirannya tidak merusak tatanan demokrasi.

Fenomena menjamurnya lembaga survei di Indonesia memang telah menjadi industri baru dalam dunia perpolitikan. Lembaga-lembaga survei yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya ada 40 institusi, di antaranya Poltracking Indonesia, Charta Politika Indonesia, Indobarometer, dan sebagainya.

Namun, dalam praktiknya tak sedikit yang menyimpang dengan mengabaikan etika, prinsip-prinsip ilmiah dan objektivitas penelitian. Pengamat kebijakan publik Indonesia, Andirnof A. Chaniago mengatakan, “Lembaga survei harus bersifat objektif dan terbuka,

agar hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Tidak etis apabila secara intelektual memihak ke kubu politik tertentu. Karena lembaga survei terikat oleh kode etik, maka kredibilitasnya harus benar-benar dipertanggungjawabkan.”

Polemik Hasil Survei

Polemik hasil survei politik di Indonesia dalam rangka melihat elektabilitas bakal calon presiden atau wakil presiden kerap kali terjadi. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dari masing-masing lembaga survei perlu disikapi dengan wajar, sehingga tidak berpotensi membelah publik sedari dini.

Yang terbaru, beberapa lembaga survei nasional sudah mengeluarkan hasil survei mereka untuk melihat bakal calon presiden, calon wakil presiden, dan elektabilitas tokoh-tokoh publik di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tersebut, lantas memicu kasak-kusuk publik mengenai siapa saja yang



Prabowo Subianto, salah satu Menteri yang masuk bursa calon Presiden 2024 hasil survei.

diindikasikan akan berlaga pada pilpres 2024.

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, misalnya, pada 14 Juni 2022 lalu melakukan konferensi pers mengenai figur publik yang diperkirakan akan tampil pada pilpres Februari 2024 mendatang. LSI Denny JA menyebut bahwa nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan berada di lingkaran tiga besar teratas. Lebih-lebih, jika ditarik pada nama yang lebih luas, lembaga survei LSI Denny JA mencatat kemungkinan besar terdapat lima nama yang berpotensi saling berhadapan. Mereka adalah Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Pada survei yang dilaksanakan pada 24 Mei – 7 Juni 2022, lembaga Survei LSI Denny JA juga menyebut bahwa kemungkinan besar pada 2024 nanti akan ada tiga poros utama yang akan bertarung. Ketiga poros tersebut adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan figur utama Airlangga Hartarto, poros PDIP dengan nama utama Puan Maharani, dan poros Gerindra-PKB.

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan oleh Political Weather Stations (PWS) pada 15-28 Juni 2022 menyebutkan bahwa di antara para menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, nama Prabowo Subianto dianggap masih memiliki posisi kuat. "Elektabilitas Menhan Prabowo Subianto 40,5% masih memimpin jauh," ungkap peneliti senior PWS, Mohammad Tidzi pada Rabu, 6 Juli 2022. Sedang posisi kedua dan ketiga, secara berurutan adalah Sandiaga Uno (15,4%) dan Moeldoko (10,2%). Adapun nama yang dianggap cukup

mentereng, seperti Erick Thohir ternyata hanya menempati urutan keempat (8,7%).

Meskipun ada perbedaan dalam hasil survei, hal itu merupakan sesuatu yang normal dalam setiap momen politik. Bisa jadi perbedaan itu muncul karena didasari oleh momentum pelaksanaan hasil survei. Apabila waktunya berbeda, otomatis dinamika yang terjadi juga berbeda.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi hasil survei adalah metodologi. Setiap lembaga survei tentu mempunyai teknis yang berbeda dalam menentukan metode, sampel, dan responden. Dari metodologi yang berbeda itu, maka hasil yang keluar otomatis tak akan sama. Namun, meskipun hal ini normal, lembaga survei harus tetap independen. Jangan sampai setiap momen politik tiba, lembaga survei berubah menjadi pragmatis dengan mencari suaka untuk kepentingan pasangan calon.

Independensi Lembaga Survei

Lembaga survei adalah lembaga yang bekerja dengan menggunakan metodologi ilmiah. Maka, dalam pelaksanaannya harus independen dan objektif serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ilmiah. Sebagai lembaga yang independen, sudah sepatutnya tidak memihak terhadap kepentingan salah satu calon maupun menjadi bagian dari tim sukses. Hal ini jelas akan mencoreng nama baik lembaga survei itu sendiri.

Prinsip independensi dalam lembaga survei artinya mengambil sudut pandang yang tidak bias, berdiri sendiri dengan posisi yang tidak terikat dengan pihak mana pun dan

berjiwa bebas. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu lembaga survei harus profesional seperti yang tertera dalam kode etik Ikatan Surveyor Indonesia.

Kode Etik Ikatan Surveyor Indonesia itu menyebutkan bahwa hati nurani, yaitu perpaduan kejujuran, keadilan, dan santun merupakan falsafah moral yang dalam konteks kepentingan timbal balik antar manusia, wajib menjunjung tinggi falsafah dan UUD negara, harus yakin akan kebenaran dan kecukupan data dan informasi yang ia sajikan, dan harus yakin akan kebenaran dan kecukupan metode, sarana, dan tenaga yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data informasi.

Inilah landasan etik yang harus menjadi fondasi setiap lembaga survei di Indonesia. Kepercayaan terhadap institusi survei adalah kunci utama keberhasilan lembaga survei itu sendiri. Dalam setiap momen politik, lembaga survei hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Dengan begitu, lembaga survei membantu berjalannya demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik. **Aldi Bintangnaff**



Ardian Sopa (peneliti Denny JA)

LAPORAN UTAMA

BEREBUT WARISAN PAMOR JOKOWI

Sejumlah nama yang masih duduk dalam lingkaran kekuasaan, berstatuskan pejabat, tampak memiliki gairah untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Satu sama lain saling berebut popularitas Jokowi.

Perspektif hak asasi manusia memang menyatakan bahwa berpartisipasi dalam politik adalah lumrah. Namun demikian, menjadi persoalan apabila penggunaan hak tersebut malah menjadi presedensi buruk bagi

jalannya pemerintahan.

Ditegurnya Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagi-bagikan minyak goreng gratis lantaran menyambi

dengan promosi calon DPR anaknya. Ini adalah salah satu contoh sulitnya membedakan wujud elit sebagai parpol dan sebagai pejabat publik.

Apalagi, dalam menghadapi Pilpres 2024, ketiadaan petahana dan banyaknya koalisi parpol dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), akan menjadikan jalannya pemerintahan sebagai 'panggung' untuk saling berebut pengaruh.

Peta Jalan Tokoh Potensial

Berdasarkan hasil penelusuran *Tim Carapandang*, setidaknya terdapat empat orang kementerian KIM dan dua orang DPR yang masuk dalam bursa capres pada Pilpres 2024. Dari kalangan kementerian adalah Prabowo



Keempat Menteri Jokowi yang masuk bursa survei calon Presiden 2024

Subianto (Kementerian Pertahanan), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Erik Thohir (Menteri BUMN), dan Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian). Adapun dari kalangan DPR terdapat Puan Maharani (Ketua DPR RI) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB).

Keempat nama dalam jabatan menteri dan satu orang DPR diindikasikan berkemauan untuk maju menjadi capres, manakala Presiden Jokowi menanyakan kehendak mereka untuk mencalonkan diri. Dikutip dari Panda Nababan, Kamis (14/04), bahwa selain menegaskan bahwa Jokowi menolak isu jabatan presiden tiga periode, presiden juga menanyakan kemauan para menterinya untuk mencalonkan diri.

Selain itu, sinyalir kesiapan beberapa nama di atas juga dapat dilihat dari pernyataan parpol secara eksplisit. Contohnya dalam hal ini

adalah Golkar, sesuai dengan amanat musyawarah nasional pada 2019, Golkar secara solid dan serentak akan mengusung Airlangga Hartarto untuk menjadi capres pada 2024.

Adapun Partai Gerindra melalui Ahmad Muzani memastikan, Prabowo akan tetap maju pada Pilpres 2024 sebagai capres. “Dalam waktu dekat, pasti Gerindra akan mendeklarasikan dan menginstruksikan kader Gerindra pada masing-masing level kepemimpinan untuk solid terhadap Prabowo sebagai capres,” kata Muzani, Sabtu, (04/06).

Sinyalir dukungan partai lainnya juga terlihat pada Muhaimin dan Puan. Sebagai elit yang berada pada

tampak kepemimpinan, perkara sikap partai adalah hal lazim yang sudah dibicarakan jauh-jauh hari. Khusus bagi Muhaimin (Cak Imin), manuver-manuver politiknya untuk menjadi capres atau cawapres sudah terlihat secara gamblang dari banyaknya baliho yang dapat ditemukan hampir di seluruh kota di Indonesia sejak menjelang Pilpres 2019.

Puan Maharani sendiri juga dapat ditinjau secara jelas, baik dari gestur-gestur agitasi melalui baliho – kendati tidak spesifik Cak Imin, internal partai yang tidak semerta-merta mempersilahkan manuver politik Ganjar Pranowo, serta juga kecondongan trah Soekarno dan Megawati. Alih-alih memilih kader partai yang lain, bahkan akhir-akhir ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati, menyuruh Puan keliling Indonesia dan melaksanakan penjajakan silaturahmi dengan parpol yang lain.

Berharap dari Popularitas Jokowi

Jokowi dengan segala kepiawaian dan kerendahhatiannya pada Pilpres



Panda Nababan



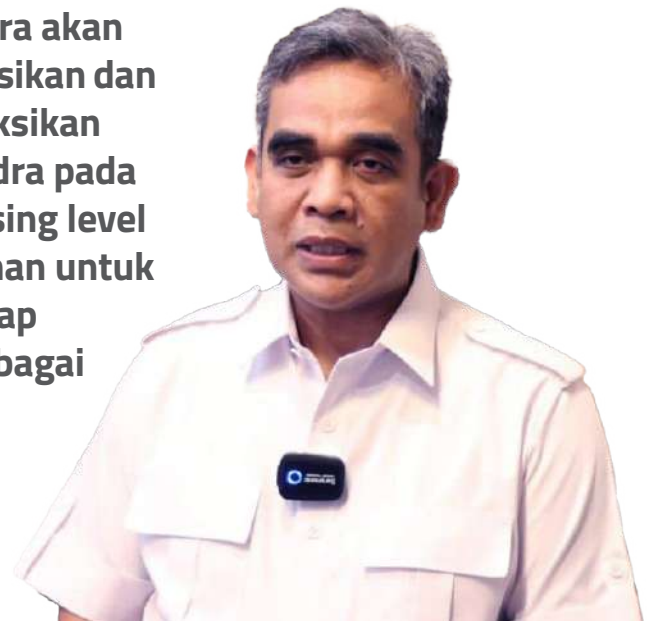
Muhaimin Iskandar disebut sebagai politisi yang menyuarakan masa jabatan Presiden tiga periode, tetapi di sisi yang lain dia berkampanye menjadi calon presiden 2024.

yang sudah-sudah, telah membuktikan bahwa ia adalah ‘tembok’ bagi setiap lawan sekaligus ‘benteng’ pertahanan bagi kawannya. Dalam survei Indikator Politik belum lama ini menyatakan, betapa berpengaruhnya Jokowi dalam mendongkarak suara PDIP.

Apabila dulu pada 2014 tidak mengusung Jokowi – mendapatkan 37,8 persen, maka PDIP hanya akan mendapatkan perolehan suara 14,4 persen. Begitupun pada 2019, dari total perolehan PDIP sebesar 19,3 persen kursi DPR, 21 persennya adalah berkat Jokowi. Tatkala Jokowi sudah tidak berkompetensi, maka banyak pihak yang mulai berebut warisan popularitas dukungan Jokowi selain juga mencari suara dari kelompok yang lebih terbuka.

Dalam waktu dekat, pasti Gerindra akan mendeklarasikan dan menginstruksikan kader Gerindra pada masing-masing level kepemimpinan untuk solid terhadap Prabowo sebagai capres.

Ahmad Muzani



Menganalogikan suara dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres yang lampau dengan konsep warisan, maka akan ditemukan bahwa hanya orang-orang terdekat yang akan mendapatkan. Jika bukan mereka yang berada pada partai yang sama, atau mereka yang dalam jajaran kementerian, atau bahkan juga mereka yang turut berkoalisi dalam pemerintahan.

Hingga saat ini, setidaknya dapat dilihat bahwa terdapat 12 partai yang turut berkoalisi dalam jajaran KIM. Tujuh di antaranya adalah partai-partai besar yang lolos menjadi legislator di DPR, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Adapun dua partai besar lainnya, yakni Demokrat dan PKS berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah.

Konstelasi ini mengisyaratkan bahwa kebanyakan partai menyadari akan kebesaran nama Jokowi dalam berbangsa dan bernegara. Ketimbang menjadi oposisi yang sudah pasti kalah, kooptasi citra secara internal akan lebih menguntungkan, mengingat

bahwa Pilpres 2024 tidak akan ada lagi sosok seperti Jokowi. Hal ini terbukti dari meningkatnya popularitas Prabowo yang dulu sempat secara *vis a vis* bertentangan dengan Jokowi.

Riset Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan, rentang 10-24 Juni 2022 dari 1.500 responden, Prabowo mendapatkan popularitas tertinggi di angka 29,5%. Selanjutnya, juga ada Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP yang juga bersama dengan Jokowi, hingga saat ini menurut survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menjajaki posisi teratas mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry menjelaskan, Prabowo tetap memuncaki urutan pertama melalui dua survei serupa dari lembaga riset yang kami kelola. “Kendati Prabowo Subianto dapat

dikategorikan sebagai salah satu kandidat capres 2024 yang paling minimalis melakukan komunikasi publik dalam bentuk digital campaign maupun penggalangan dukungan di berbagai pelosok Tanah Air sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh lainnya, namun elektabilitasnya secara perlahan tapi pasti terus menguat,” kata Gema melalui penjelasannya di media dalam jaringan, Jum’at (15/7).

Injury Time Kepemimpinan Jokowi

Dilansir dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadwal pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Apabila dikalkulasikan dalam hitungan hari, maka masih kisaran 500 harian lagi (satu tahun setengah). Bagi mereka yang tidak terlalu kosen pada persoalan politik praktis, maka rentan

waktu ini dapat dianggap masih terlalu dini untuk dibahas. Bukan karena apatis terhadap agenda rekrutmen pemimpin nomor wahid di Indonesia, namun masih ada yang paling penting di antara yang penting.

Sukardi Rinakit dalam artikel “Cobaan yang Menggelora” pernah menyadur pernyataan Abraham Lincoln (1860) bahwa pada suatu rezim demokrasi yang berlaku kepemimpinan selama lima tahun, maka satu tahun pertama digunakan untuk melakukan rekonsiliasi politik dan dua tahun akhir digunakan kembali untuk konsolidasi politik menjelang Pilpres mendatang. Lazimnya dua tahun setelah masa rekonsiliasi dan sebelum masa konsolidasi politik adalah masa efektif kepemimpinan suatu rezim (Kompas, 2008).

Bertolak pendapat Lincoln di atas, maka tidak berlebihan kiranya untuk menganggap bahwa pada 2022 seharusnya masih menjadi tahun efektif kepemimpinan Presiden Jokowi – setidaknya sampai akhir 2022. Manuver pembahasan soal Pilpres 2024, telah menjadi topik pembahasan yang terlalu ‘pagi’ untuk dikonsumsi masyarakat.

Sulit juga untuk dibayangkan bahwa apabila beberapa bursa calon, manakala masih menjabat sebagai menteri atau Ketua DPR, tetapi sudah bermanuver. Kasus-kasus semacam Zulhas yang seakan mencampurkan antara tugas kenegaraan dan kepentingan partai akan semakin jelas terlihat. Kendati secara tertulis peraturan tidak melarangnya, namun politik yang mencerminkan kesopanan dan kesantunan amat perlu dilaksanakan. **Nabil Nizam**

Kendati Prabowo Subianto dapat dikategorikan sebagai salah satu kandidat capres 2024 yang paling minimalis melakukan komunikasi publik dalam bentuk digital campaign maupun penggalangan dukungan di berbagai pelosok Tanah Air sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh lainnya, namun elektabilitasnya secara perlahan tapi pasti terus menguat.



Gema Nusantara Bakry



Megawati Menugasi Puan untuk Melakukan Safari Politik. Pengamat Politik Menilai sebagai Pesan Tersirat Dukungan Mega untuk Puan supaya Bersiap Diri Maju dalam Pilpres 2024

UPAYA MEMPERCEPAT TAJUK PILPRES 2024

Kontestasi politik dengan segala hiruk pikuk di dalamnya, hampir selalu berbicara tentang strategi kemenangan. Salah satunya melalui strategi kampanye politik melalui lembaga survei. Seorang tokoh, terutama lewat parpol, menjadi klien lembaga survei tertentu, untuk disurvei dan “dipopulerkan” melalui cara-cara kerja penelitian politik.

Tak pelak, perbincangan Pilpres 2024 menjadi kampanye yang terlalu pagi seperti sekarang ini. Hasil survei politik disebar di berbagai media dan menjadi

tajuk pemberitaan. Ironis, padahal bekas Pilpres 2019 masih menyisahkan luka. Komunikasi politik Pilpres yang masih dini itu dianggap sebagai “rahasia kemenangan” parpol untuk mendongkrak popularitas kandidatnya.

Walhasil, tugas parpol yang harusnya menghimpun dan menyuarakan aspirasi rakyat, banyak terabaikan. Tokoh politik atau parpol lebih sibuk mengurus kemenangan dibanding merealisasikan tugas pokok mereka.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang Sirajudin mengatakan, seharusnya tugas partai politik adalah penghimpunan (agregasi) aspirasi, penyaluran (delegasi), dan rekrutmen kepemimpinan. Bila aspirasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, transparan, dan kredibel terkait pemilu, maka sudah sepatutnya parpol

pun menyediakan akses terhadap informasi tersebut.

Namun demikian, tampaknya idealitas tersebut laksana ‘pungguk merindukan bulan’. Hampir tidak mungkin seorang warga negara biasa, yang juga konstituen, dapat mendapatkan akses tersebut. Jurnalis dan Aktivistis Media Sosial Najwa Shihab dalam sinier *Musyawarah* mengatakan, dalam konstelasi politik kenegaraan, rakyat dianggap hanya penonton.

“Rakyat *tuh* dipaksa (oleh elit politik) cuma mengomentari hal-hal yang ngga penting, karena ya memang kita dianggap ngga penting. Kita *tuh* dianggap cuma penonton. Semua deal-deal yang dilakukan itu *tuh* di ruangan tertutup,” kata Najwa dalam saluran *YouTube*-nya, Selasa (14/6).

Hingga saat berita ini diturunkan, setidaknya dapat diidentifikasi bahwa hampir seluruh parpol yang mendapat jatah di kursi DPR telah dan akan melaksanakan safari politik untuk pemenangan Pilpres 2024. PDIP, misalnya, secara terang-terangan dan beberapa di antaranya yang melakukan komunikasi politik secara tersirat.

Tajuk Pilpres “Dipercepat”

Pembahasan seputar politik dalam aras kebangsaan dan kenegaraan, dewasa ini seakan didominasi oleh tajuk yang berorientasi pada Pilpres 2024 semata, entah karena memang sengaja digaungkan atau sekedar dicocok-cocokkan bahkan pada suatu hal yang remeh. Data Google Trends menunjukkan bahwa tren pembahasan Pilpres 2024 dengan kata kunci tertentu sejak 18 Juli 2021 hingga hari ini, mengalami

kenaikan secara signifikan.

Kata kunci ‘Pilpres 2024’ mengalami kenaikan *trending* yang memuncak di angka 4.440.000 pencarian dengan persentase pada tanggal 19 Juni 2022. Topik spesifik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 pada saat itu adalah bertemunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam rangka membahas kesepakatan memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, juga ada pemberitaan terkait kinerja baik Airlangga Hartarto yang dianggap layak untuk maju dalam Pilpres 2024. Pada hari yang sama pula, pembahasan terkait koalisi Golkar, PPP, dan PAN dilaksanakan. Terakhir, juga dibahas keengganan PSI untuk mendukung Anies Baswedan untuk menjadi capres.

Pada kata kunci ‘Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024’, lonjakan *trending* terjadi tanggal 20 Februari 2022 yang saat itu didominasi dengan isu penundaan Pilpres 2024 yang diusulkan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Adapun pada kata kunci yang terakhir, yakni ‘presiden 2024’, terdapat lonjakan *trending* pada tanggal 19 Juni 2022. Saat itu, Ketua U m u m Partai

Rakyat *tuh* dipaksa (oleh elit politik) cuma mengomentari hal-hal yang ngga penting, karena ya memang kita dianggap ngga penting. Kita *tuh* dianggap cuma penonton. Semua deal-deal yang dilakukan itu *tuh* di ruangan tertutup.



Najwa Shihab
Aktivistis Media Sosial



Bawono Kumoro

Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh mengumumkan tiga bakal calon presiden yang telah dikantonginya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa.

Dilansir dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa jadwal pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Apabila dikalkulasikan dalam hitungan hari, maka masih kisaran 500 harian lagi (satu tahun setengah). Bagi mereka yang tidak terlalu konsen pada persoalan politik praktis, maka rentan waktu ini dapat dianggap masih terlalu dini untuk dibahas. Bukan karena apatis terhadap agenda rekrutmen pemimpin nomor wahid di Indonesia, namun masih ada yang paling penting di antara yang penting.

Peluang dan Tantangan

Manuver pembahasan soal Pilpres 2024, telah menjadi topik pembahasan yang terlalu 'pagi' untuk dikonsumsi masyarakat. Belum lagi polarisasi pasca Pilpres 2019 yang membelah masyarakat pada dua kubu secara *vis-à-vis*, hingga kini masih terlihat dalam ruang-ruang diskusi secara virtual di media sosial.

Komunikasi politik yang terlalu dini melalui pembahasan koalisi dalam pandangan pengamat, bisa jadi suatu peluang maupun tantangan. Bawono Kumoro dalam webinar Partai Perindo menguraikan bahwa koalisi yang sudah terbentuk akhir-akhir ini, tidak lain semacam 'tes ombak' semata.

"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), misalnya, akan mudah terombang-ambing dengan arah politik yang dinamis di tengah jalan. Amat memungkinkan bahwa di kemudian hari, koalisi ini akan secara silih berganti keanggotaannya," kata Bawono.

Koalisi beberapa partai yang masih terjalin dengan Kabinet Indonesia Maju di era Jokowi ini, dapat juga berpotensi mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan ke depan. Sulit dibayangkan bila ternyata PDIP selaku partai yang menjadi kendaraan Jokowi, ternyata tidak memiliki keterkaitan koalisi dengan beberapa partai yang baru-baru ini membentuk koalisi.

Berbeda dengan Bawono, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani menyebutkan, terbentuknya koalisi sejak dini adalah sisi positif yang perlu disambut dengan baik.

"Hal ini lebih dilandaskan pada argumentasi bahwa koalisi dibangun secara skeptis dengan persiapan yang matang, bukan sekedar pencarian praktis calon potensial yang cenderung transaksional," ucap Fadli, Selasa (19/07).

Selain itu, para parpol yang sudah terjalin dengan ikatan koalisi, sudah sepatutnya semakin memiliki waktu untuk mendengarkan aspirasi di kalangan akar rumput.

Bagaimanapun kondisi koalisi yang saat ini telah dan akan terbentuk, perlu menjadi perhatian bahwa budaya politik di Indonesia masih memiliki permasalahan yang krusial. Kendati mengalami kenaikan secara umum pada indeks demokrasi global 2021, namun Economist Intelligence Unit (EIU) masih memberikan catatan buruk atas praktik budaya politik dengan nilai 4,38.

Masalah budaya politik ini meliputi aspek persepsi masyarakat bahwa demokrasi dapat merawat dan meruwat ketertiban umum, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan seorang ahli, kalangan militer, pemisahan antara ibadah dan urusan pemerintahan, serta persepsi masyarakat bahwa kepemimpinan yang kuat adalah melalui jalur pemilu dan parlemen.

Beberapa indikator tersebut, juga dapat menjadi sinyal keras bahwa masih terdapat cara berpikir yang terlalu sederhana dalam memandang rekrutmen politik di Indonesia. Apalagi dalam konteks ini, elitisme para tokoh politik semakin mendominasi monopoli arus informasi terkait komunikasi politik.

Nabil Nizam

Fadli Ramadhani

Hal ini lebih dilandaskan pada argumentasi bahwa koalisi dibangun secara skeptis dengan persiapan yang matang, bukan sekedar pencarian praktis calon potensial yang cenderung transaksional.



BUKTI INSTITUSI PENGELOLAAN PETERNAKAN LEMAH

Seorang ibu menangis tersedu-sedu di sebuah kandang sapi yang sederhana. Ia tampak lemas meratapi sapinya yang lunglai akibat wabah penyakit kuku dan mulut (PMK). Kedua tangannya memegang sapi yang terlihat kesakitan, dengan kepala terkulai di lantai kandang. Layaknya para peternak lain di Indonesia, mungkin itulah gambaran peternak kita hari ini. Ratapan itu secara memilukan ditayangkan oleh akun *Youtube Medcom.id* pada Jum'at (10/6). Menurut keterangannya, ibu

yang identitasnya tidak sebutkan itu adalah seorang peternak sapi di Lumajang, Jawa Timur.

Sejak ditemukannya kasus PMK pertama di Indonesia yakni di Gresik pada 2 Mei 2022, pemerintah menghimbau agar dilakukan pembatasan mobilitas ternak. Sebagaimana ditulis oleh *Tempo* 2 Juli 2022, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada 9 Mei 2022 mengeluarkan instruksi karantina dan *lockdown*. Kendati demikian, instruksi presiden itu, di lapangan, tidak

berjalan dengan sempurna, "Akhirnya timbullah kesulitan yang lebih besar," ujar Muhammad Munawaroh, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) kepada *Tempo*.

Hingga laporan ini ditulis pada Minggu (17/7), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga yang menjadi koordinator Satuan Tugas (Satgas) penanganan wabah PMK, mencatat wabah PMK sudah menyebar di 22 provinsi yang mencakup 257 kabupaten dan kota. Total hewan ternak yang sudah terjangkit mencapai 384.133 ekor. Dari total ternak yang terjangkit itu 0,64 persen di antaranya, atau setara dengan 2.463 ekor hewan ternak mati. Sementara itu, 59 persen lainnya, atau sejumlah 226.822 ekor masih menjalani pengawasan karena belum sembuh total.

Jika dilihat sebaran secara spasial, rekor hewan ternak paling banyak terjangkit masih dipegang oleh Jawa Timur, mencapai 157.115 ekor. Peringkat kedua dan ketiga adalah Nusa Tenggara Barat dan Aceh, masing-masing jumlah ternak yang terjangkit mencapai 77.322 dan 35.350 ekor.

Dalam pada ini, hasil investigasi yang dilakukan *Kompas* edisi 14-15 Juli



Jokowi Tinjau Peternakan Sapi di Sumatera Utara



2022 dan *Majalah Tempo* edisi 2 Juli 2022, menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama masuknya wabah PMK di Indonesia adalah lemahnya pengawasan mobilitas hewan ternak. Termasuk adanya temuan masuknya hewan ternak ilegal dari Thailand melalui “jalur tikus”.

Di sisi lain, ketika wabah PMK semakin merebak di beberapa kantong peternakan di Indonesia, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, pemerintah seakan tidak banyak belajar dari penanganan pandemi covid-19. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah tidak aktif melakukan *tracing* dengan ‘aktif’ melakukan tes untuk mengetahui masyarakat yang terjangkit pagebluk Covid-19, tetapi

lebih didominasi oleh masyarakat yang melakukan tes karena terjangkit (*passive test*). Hal yang sama juga terjadi pada penanganan wabah PMK.

Investigasi *Kompas* pada 14 Juli 2022 bertajuk “*Deteksi Dini Tidak Berjalan*” menyebut, pengecekan hewan ternak yang semestinya dilakukan menggunakan *polymerase chain reaction* (PCR) tidak berjalan. Sebaliknya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengecekan dilakukan dengan hanya melihat gejala klinis pada hewan ternak, sehingga ketika hewan ternak tidak menunjukkan gejala penyakit pada kaki dan mulutnya, hewan bisa masuk ke pasar hewan dan diperjualbelikan.

Maka kemudian, angka statistik

jumlah hewan ternak yang dipublikasikan oleh laman bnpb.go.id itu boleh jadi hanyalah fenomena gunung es. Dengan kata lain, ada data jumlah hewan ternak yang tidak terdeteksi dalam jumlah besar. Belum lagi, sebut Laporan *Kompas* edisi 15 Juli 2022 itu, masih banyak pihak-pihak di luar dinas terkait, baik itu dokter hewan atau paramedik veteriner praktisi mandiri yang tidak melaporkan temuan di lapangan. Lebih-lebih, informasi kesehatan hewan nasional (ISIKHNAS) hampir tidak mendapatkan informasi temuan penyakit hewan dari praktisi mandiri.

Sementara itu, sejak penemuan kasus PMK pada Mei 2022 lalu itu, organisasi dunia untuk kesehatan

hewan (OIE) mencabut status bebas PMK Indonesia tanpa vaksinasi yang sudah bertahan sejak 1990.

Sejak 2015

Menurut investigasi *Kompas*, PMK sebetulnya sudah terjadi pada 2015. Sebuah dokumen yang diperoleh *Kompas* mengonfirmasi adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyebar di peternakan babi di Jawa Barat dan Banten pada 2015. Dokumen itu menyebut bahwa hasil uji lab babi di tiga tempat, yakni di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan di



Jika wabah ini terus terjadi dalam jangka panjang, potensi kerugian akan terus membesar.

Nuryani Zainuddin
Direktur Kesehatan Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian



Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, menunjukkan hasil positif PMK. Uji lab di tiga tempat itu dilakukan pada Agustus dan September 2015. Kendati demikian, tulis *Kompas*, Kementerian Pertanian tidak mengonfirmasi sama sekali nama penyakit yang mengharuskan ratusan babi dimusnahkan. Proses pemusnahan babi-babi yang terindikasi terkena PMK itu dilakukan dengan cara disuntik mati lalu dikubur.

Kendati demikian, *Kompas* menulis bahwa setelah dilakukan uji lab lebih lanjut, ternyata varian PMK yang



ditemukan pada Mei 2022 lalu berbeda dengan kasus yang ditemukan pada 2015. “Virus di dua tahun itu berasal dari nenek moyang yang berbeda,” tulis *Kompas*, 15 Juli 2022. Sungguhpun begitu, pemerintah terkesan tidak transparan pada kasus yang terjadi di Bogor dan Tangerang tersebut, lebih-lebih peternak tidak pernah mendapat informasi detail mengapa ternak-ternak itu harus dimusnahkan secara masal.

Lemahnya Pengawasan

Dugaan paling kuat mengenai asal sumber PMK pada 2022 sementara ini mengarah pada faktor mobilitas hewan ternak yang terjadi dalam jumlah besar. Dugaan ini sejalan dengan temuan investigasi *Tempo* edisi 2 Juli 2022 yang menyebutkan adanya penyelundupan domba dan kambing yang masuk dari Malaysia dan Thailand. Masih menurut *Tempo*, domba dan kambing ilegal itu diduga diselundupkan melalui Sumatra Utara dan Aceh, yang lantas dibawa melalui jalur darat ke Lampung. Dari Lampung, tulis *Tempo*, hewan-hewan ternak itu masuk ke Jawa Tengah berbekal surat keterangan Kesehatan hewan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Investigasi *Kompas* 14 Juli 2022 menemukan bahwa surat jalan itu palsu.

Secara lebih detail, *Kompas* menyebutkan bahwa penyelundupan domba dan kambing dari Thailand itu masuk melalui Aceh Tamiang, misalnya penyelundupan Kambing Saanen berhasil dilakukan melalui pelabuhan tikus pada Februari 2022. Sementara itu, upaya pengiriman ilegal pada April 2022 berhasil digagalkan oleh Bea dan Cukai Langsa, Aceh.

Selain temuan penyelundupan hewan ternak dari Thailand,

penyebaran wabah PMK juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Indonesia. Padahal, pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak menjadi sangat penting untuk mencegah penularan PMK. Longgarnya pengawasan lalu lintas hewan ternak misalnya terlihat di Jembatan Nasional Suramadu dan di perbatasan Mojokerto-Gresik Jawa Timur.

Pelibatan Peternak

Dalam pada ini, kasus PMK yang berkepanjangan diperkirakan semakin memukul kesejahteraan petani. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin menyebutkan, potensi kerugian bisa melebihi Rp9,9 triliun.

“Jika wabah ini terus terjadi dalam jangka panjang, potensi kerugian akan terus membesar,” ungkap Nuryani, di sebuah seminar berbasis dalam jaringan pada Minggu (26/7).

Tentu, penanganan wabah di saat karantina hewan tidak mudah dilakukan, menjadi semakin sulit. Satu-satunya cara adalah vaksinasi harus dilakukan lebih cepat, yang hingga 17 Juli 2022 sudah mencapai 516.374 ekor hewan.

Pemerintah harus bergerak cepat melakukan *tracing* gratis kepada peternak di bawah. Semua harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua unsur pihak terkait. Sebab, pemulihan Indonesia untuk bebas ternak membutuhkan waktu yang panjang. Seperti yang dikatakan Muhammad Munawaroh, ketua PDHI, “kurang lebih 10-20 tahun,” katanya, pada *Tempo*, Senin (20/6).

Azhar Syahida



INTEGRASI PENGELOLAAN MENYELAMATKAN PETERNAKAN

Hanya dalam waktu dua bulan, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menyebar di 259 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dengan total hewan ternak yang terjangkit mencapai 392.981 pada 18 Juli 2022. Pengetatan lalu lintas hewan ternak dan percepatan vaksinasi, dalam hal ini, menjadi kunci utama pengendalian wabah yang sebetulnya bisa dihindari itu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, pada 18 Juli 2022 mengumumkan bahwa upaya

pemerintah untuk melakukan vaksinasi sudah menyentuh 527.148 ekor. Angka ini diharapkan terus meningkat, seiring kebutuhan vaksinasi menjadi sangat mendesak untuk meningkatkan imunitas hewan ternak yang masih sehat. Daerah-daerah zona merah, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, tentu perlu diberikan prioritas vaksinasi terutama untuk menyelamatkan hewan ternak yang masih bisa diselamatkan.

Sebagaimana ditulis oleh *Kompas* pada 15 Juli 2022, salah satu faktor utama masuknya *Aphthovirus* yang menyebabkan PMK berasal dari domba

dan kambing ilegal dari Thailand. Domba dan kambing itu, lantas dikirim ke Jawa melalui jalur darat dengan bekal keterangan sehat palsu. Dalam konteks penanggulangan wabah, tentu, hal semacam ini perlu menjadi perhatian bersama.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Muhammad Munawaroh mengatakan, wabah PMK ini adalah kelalaian pemerintah yang tidak sigap mengawasi lalu lintas hewan ternak. Menurutnya, hal-hal strategis perlu dijalankan dengan solid oleh pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

“Siapkan alat deteksi awal, segera lakukan vaksinasi. Libatkan perguruan tinggi yang punya banyak tenaga ahli. Pemerintah juga harus menyiapkan *road map* untuk bebas dari wabah PMK. Ini tidak boleh jadi beban rakyat. Apalagi wabah terjadi karena kelalaian negara,” ucap Muhammad Munawaroh.

Lebih-lebih, di lapangan banyak ditemukan adanya carut marut kebijakan teknis selama penanganan wabah PMK. Dalam hal ini, pemerintah perlu solid dalam proses penanganan dan teknis di lapangan, agar para peternak tidak semakin merugi.

Di sisi lain, hasil penelusuran *Cara Pandang*, menemukan bahwa sebetulnya gelombang sampar PMK bisa dihindari jika pemerintah serius menyiapkan *road map* pengelolaan sapi terintegrasi berbasis spasial. Lebih-lebih, Indonesia memiliki segudang potensi untuk mengembangkan sistem peternakan berskala besar. Tentu, dengan tetap melibatkan peternak kecil sebagai pelaksana utama.

Dalam pada ini, wabah PMK yang per 18 Juli 2022 telah menjangkit 373.497 ekor sapi, 8.820 ekor kerbau, 2.557 ekor kambing, 1.233 ekor domba, dan 47 babi itu, perlu dijadikan sebagai momentum perbaikan pengelolaan ternak domestik. Lebih-lebih hingga saat ini, kebutuhan daging sapi dan kerbau dalam negeri tidak cukup dipenuhi dari peternak lokal. Padahal, potensi sangat tersedia.

Defisit Daging

Catatan Kementerian Pertanian (2022) menunjukkan bahwa estimasi kebutuhan daging sapi dan kerbau sepanjang 2022 akan mencapai 695,39 ribu ton. Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 436,7 ribu ton dipenuhi dari peternak lokal dalam negeri, sedang kekurangan sebesar 258,69 ribu ton



akan ditutup dari pasokan impor.

Padahal, di tengah merebaknya wabah PMK, importasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di dalam negeri berpotensi membawa virus PMK. Sebagaimana virus PMK pada 2022 ini yang kuat dugaan berasal dari ternak ilegal. Meski investigasi *Kompas* menyebutkan bahwa impor daging beku belum menunjukkan gejala positif PMK, namun semua perlu diwaspadai.

Secara lebih detail, tiga negara utama yang menjadi sumber impor daging sapi beku Indonesia berkode HS 020230 adalah India, Australia, dan Brazil. Pada 2021, total impor Indonesia dari ketiga negara tersebut mencapai 151,4 ribu ton dengan India mencapai 85 ribu ton, Australia 50,5 ribu ton, dan Brazil menyentuh 15,9 ribu ton (Trademap, 2022). Sebetulnya, jumlah sapi potong dalam negeri yang dikelola oleh peternak lokal, jumlah terus meningkat, tetapi kecepatan pertumbuhannya tidak sebanding dengan pesatnya kebutuhan konsumsi daging oleh masyarakat. Inilah

kemudian yang juga menyebabkan rata-rata impor daging sapi beku Indonesia selama 4 tahun (2017-2021) terakhir berada di level 13 persen. Sementara tren pertumbuhan rata-rata impor daging beku dari India dan Australia selama 2017-2021 mencapai 13 persen dan 4 persen.

Kami memperkirakan bahwa dengan produktivitas peternak yang menurun, dalam jangka panjang, pertumbuhan impor justru akan meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di beberapa provinsi utama di Jawa yang memang menjadi pusat konsumen daging sapi dan kerbau. Maka itu, jika tidak disiapkan cetak biru pengelolaan ternak yang lebih sistematis, hal ini berpotensi menggerus kesejahteraan petani yang hari ini masih berada di kasta terbawah dari piramida ekonomi.

Spesialisasi Kawasan

Seorang praktisi hewan ternak yang kami wawancarai pada 18 Juli 2022, menyebutkan bahwa misalnya, wilayah di Nusa Tenggara Barat



Pihak Kepolisian dan Dinas Kesehatan Daerah memeriksa Peternakan Sapi pada Kesiapan Idul Adha beberapa waktu lalu.

(NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan peternakan sapi berskala besar.

“Di sana lahannya masih luas, pakan hijau-hijauan juga sangat melimpah.” Terangnya, yang identitasnya tidak berkenan disebutkan. Lebih lanjut, menurutnya, NTB dan NTT memiliki jenis sapi endemik yang prospektif untuk dikembangkan.

Memang, kalau dilihat, lima besar daerah di Indonesia dengan jumlah sapi potong terbanyak NTB dan NTT masuk di dalamnya. Kedua wilayah itu memiliki jumlah ternak sapi potong mencapai 1,3 juta ekor dan 1,2 juta ekor. Meski begitu, jumlah itu masih jauh dari populasi sapi potong di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing mencapai 4,93 juta dan 1,86 juta ekor.

Pada konteks ini, memfokuskan suatu kawasan untuk memaksimalkan produksi sapi potong atau kerbau adalah solusi penting yang mesti digarap. Tentu, untuk memulai ini, pemerintah perlu memberikan dukungan infrastruktur dan modal,

sementara menjaga pasar hewan ternak domestik terus dipenuhi dari petani lokal.

Hal-hal penting yang perlu dilakukan, tentu berkaitan dengan ketersediaan lahan, pakan, vaksin, pasar, dan edukasi peternak. Dengan memfokuskan produksi daging segar di dengan melibatkan petani lokal, dalam jangka panjang, disparitas ekonomi antara blantik dan petani boleh jadi akan sangat mudah direduksi.

Sebab, estimasi yang dilakukan oleh Kementan (2022) menunjukkan bahwa para peternak di kantong-kantong utama produsen sapi di Indonesia hanya menikmati pendapatan berkisar 12-13 juta per tahun. Padahal, peternak bekerja sangat keras untuk mengelola peternakannya. Lebih-lebih di masa pandemi, biaya-biaya tambahan diperlukan, misalnya untuk vaksinasi.

Integrasi Kawasan

Maka kemudian, *road map* jangka panjang pengelolaan peternakan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas peternakan nasional, perlu disusun dalam kerangka

pemberdayaan peternak lokal. Peternak yang kini jumlahnya mencapai 14,8 juta rumah tangga, perlu dipastikan hak-haknya. Sebab, jika tidak, negara yang subur ini hanya akan menjadi importir daging.

Di sisi lain, manajemen terintegrasi antar-kawasan juga perlu dilakukan. Misalnya, daerah-daerah yang sudah difokuskan untuk pengembangan sapi dalam skala besar, perlu didukung dengan integrasi pasar antar-kawasan, sehingga produk lokal juga memiliki kepastian pasar.

Di sisi lain, sistem insentif juga bisa dikembangkan untuk memberikan motivasi bagi peternak lokal. Dalam jangka panjang, kami melihat bahwa kawasan-kawasan Indonesia Timur akan sangat diuntungkan jika pengembangan peternakan ini berhasil. Disparitas kawasan bisa dipangkas. Dengan kata lain, integrasi kawasan Indonesia Timur dan Barat dengan mudah akan dilakukan melalui jembatan pembangunan peternakan yang integratif.

Azhar Syahida



MENYOAL TRANSPARANSI LEMBAGA FILANTROPI

Pada saat masyarakat Indonesia harus berjibaku memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal, sebuah lembaga filantropi Islam justru diduga menyelewengkan dana umat. Sebuah kabar yang menciderai filosofi lembaga filantropi Islam pada umumnya.

Sebagai sebuah lembaga kedermawanan sosial berbasis nilai-nilai Islam, Aksi Cepat Tanggap (ACT) harusnya lebih mementingkan persoalan kemanusiaan dibanding pemenuhan kantong elit dan keluarganya. Honor para direktur yang mencapai ratusan juta dan puluhan juta per

bulan, adalah penkhianatan terhadap amanah umat, apalagi dana yang diselewengkan dari kumpulan modal kemanusiaan.

Kabar menyedihkan itu tidak hanya berdampak pada yayasan tersebut, tetapi juga menciptakan turbulensi kepercayaan kepada gerakan kemanusiaan Islam secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang kemudian berpandangan miring terhadap lembaga Islam dan mempertanyakan fasilitas apa pun yang dimiliki amil.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama, M. Fuad Nasar mengingatkan para pengelola dana umat di berbagai lembaga filantropi agar berhati-hati serta memiliki kepekaan nurani dan sifat amanah dari pengelolanya.

“Mengandalkan sikap kerja profesional saja belum memadai. Semakin besar dana umat yang dihimpun dan dikelola, haruslah menjadi lembaga yang mengelolanya lebih berhati-hati dan mawas diri.” Ujar Fuad saat dihubungi dari Jakarta, pada Rabu.

Sebelumnya, Kemensos mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran



M. Fuad Nasar
Sesditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama



peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pencabutan izin ini akan memutus mobilisasi pendanaan amal melalui ACT.

Tren Penguatan Filantropi

Praktik filantropi Islam berkeadilan sosial di Indonesia saat ini menunjukkan potensi perkembangannya yang tinggi menyusul penguatan semangat gerakan filantropi yang didasarkan pada basis ajaran Islam, kreativitas praktik, dukungan pemerintah, dan pemenuhan kriteria-kriteria filantropi berkeadilan sosial. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai praktik filantropi di tingkat individu, program, lembaga, maupun asosiasi di tanah air yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir.

Direktur *Social Trust Fund* (STF) Amelia Fauzia mengatakan,



Amelia Fauzia
Direktur Social Trust Fund (STF)

hasil riset yang dilaksanakan Divisi Riset STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir praktik filantropi Muslim di tanah air terus menunjukkan kecenderungan penguatan.

Kecenderungan ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya penambahan jumlah organisasi, baik berbasis masyarakat maupun pemerintah, jumlah sumbangan yang dikeluarkan baik dalam bentuk sedekah, zakat, maupun wakaf, dan adanya penyaluran bantuan ke masyarakat sasaran di luar Indonesia.

Sementara dari aspek organisasi filantropi, jumlah lembaga amal zakat yang teregistrasi resmi terus meningkat di atas 200-an lembaga. Begitu juga zakat dan wakaf, masing-masing mencatatkan kenaikan nilai dan objeknya hingga kisaran Rp 30 triliun dan 400-an

objek wakaf tanah.

Amelia yang juga menjadi Ketua Tim Riset menjelaskan bahwa realitas praktik filantropi seperti demikian menyediakan ruang bagi penumbuhan bentuk filantropi yang berkeadilan sosial. Menurutnya, filantropi berkeadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan yang lebih maju dibanding praktik kedermawanan karitas yang terbatas pada pemberian layanan bersifat jangka pendek ataupun filantropi yang bersifat pemberdayaan dan jangka panjang.

“Filantropi berkeadilan sosial yang menjadi tekanan dalam penelitian ini adalah praktik berderma yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar penyebab terjadinya ketidakadilan sosial termasuk kemiskinan,” tandas Amelia.

Amelia menambahkan, perkembangan filantropi berkeadilan sosial sendiri merupakan hal yang positif bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, terbebas dari akar kemiskinan, dan ketidakadilan sosial melalui pendekatan yang inklusif.

Sebab, berbeda dengan filantropi jenis karitas atas filantropi semata yang terfokus untuk merespons akibat atau dampak, filantropi berkeadilan sosial berusaha mengurai akar masalah dari kemiskinan sendiri.

“Filantropi berkeadilan sosial memiliki target menghilangkan akar masalah penyebab kemiskinan dan ketidakadilan sosial, memiliki program jangka panjang yang memberdayakan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang non-diskriminatif dan bersifat inklusif, serta menerapkan manajemen yang transparan dan akuntabel,” tandasnya.



Perlu Regulasi

Kendati menunjukkan kecenderungan penguatan, sambung Amelia, namun riset menemukan banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam mengakomodasi perkembangan praktik filantropi yang berkeadilan sosial, baik dari level regulasi dan kebijakan pemerintah hingga landasan formal keagamaan.

Dari sisi pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah yang kurang terintegrasi dan tersinergi dengan baik membuat dorongan terhadap filantropi yang berkeadilan sosial belum begitu optimal. Kedua, berkembangnya kesadaran sosial untuk membantu masyarakat secara lebih luas juga membutuhkan fikih filantropi konvensional yang lebih akomodatif, terutama pemaknaan konsep delapan *ashnaf* (penerima manfaat).

Karena itu, menurut Amelia, berdasar hasil penelitian seperti dipaparkan Divisi Riset STF UIN Jakarta menyodorkan sejumlah rekomendasi bagi penyempurnaan sekaligus penguatan arah filantropi Islam di Tanah Air.

Di antara rekomendasi itu adalah (1) perlunya perumusan regulasi pemerintah yang berpihak agar praktik-praktik filantropi Islam bisa bergerak ke arah filantropi berkeadilan sosial; (2) perlunya keterlibatan para pemegang otoritas keagamaan dalam merumuskan fikih dan tafsir yang kontekstual dan inklusif agar praktik filantropi Islam bisa betul-betul berkontribusi bagi perubahan masyarakat secara efektif yang menguatkan pilar-pilar kebangsaan dan kemanusiaan; (3) dan perlunya otoritas berwenang seperti kementerian/lembaga negara dan agensi internasional melakukan program pengarusutamaan ke lembaga-lembaga filantropi Islam untuk mengenalkan konsep-konsep filantropi berkeadilan sosial.

Pentingnya Akuntabilitas

Yang seharusnya menjadi substansi diskursus publik adalah meningkatkan akuntabilitas dari lembaga filantropi Islam. Setidaknya ada dua hal yang bisa menjadi pertimbangan oleh para pemangku kepentingan.

Pertama, meningkatkan sistem

akuntabilitas dengan pengawasan secara internal dan eksternal. Secara internal, pemangku kebijakan perlu mewajibkan setidaknya eksistensi komite audit internal dan komite pengawas syariah. Audit internal akan berfungsi untuk mengawasi dan melaporkan adanya indikasi penyimpangan secara berkala. Sedangkan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karakteristik khusus dari zakat dan wakaf bisa ditegakkan.

Perlu pula penegasan secara regulasi bahwa dana zakat dan wakaf hanya bisa dikelola oleh lembaga di bawah Kementerian Agama sehingga komite pengawas syariah dapat berkoordinasi dan bertanggung jawab atas kepatuhan syariah lembaganya.

Kedua, meningkatkan kesadaran spiritual amil. Meski amil berhak terhadap gaji atas kontribusinya, pengupahan ini jangan sampai hanya bersifat transaksional. Amil perlu menyadari amanahnya kepada umat dan Allah sehingga memiliki idealisme transendental untuk menjadi bagian yang mentransformasi umat. Jangan sampai nilai-nilai Islam dan kepedulian hanya menjadi pemanis lidah atau *gimmick*.

Peran lembaga filantropi Islam, sebagai perantara antara yang membutuhkan dan yang memiliki kelebihan harta, sangatlah relevan. Dengan keterbatasan yang ada, berbagai program telah berhasil mentransformasikan mereka yang berhak menerima zakat menjadi seseorang yang membayarkan zakat.

Kritik yang mengalir deras diharapkan tidak hanya menjadi evaluasi para aktivis Islam, tetapi juga energi baru untuk terus berjuang merealisasikan aspirasi Islam, yaitu *rahmatan lil alamin*.

Imroatus Shaliha



JAGA KREDIBILITAS LEMBAGA FILANTROPI

Kedermawanan masyarakat Indonesia tak bisa diragukan. Setiap terjadi bencana, misalnya, secara serentak aksi kerelawanan sosial termobilisasi dengan cepat. Mereka yang tidak bisa datang langsung ke lokasi bencana, menyelenggarakan aksi amal di berbagai tempat. Bahkan, mobilisasi pendanaan melalui media sosial juga disambut baik.

Jadi, secara jujur sikap dermawan bangsa ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi peradaban yang maju. Sayangnya, kebaikan sikap itu direspons oleh pihak tidak bertanggungjawab dengan memobilisasi pendanaan yang luar biasa besar, namun hanya untuk memperkaya pribadi-pribadi.

Kasus yang tampak nyata terjadi

pada salah satu lembaga filantropi Islam Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyelewengan dana amal oleh sejumlah pimpinan lembaga tersebut dibongkar pertama kali oleh *Tempo*, majalah nasional yang otoritatif dalam memberitakan kasus-kasus penyelewengan secara investigatif.

Sebenarnya dugaan penyelewengan tersebut sudah banyak beredar di telinga sejumlah orang, tapi karena tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka isu tersebut lewat begitu saja. Padahal, banyak bukti yang bisa dihadirkan, misalnya saja pembangunan 91 sekolah yang merupakan sumbangan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air.

Pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari kompensasi

Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018 silam. Nyatanya, pembangunan sekolah-sekolah tersebut tak jelas ujungnya karena mangkrak. Bahkan, keluarga korban banyak yang tidak mengetahui tentang dana kompensasi itu yang seharusnya dikomunikasikan oleh lembaga kemanusiaan ACT.

Kendati demikian, dugaan penyelewengan yang menyeret salah satu lembaga filantropi keagamaan berskala nasional itu juga merupakan tantangan baru bagi lembaga filantropi Islam lainnya. Mampukah para pengelola lembaga filantropi berbasis agama menunjukkan kredibilitasnya?

Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga-lembaga filantropi berbasis Islam di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dapat terlihat dari penyaluran donasi oleh lembaga-lembaga filantropi Islam tersebut ke berbagai tempat. Di sisilain, perkembangan Lembaga filantropi Islam tersebut juga disokong oleh meningkatnya semangat masyarakat untuk menyalurkan dana sosial.

Tentu, fenomena kesadaran masyarakat tersebut didasari oleh semangat berbagai kelompok masyarakat untuk membantu warga yang terdampak bencana atau kepingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat negara, dalam hal ini, dianggap tidak begitu signifikan peran-peran sosialnya.

Maraknya lembaga filantropi Islam tersebut jelas membawa sinyal positif terutama di negara yang berpenduduk sekitar 250 juta jiwa. Mantan Ketua Badan Pengurus Lazizmu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, dalam wawancaranya dengan IBTimes mengatakan, “Maraknya lembaga filantropi Islam adalah hal yang sangat positif, terutama untuk negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia. Ada kesadaran baru tentang konsep *mutual help* (saling tolong), atau dalam bahasa Alquran disebut *ta’awun*. Artinya, solidaritas sosial kaum Muslim dipupuk secara sistematis oleh lembaga-lembaga filantropi yang ada.”

Dengan demikian, dana-dana umat yang sudah terkumpul dapat disalurkan dan diproyeksikan untuk agenda-agenda pengembangan masyarakat, sehingga kelompok masyarakat miskin dapat terentaskan dengan bantuan lembaga filantropi Islam baik yang berupa penyaluran langsung maupun melalui program-program pendampingan. Semangat inilah yang harus tetap teguh dijalankan oleh lembaga filantropi Islam di Indonesia.

Akuntabilitas Lembaga Filantropi

Semakin marak lembaga filantropi Islam, tentu persaingan untuk mendapatkan hati masyarakat agar mau berdonasi juga semakin ketat. Berbagai macam lembaga



Salah satu perhatian ACT dalam bentuk filantropi adalah memberikan bantuan pangan kepada warga Palestina yang terdampak perang.

filantropi berlomba-lomba menjual isu untuk menarik donatur, seperti isu kemiskinan dan kemanusiaan baik di dalam negeri maupun lingkup internasional.

Tentu saja, tidak ada yang salah dengan upaya tersebut, karena misi dari isu-isu tersebut tidak lain adalah untuk membangun kesadaran orang-orang yang memiliki harta berlebih demi berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

Selain menjual isu kemiskinan dan kemanusiaan, ternyata beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia semakin kreatif dalam promosi-promosinya. Mereka membuat agenda-agenda strategis untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Inilah wajah filantropi Islam yang semakin berkemajuan.

Agar lembaga filantropi Islam semakin tumbuh positif, jelas tidak cukup apabila hanya mengandalkan program-program yang strategis. Akuntabilitas menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi yang

menjadi jembatan penyaluran dana. Akuntabilitas program dan akuntabilitas finansial merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap lembaga filantropi Islam. Sebab, semakin tinggi akuntabilitas, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi.

Dugaan Penyelewengan

Seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua lembaga filantropi Islam berjalan sesuai dengan misi untuk kemaslahatan umat. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga filantropi Islam ACT menjadi perbincangan hangat. Tentu, ini menjadi sinyal negatif bagi lembaga filantropi Islam yang selama ini banyak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas.

Kasus ini bermula dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah menemukan adanya indikasi dalam aliran dana ACT untuk kepentingan pribadi dan aktivitas yang melanggar hukum seperti penyaluran dana kepada teroris.



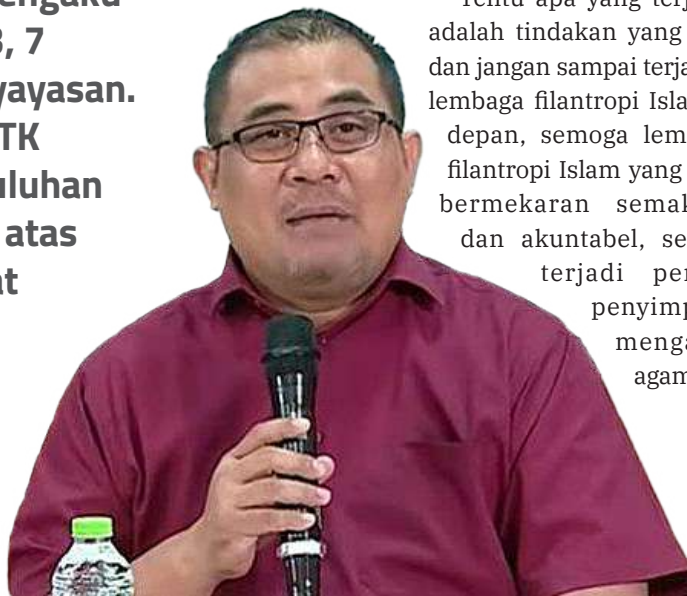
Pendiri sekaligus mantan presiden ACT, Ahyudin diduga menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi mulai dari gaji dan pembelian perabotan mewah. Saat masih menjabat Ketua Dewan Pembina ACT, ia disebut menerima Rp 250 juta per bulan. Sementara, pejabat di bawahnya seperti *senior vice president*, memperoleh sekitar 150 juta per bulan. Sedangkan, *vice president* mendapat Rp 80 juta per bulan. Adapun direktur eksekutif mengantongi sekitar Rp 50 juta dan

direktur sekitar Rp 30 juta per bulan.

Tak hanya bergaji besar, petinggi ACT juga mendapat fasilitas mobil. Ahyudin, misalnya, mendapat tiga mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Pejabat di bawahnya hingga tingkat *vice president* pun mendapat kendaraan Pajero Sport. Adapun direktur eksekutif dan direktur masing-masing mendapat Toyota Innova dan Avanza. Sementara, di sisi lain, PPATK menengarai ada dana donasi yang mengalir kepada

Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku menggunakan rata-rata 13, 7 persen untuk operasional yayasan. Sementara, dari pihak PPATK juga telah membekukan puluhan rekening ACT. Kini, dugaan atas penyalahgunaan dana umat oleh ACT naik ke tingkat penyidikan.

Ibnu Hajar, Presiden ACT



**Aldi Bintang/
Naff**

kelompok teroris di Suriah.

Atas dugaan penyelewengan hasil donasi lembaga filantropi ACT tersebut, kini Menteri Sosial telah mencabut izin yayasan dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, potongan maksimal untuk pembiayaan donasi sosial maksimal 10 persen. Dalam konferensi pers, Senin, 04/07/22) Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku menggunakan rata-rata 13, 7 persen untuk operasional yayasan. Sementara, dari pihak PPATK juga telah membekukan puluhan rekening ACT. Kini, dugaan atas penyalahgunaan dana umat oleh ACT naik ke tingkat penyidikan.

Dari kasus ACT di atas, kini marwah lembaga filantropi Islam dipertaruhkan. Pasalnya kegiatan filantropi yang hakikatnya merupakan bagian dari ibadah dan memiliki fungsi strategis justru disalahgunakan.

Seharusnya, apabila melekat nama Islam dalam aksi-aksinya, seluruh penyelenggara kegiatan perlu memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam. Bukan malah sebaliknya, melakukan malapraktik mengatasnamakan Islam untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Tentu apa yang terjadi pada ACT adalah tindakan yang menyimpang, dan jangan sampai terjadi di lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya. Ke depan, semoga lembaga-lembaga filantropi Islam yang saat ini masih bermekaran semakin kredibel dan akuntabel, sehingga, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan agama.



RAPIMNAS JMSI 2022

AKSELERASI PROGRAM DAN PENGUATAN ORGANISASI

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 1-3 Agustus 2022, di Jakarta. Rapimnas yang bertema “Penguatan Pondasi Organisasi dan Akselerasi Program Kerja” ini dihadiri unsur pimpinan JMSI di seluruh Indonesia

dan dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya yang mewakili Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.

Rapimnas JMSI dipimpin Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dan Sekjen JMSI Eko Pamuji, dengan ikut dihadiri para pimpinan JMSI Pusat lainnya. Teguh Santosa dalam sambutannya

menggambarkan peranan teknologi siber di Indonesia baru sebatas menjadi medium untuk menyampaikan pesan dan informasi.

“Kita berharap dalam acar ini juga dapat merumuskan hal strategis untuk penyelenggaraan organisasi JMSI ke depannya,” katanya.

Di belahan timur Asia, seperti China, Korea, Jepang telah membuat teknologi untuk menggeser atau paling tidak menyamai teknologi yang eksisting di Amerika dan di barat. Kedepan, konsep teknologi siber harus benar-benar membawa bangsa ini ke alam demokrasi yang substansial.

Pengukuhan Pengurus JMSI DKI Jakarta dihadiri puluhan pegiat media siber. Hadir pula sejumlah wartawan senior seperti Muhlis Hasyim Yahya, Darmawan Supriyosa, dan Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah.

Media Siber Ikut Jaga Demokrasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses masyarakat pada informasi di ruang digital semakin cepat dan luas. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perusahaan pers khususnya media siber. Demi menjaga demokrasi yang bercirikan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, pengelola ruang redaksi perlu menarik garis yang tegas antara informasi bohong dan informasi faktual.

Demikian antara lain pesan yang disampaikan Menteri Negara BUMN Erick Thohir di hadapan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Ruang Banda, Hotel Borobudur, Senin (1/8/2022).

“Saya percaya bahwa kita senantiasa memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan kualitas media siber di Indonesia, terutama mengingat semakin majunya perkembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia yang membuat akses untuk masyarakat terhadap media siber menjadi semakin mudah dan luas,” ujar Erick Thohir yang tidak dapat hadir langsung dan menitipkan pesannya lewat video yang ditayangkan di lokasi Rapimnas.



Erick Thohir merupakan satu dari 18 pimpinan kelompok media massa yang menandatangani Piagam Palembang dalam Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Palembang, Sumatera Selatan.

Piagam Palembang merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan masyarakat pers nasional dan berisi antara lain komitmen pemilik media untuk membangun perusahaan pers yang profesional yang melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan.

Dalam sambutan di hadapan peserta Rapimnas JMSI, Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN yang dipimpinnya selalu berkomitmen untuk mendukung prinsip kebebasan pers maupun kebebasan berpendapat di media siber. “Saya percaya dan mengakui kedua prinsip tersebut merupakan satu tarikan nafas dengan semangat demokrasi,” ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Namun di sisi lain, dia menambahkan, tidak dapat dipungkiri selalu ada pihak yang berupaya memanfaatkan kebebasan dalam demokrasi untuk kepentingan diri sendiri. “(Mereka) menggerogoti demokrasi melalui informasi yang sangat kejam, hoax, fitnah, dan provokasi,” tegasnya.

Karena itulah, Erick Thohir mengingatkan, agar masyarakat pers nasional, terutama pengelola media siber, ikut menjaga demokrasi dengan menghadirkan informasi yang memenuhi prinsip *check and balances*.

“Saya yakin seluruh insan pers yang ada hari ini mampu memberikan informasi yang akurat, adil, berimbang, serta membuat garis batas yang tegas antara opini yang tidak benar yang berdasarkan hoax dan fakta yang benar,” katanya lagi.

Dengan ketegasan dalam menarik “garis batas” itu, Erick Thohir yakin masyarakat Indonesia akan mendapatkan berita yang benar, edukasi yang benar, dan mampu mencerna informasi dengan baik. Tradisi ini harus diperjuangkan untuk



kepentingan yang lebih luas, termasuk untuk menjaga pertumbuhan industri media siber sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak para anggota JMSI untuk menjelajahi kota Jakarta. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat menyampaikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus JMSI DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/8).

Ajakan Anies itu dikhususkan kepada kalangan JMSI yang berasal dari daerah-daerah seluruh Indonesia yang telah menghadiri Rapimnas JMSI di Hotel Borobudur Jakarta dan hadir dalam pelantikan JMSI DKI Jakarta.

“Kami mengajak yang hadir di

Jakarta untuk menikmati kota Jakarta. Silakan juga merekam pendapat masyarakat tentang Jakarta,” kata Anies.

Menurutnya, biasanya suara-suara masyarakat yang berada di belakang lebih jujur dan terbuka. Silakan berinteraksi dan berdialog dengan warga kita. Para pengurus JMSI yang hadir di Balai Kota Jakarta sebagian adalah mereka yang datang daerah-daerah di seluruh Indonesia. Karenanya Anies mengajak untuk menjelajahi Kota Jakarta.

Anies juga menjelaskan tentang model pendekatan membangun Jakarta. Yaitu berorientasi kesetaraan, keadilan tanpa memandang kelas-

kelas ekonomi masyarakat. Ruang ketiga yang banyak dibangun menjadi pertemuan publik dengan kesetaraan. Trotoar dibangun di Sudirman agar kawasan Sudirman tak hanya yang berkantor di kawasan ini.

“Transportasi publik menghadirkan kesetaraan. Mereka yang memakai mobil pribadi, ketika berganti naik transportasi publik tidak kelihatan lagi kelas-kelas ekonominya,” kata Anies.

Ketua JMSI DKI Jakarta Fahd Pandepie menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur Anies Baswedan yang hadir dan memberikan sambutannya.

Penandatanganan MoU Kepemiluan JMSI dan KPU

Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kepemiluan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Dalam sambutannya Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan penandatanganan MoU ini sebagai bentuk kekerabatan antara KPU dengan JMSI. “Peran teman-teman media pers, jurnalis menjadi tumpuan juga. Dalam rangka sukses Pemilu kita 2024 dan Pilkada 2024,” ucapnya Senin, 1/8/2022. Di hotel Borobudur, Jakarta.

Ketua KPU menerangkan yang menjadi cacatan penting yang mesti di gelorakan bersama. Adalah dimana Indonesia peringkat ke tiga negara dunia yang menganut demokrasi elektoral terbesar di lihat dari populasi jumlah pemilihnya.

Secara kultural perkembangan demokrasi di Indonesia tumbuh dengan baik. Sehingga negara-negara dunia menengokkan kepalanya kesini.



Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, negara-negara lain yang disebutkan tadi mendapatkan penilaian yang kurang bagus lantaran memraktekkan yang kurang demokratis.

“Untuk itu kita patut berbangga, patut berbesar hati, dan menjadi tugas kita bersama-sama menjaga track record penguatan demokrasi di Indonesia,”

Sementara itu, Ketua Umum JMIS, Teguh Santosa menyatakan dan berharap perusahaan-perusahaan

pers yang terhimpun di Jaringan Media Siber Indonesia. Dapat menjunjung kode etik jurnalistik, dan mampu membuktikan karya-karya jurnalistik yang baik.

“Saya ingin setelah penandatanganan MoU ini tidak hanya meriah saja, tapi berharap dapat memberikan manfaat yang konkret. Agar ini bisa turun ke dalam praktik yang lebih teknis. momen saat ini memang yang tepat,” tegasnya.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pers

Agung Darmajaya mengingatkan agar ruang redaksi yang dikelola oleh perusahaan pers anggota JMSI khususnya ekstra hati-hati dalam menurunkan laporan-laporan terkait peristiwa ke pemilu. Penting bagi ruang redaksi untuk memahami hal-hal mendasar dari proses pemilu.

“Tidak sedikit kasus yang memperlihatkan ruang redaksi kurang memahami apa itu DPT (Daftar Pemilih Tetap), misalnya. Sehingga tidak sedikit sengketa pemilu didasarkan pada berita yang mengandung kekeliruan tersebut,” ujar Agung Darmajaya.

“Jangan sampai pada situasi menjelang Pemilu. Pilkada dan Pilpres, tumbuh banyak media, malah menjadi gaduh. Ini menjadi penting, suasana pemilu yang sudah di depan mata, mari kita dorong media yang benar dan baik, benar dalam pemberitaan, baik menyampaikan pemberitanya,” tambahnya.

Seperti Ketua KPU dan Ketua Umum JMSI, Agung juga menyarankan, agar lebih operasional Nota Kesepahaman tersebut dapat diturunkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua lembaga.





MENGUJI KETAHANAN STARTUP

Perusahaan rintisan teknologi, startup saat ini sedang mengalami krisis valuasi. Strategi-strategi yang tidak kalkulatif diduga menjadi penyebab utama kejatuhan berbagai perusahaan bisnis rintisan tersebut. Kendati demikian, benarkah bisnis berbasis digital itu berada di ambang kehancuran?

Perusahaan *startup* di Indonesia menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Hal

ini terjadi akibat dari perlambatan pertumbuhan perusahaan *startup* yang ditandai dengan munculnya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Padaahal, perusahaan teknologi digital ini, selama pandemi berlangsung begitu bergairah meraup keuntungan. Hal ini diakibatkan perilaku konsumen yang mengubah pola konsumsi dari berbelanja ke pasar, gerai, dan mal, lalu berpindah ke *marketplace* dalam jaringan.

Sebelumnya, banyak yang memprediksi bahwa *start up* akan menjadi “tulang punggung” perekonomian nasional di masa depan. Nyatanya pasca pandemi,

ketahanannya diuji karena harus tetap bisa mengambil hati konsumen jika tidak ingin industri ini hanya besar di awal, tetapi tidak bisa berlangsung lama.

Pandemi telah menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak diprediksi oleh masyarakat. Kondisi seperti itu mengakibatkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing*. Akibatnya, masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah seperti bekerja dan berbelanja, sehingga hal itu berpengaruh terhadap melambatnya laju pertumbuhan ekonomi akibat banyak perusahaan yang gulung tikar.

Tentu saja, fakta bahwa perusahaan bisnis berbasis digital yang justru semakin tumbuh optimal dan mendapat suntikan dana besar di tengah merebaknya pandemi Covid-19 dan berbagai macam sektor ekonomi mengalami defisit. Di sinilah perusahaan-perusahaan *startup* tumbuh dahsyat (*booming sectors*).

Namun begitu, setelah pandemi Covid-19 mereda dan berubah status menjadi endemi, ada gelombang besar perubahan pola konsumsi masyarakat dari *online* kembali menuju *offline*. Inilah kemudian yang mengakibatkan pertumbuhan bisnis *startup* mengalami stagnasi. Dalam ekonomi, istilah ini dikenal sebagai gelembung ekonomi pecah atau *bubble burst*, yaitu saat kenaikan ekonomi melaju cepat, tetapi cepat juga mengalami penurunan.

Seharusnya prediksi akan terjadinya gelembung ekonomi itu bisa diantisipasi pelaku industri *startup*, sehingga telah memiliki strategi-strategi yang bisa direalisasikan jika pandemi usai. Nyatanya, gelembung itu mulai terasa pecahnya sekarang karena mal sudah kembali ramai, café dan pasar sesak kembali, sementara transaksi online terus mengalami pelemahan.

Faktor Kegagalan

Terjadinya PHK karyawan perusahaan *startup* ternyata tidak hanya di dalam negeri. Perusahaan *startup* internasional juga melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya. Melansir dari *Tech Crunch*, situs web berita yang berfokus pada perusahaan-perusahaan teknologi informasi, mulai dari perusahaan rintisan (*startup*) sampai perusahaan besar melaporkan terjadinya PHK akibat dari beberapa faktor seperti perang, inflasi yang tinggi, tekanan ekonomi, dan selera



PayPal, salah satu perusahaan rintisan Bank Digital Perantara Pembayaran yang berbasis di California, AS memutus 83 karyawannya karena mengalami krisis valuasi

konsumen yang bergeser.

Perusahaan-perusahaan *startup* internasional yang melakukan pemangkasan jumlah karyawan di antaranya, Vtex, PayPal, Bolt, FrontRow dan sebagainya. Vtex diketahui telah melakukan PHK sejumlah 193 karyawan, PayPal 83 karyawan, Bolt 240 karyawan, dan FrontRow 145 karyawan. Sebagian besar PHK dilakukan untuk efisiensi perusahaan.

Sementara itu, di Indonesia, kegagalan *startup* disinyalir akibat strategi bisnis yang kurang relevan. Banyak *startup* yang kurang dalam perencanaan bisnis, akibatnya mereka berjalan tanpa arah yang pasti. Kegagalan lain juga dapat terjadi manakala perusahaan tidak tepat dalam menentukan kalkulasi harga pasar dengan baik. Perusahaan akan merugi karena banyak biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan rata-rata *income* yang diperoleh.

Kegagalan lain juga dapat muncul akibat kebiasaan perusahaan dalam membakar uang (*burning money*),

yaitu dengan memberikan diskon besar-besaran, *cashback*, gratis ongkir dan sebagainya kepada konsumen. Padahal, pada dasarnya bakar uang adalah strategi yang baik terutama untuk meningkatkan jumlah pengguna (*customer retention rate*).

Sebab, dengan memiliki data pengguna yang lebih besar, perusahaan dapat dengan leluasa meningkatkan layanannya berdasarkan preferensi konsumen. Namun demikian, apabila perusahaan *startup* terus membakar uang tanpa analisis yang terukur, strategi demikian justru akan menghasilkan konsumen yang oportunistik. Konsumen hanya akan membeli manakala perusahaan memberikan fasilitas diskon atau gratis ongkir, misalnya. Apabila fasilitas tersebut tidak didapatkan, konsumen beralih ke gerai lain.

Menurut pakar marketing dan Managing Partner Inventure, Yuswohady mengatakan, Kualitas konsumen yang buruk inilah yang tak “tertangkap” di dalam angka valuasi

startup. Karena valuasi hanya melihat jumlah konsumen yang diakuisisi (*quantity*), bukan kualitasnya (*quality*).

“Jadi, saat akuisisi konsumen berlangsung masif dan tumbuh eksponensial, maka valuasi *startup* membesar layaknya balon yang menggelembung. Namun, begitu aksi “bakar duit” tak berlanjut, konsumen akan hengkang dan balon pun meletus,” kata Yuswohady.

Selain itu, kegagalan bisnis *startup* juga datang dari persaingan yang ketat. Banyak *startup* yang memiliki model bisnis mirip meskipun dikemas dengan konsep yang berbeda. Akibatnya, banyak konsumen yang bingung memilih produk perusahaan *startup*.

Apabila kalah menarik dengan *startup* yang lain, maka dengan sendirinya mereka akan ditinggalkan oleh konsumen. Meskipun akan memberikan promosi besar-besaran, hal ini tidak akan bertahan lama. Karena perusahaan tidak mengutamakan nilai dari produk yang dibuat.

Survive di Tengah Krisis

Untuk dapat bertahan dan *survive*, tentu perusahaan *startup* harus melakukan restorasi model bisnisnya. Permasalahan akut dalam perusahaan harus diidentifikasi semaksimal mungkin baik dari aspek internal maupun eksternal. Selain itu, strategi jitu untuk kembali bangkit juga perlu dirumuskan agar perusahaan tidak gulung tikar.

Perubahan perilaku konsumen tidaklah permanen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi



sosial dan lingkungan. Seperti ketika pandemi, konsumen berbondong-bondong melakukan belanja *online*. Namun, setelah tidak adanya lagi pembatasan sosial (*social distancing*), mereka beralih lagi belanja ke toko-toko dan gerai secara langsung. Inilah perubahan yang senantiasa harus direspons oleh setiap perusahaan.

Di era disrupsi ini, strategi jitu yang dapat dilakukan oleh perusahaan di antaranya melakukan inovasi produk. Menurunnya penjualan produk bisa jadi akibat tidak adanya inovasi yang mengakibatkan produk kurang diminati oleh konsumen. Maka dari

itu, melakukan inovasi produk adalah kunci utama perusahaan *startup*.

Selain inovasi produk, faktor penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah mengelola aliran dana (*cashflow*). Meskipun memiliki segudang ide, tetapi ketika kehabisan dana, maka perusahaan akan macet. Inilah pentingnya perencanaan untuk menghemat uang sejak awal.

Perusahaan harus bisa memastikan ada dana yang dapat disisihkan untuk bertahan tatkala terjadi guncangan. Dengan begitu, perusahaan *startup* yang dikelola tetap bisa bertahan hidup. **Aldi Bintang/Naff**

Jadi, saat akuisisi konsumen berlangsung masif dan tumbuh eksponensial, maka valuasi startup membesar layaknya balon yang menggelembung. Namun, begitu aksi “bakar duit” tak berlanjut, konsumen akan hengkang dan balon pun meletus.

Yuswohady
Pakar marketing dan Managing
Partner Inventure



BADAI BARU PEMULIHAN EKONOMI

Bagai badai besar yang menghantam sehari-hari, kabar inflasi menghantui laju pemulihan ekonomi yang tengah dinikmati oleh berbagai negara. Global dan domestik, sama-sama menghadapi badai baru yang tak kalah mengerikan daripada pandemi itu. Tapi, sejauh mana dampaknya bisa dimitigasi, adalah pertanyaan besar yang perlu dicari solusinya.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, pada sebuah persamuhan jelang pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral (*finance ministry and central bank governor*) negara-negara anggota G20

di Nusa Dua Bali, pada Kamis (14/7) mengatakan, faktor utama gurita inflasi di AS disebabkan oleh naiknya harga komoditas energi.

“Itu adalah imbas dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari

2022,” kata Janet Yellen.

Kendati demikian, meski inflasi AS disebut-sebut menjadi yang tertinggi sejak 1981, Yellen berpendapat bahwa inflasi AS saat ini tengah mencapai puncaknya (Kompas, 15 Juli 2022). Dan, kebijakan AS kini diarahkan untuk menghalau badai inflasi tersebut.

Biro Statistik AS mencatat, inflasi tahunan AS mencapai 9,1 persen pada Juni 2022. Dalam hal ini, apa yang disebut Yellen sebagai kebijakan pengendalian inflasi adalah potensi naiknya agresivitas *The Fed*, bank sentral AS, untuk menaikkan tingkat suku bunga.

Catatan statistik menunjukkan bahwa *The Fed* sudah menaikkan tingkat suku bunga hingga mencapai 150 basis poin ke level 1,50-1,75. Kebijakan itu adalah salah satu kebijakan yang paling agresif sepanjang sejarah catatan bank sentral AS.

Upaya AS mengerem laju inflasi dengan menaikkan suku bunga adalah strategi yang umum dilakukan oleh bank sentral di berbagai belahan dunia. Sebab, dengan menaikkan suku bunga acuan, bank sentral berusaha mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan kata lain, bank sentral bermaksud mengurangi jumlah perputaran uang di masyarakat.

Di sisi lain, badai inflasi tidak hanya terjadi di negeri Paman Sam, tetapi juga dialami oleh negara-negara besar lainnya. Misalnya, di Jerman, tingkat inflasi tahunan pada Juni mencapai 7,6 persen, tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Pun juga, hal yang sama dialami oleh Britania Raya, yang pada Mei mencatatkan inflasi 9,1 persen, juga tertinggi sepanjang lebih dari tiga dekade terakhir. Bahkan, inflasi yang terjadi di Britania Raya melonjak sangat signifikan dari Juli 2021 yang hanya mencapai 2 persen.

Dalam catatan Bank Dunia (2022), komoditas energi memang meningkat luar biasa. Sebetulnya, kenaikan komoditas energi itu tidak

hanya terjadi akibat invasi Rusia ke Ukraina, tetapi sudah mulai terlihat sejak restriksi mobilitas masyarakat dibuka seiring dengan melandainya kurva pandemi Covid-19. Misalnya, sejak rata-rata harga minyak mentah menyentuh harga terendah pada April 2020, mencapai USD21,04 per barel, 12 bulan kemudian, rata-rata harga minyak mentah global sudah bertengger di angka USD62,95 per barel. Kemudian, meningkat lagi di level USD83 per barel pada Januari 2022. Analisis kami, pergerakan itu disebabkan oleh kembali pulihnya industri penerbangan, konsumsi kendaraan pribadi, dan konsumsi mesin industri.

Pada kaitan itu, laju inflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), yang mana terjadi seiring dengan memanasnya aktivitas ekonomi yang tidak diimbangi dengan produktivitas perekonomian akibat beberapa pembatasan yang masih berlaku di masyarakat.

Namun demikian, invasi Rusia ke

Ukraina memang memicu lompatan kenaikan harga energi global, terutama minyak mentah dan gas alam yang punya hubungan langsung dengan Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina lebih dari 100 hari lalu, AS dan sekutu NATO ramai-ramai memberikan sanksi ekonomi (*economic sanction*) kepada Rusia. Inilah kemudian yang menyebabkan harga minyak mentah terus terkerek di level 116 USD pada Juni 2022.

Dalam kaitan ini, inflasi global yang terus menghantui belakangan ini adalah akibat dinamika rantai pasok yang disebabkan oleh naiknya tensi geopolitik. Dalam teori ekonomi, jenis inflasi seperti ini disebut sebagai inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (*cost push inflation/supply shock inflation*).

Menurut Hendranata (2022), karakter inflasi seperti ini disebabkan oleh kelangkaan barang sehingga menyebabkan naiknya harga produksi atau kelangkaan distribusi akibat masalah pada rantai pasok.

Beberapa pekan terakhir, kami mencatat bahwa konsumen ibu-ibu rumah tangga banyak yang mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan dapur keluarga. Misalnya, harga bawang merah dan cabai merah. Keduanya tercatat beradap di level Rp 60.750 dan Rp 97.000 per kilo pada 30 Juni 2022.

Sementara itu, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 4,35 persen pada Juni 2022, sedang inflasi tahun berjalan mencapai 3,19 persen pada Juni 2022. Inflasi ini melonjak dua kali lipat jika dibandingkan pada masa pandemi yang hanya menyentuh 1,96 persen.

Faktor dominan terjadinya badai krisis ekonomi dunia disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai.



Transmisi Domestik

Inflasi akibat kendala rantai pasok global akibat tensi geopolitik yang memanas, lantas bertransmisi ke dalam perekonomian Indonesia. Misalnya, agresivitas *The Fed* menaikkan suku bunga acuan hingga di level 1,5 – 1,75 menyebabkan aliran dana investasi di pasar keuangan negara-negara berkembang lari ke pasar AS. Dalam ekonomi, pelarian dana-dana asing itu disebut sebagai *capital out flow*.

Investor memandang pasar Amerika lebih menggiurkan. Keluarnya dana asing dari pasar domestik Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah terus tergerus, lunglai. Mengutip Bloomberg, pada 17 Juli 2022, nilai tukar rupiah megap-megap di angka 14,996, hampir mendekati Rp 15.000.

Depresiasi rupiah itu, dalam banyak kasus, melambungkan harga bahan baku industri, yang lebih dari 70 persennya dipenuhi dari pasar internasional. Tentu, kenaikan biaya bahan baku industri domestik yang terjadi terus-menerus berpotensi mengganggu produktivitas produsen. Pada saat yang sama, jika produsen



tidak menaikkan harga, mereka merugi, tapi jika menaikkan harga, konsumen akan lari. Kondisi seperti itu begitu menjebak produsen.

Menurut ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S Lukman, pada Selasa 5 Juli 2022 menyebutkan bahwa pelaku industri berupaya menyalakan kenaikan bahan baku itu dengan memangkas selisih keuntungan. Hal itu lebih dipilih oleh para pelaku usaha mengingat jika harga dinaikkan, kata Adhi, “daya beli masyarakat semakin lemah dan permintaan lesu” (Kompas, 6 Juli 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Dia mengatakan, meski masyarakat sudah mulai menikmati kenaikan pendapatan nominal, tetapi secara riil pendapatan mereka tergerus oleh inflasi yang semakin tinggi.

“Dalam konteks ini, inflasi yang menghantam kelompok masyarakat miskin, berpotensi

mengancam daya beli,” jelas Mohammad Faisal.

Bayang-Bayang Stagflasi

Maka kemudian, tidak salah jika kondisi yang hari ini terjadi banyak dikaitkan dengan potensi stagflasi, atau inflasi yang tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami resesi. Maka itu, langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah untuk menghindarinya. Dalam sejarah, stagflasi terjadi karena kesalahan dalam memilih kebijakan ekonomi ketika badai krisis terjadi.

Dalam pada ini, jika merujuk data yang ada, bahwa inflasi domestik yang tengah kita alami ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok, maka Bank Indonesia perlu hati-hati ketika ingin menaikkan suku bunga acuan yang hari ini sudah mencapai 2,75 persen.

Tentu, langkah BI mempertahankan suku bunga acuan pada 22-23 Juni lalu adalah kebijakan antisipatif yang tepat. Sebab, jika suku bunga acuan terlalu tinggi di tengah inflasi akibat gangguan sisi penawaran, justru berpotensi mengundang badai baru yang menghambat pemulihan ekonomi.

Azhar Syahida

Dalam konteks ini, inflasi yang menghantam kelompok masyarakat miskin, berpotensi mengancam daya beli.

Mohammad Faisal
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia



DIDIMAX DAN INVESTASI YANG MENGGEMBIRAKAN

Tak bisa dimungkiri, investasi adalah salah satu instrumen penting dalam perekonomian. Catatan statistik menunjukkan bahwa lebih dari 30% perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor investasi. Tentu saja, di tengah upaya berbagai pihak mendorong pemulihan ekonomi, kesadaran untuk kembali melakukan investasi perlu ditumbuhkan agar perputaran ekonomi kembali bergeliat. Dalam pada ini, kita memerlukan wadah untuk mengedukasi masyarakat, bagaimana melakukan investasi yang profesional dan berdampak positif bagi perekonomian.

Bagi masyarakat awam, edukasi dan pendampingan investasi adalah kebutuhan mendasar yang perlu disiapkan. Lebih-lebih, bagi kelompok masyarakat yang memiliki dana tabungan (*saving*) dalam jumlah besar, dan perlu diputar untuk menghidupkan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pantauan tim Cara Pandang, kami menemukan bahwa salah satu perusahaan broker investasi di pasar keuangan yang profesional dan berkualitas adalah DIDIMAX. Lembaga ini telah secara resmi mendapat pengawasan langsung dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan menjadi anggota *Cyber Future Forex* (CFX). Pun juga, DIDIMAX adalah anggota PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan *Jakarta Future Exchange* (JFX), sehingga proses investasi para nasabah DIDIMAX bisa dijamin keamanannya.

Pada wawancara Tim Cara Pandang dengan Miss Cenli Yani, *trading analyst* DIDIMAX, pada Kamis 17 Februari 2022, kami mendapati bahwa memang DIDIMAX adalah jembatan antara investor yang ingin berbisnis

trading forex. Tidak hanya sebagai perantara saja, tetapi juga, kata Miss Cenli (17/2), “DIDIMAX menyediakan edukasi bimbingan *trading forex* secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun.” Sudah barang tentu, fasilitas edukasi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat yang ingin belajar berinvestasi agar tidak keliru, lebih-lebih tertipu karena iming-iming keuntungan besar tanpa memahami bagaimana prosesnya.

Secara filosofis, aktivitas investasi mengenal dua unsur penting, yakni untung dan rugi. Maka kemudian, tidak ada investasi yang selalu untung, begitu pula investasi yang selalu rugi. Yang terpenting adalah, bagaimana

membangun *mindset* bahwa investasi dilakukan secara benar, teliti, dan terukur.

Beberapa jenis edukasi yang bisa investor dapatkan jika menjadi nasabah DIDIMAX tidak hanya terkait bagaimana memilih transaksi yang benar, melainkan juga bagaimana mengelola dana investasi dengan benar dan terukur, dan mengontrol psikologi nasabah. Termasuk, mempelajari kapan waktu yang tepat untuk bertransaksi. Poin pelajaran yang terakhir yang berkaitan dengan *timing* transaksi, dilakukan oleh

DIDIMAX untuk memberikan edukasi yang sangat baik tentang bagaimana membangun perspektif analisa pasar, sehingga segala keputusan investasi dilakukan atas dasar perhitungan yang jelas dan tidak asal-asalan.

Tidak hanya secara teoritis semata, proses edukasi yang dilakukan DIDIMAX juga memfokuskan pada keaktifan nasabah untuk *learning by doing*. Praktik langsung ini, ditujukan untuk mempertajam *sense* dan analisa para nasabah, sehingga semakin membuat para



nasabah mahir untuk membaca celah transaksi yang menguntungkan.

Apa yang dilakukan oleh DIDIMAX itu adalah upaya serius untuk menunjukkan bahwa investasi *trading forex* tidak selamanya buruk. Sebab, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa *trading forex* adalah investasi yang bernuansa negatif. Utamanya, menurut Miss Cenli, anggapan negatif itu disebabkan oleh banyaknya penipuan yang terjadi dalam investasi *trading forex*. Dalam hal ini, para calon investor di *trading forex* perlu jeli dalam bergabung dengan perusahaan broker. Maka itu, nasabah harus proaktif menjadi informasi dari segala sisi.

Dalam hal ini, melalui edukasi yang dilakukan dengan naungan legalitas resmi, DIDIMAX berupaya

membangun paradigma investasi yang jujur dan konsisten, yakni investasi yang bisa membuat orang cepat kaya bukan karena profitnya yang besar, tetapi lebih karena volume keuntungan yang konsisten dan terarah.

“Investasi Boleh, Rugi Jangan!”

Meski aktivitas investasi *trading forex* itu mengandung unsur-unsur kerugian akibat kesalahan analisa pasar, atau akibat ketidaktepatan waktu transaksi, DIDIMAX berupaya menjamin keakuratan dan ketepatan analisa pasarnya. Dengan moto “Membuat nasabah memiliki profit sebanyak-banyaknya”, DIDIMAX menjamin mampu memberikan akurasi sinyal pasar hingga mencapai 99% yang berujung pada profitabilitas yang bisa didapatkan nasabah. Tentu, probabilitas keuntungan tersebut didapat atas dasar perhitungan pasar yang matang, tidak sekadar memberikan angka tanpa dasar yang jelas.

Selain itu, tidak hanya soal sinyal pasar yang akurat, DIDIMAX juga berkomitmen untuk bertanggung jawab jika nasabah mengalami *lost*. “Kita tidak akan menghilang begitu saja,” ungkap Miss Cenli pada Tim Cara Pandang. Namun begitu, nasabah juga perlu tertib untuk tidak semauanya sendiri melakukan transaksi di pasar.

Dalam hal ini, prinsip dasar paradigma investasi yang hendak dibangun oleh DIDIMAX adalah *konsistensi profit*. Maka, DIDIMAX menganggap bahwa lebih baik untung 5% atau 10% tapi konsisten ketimbang dalam 1 bulan meraup untung hingga 50% tapi habis hanya sekali itu saja. “Semua broker menginginkan keuntungan, tapi DIDIMAX menekankan bagaimana caranya ada simbiosis mutualisme. Itulah kenapa

DIDIMAX berbeda dari yang lain,” ungkap Miss Cenli.

Di sini, upaya yang dilakukan oleh DIDIMAX adalah bagaimana proses investasi itu harus menguntungkan, tetapi dalam kerangka berpikir yang rasional, jelas, dan terukur, pun juga dalam upaya memitigasi risiko kerugian investor. Dalam sehari, menurut Miss Cenli, keuntungan ideal yang bisa didapat nasabah berada di kisaran 1% sampai 3%.

Aman dan Terpercaya

Sungguh pun begitu, lagi-lagi masyarakat masih punya anggapan buruk terkait keamanan dan keharaman *trading forex*. Menurut Miss Cenli, itu adalah hal yang wajar, banyak perdebatan. Tapi, menurutnya, *trading Forex* itu basisnya adalah transaksi jual beli, hukumnya mengikuti hukum jual beli. Pun juga, dalam hal ini, *trading Forex* memiliki akad sebelum melaksanakan transaksi jual beli.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akad itu adalah kesepakatan (*agreement*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, ketika seorang nasabah mendaftar ke DIDIMAX dan tidak menerima persetujuan, maka mereka boleh membatalkan, tanpa ada paksaan. Menurutnya, halal haram itu masih berada pada koridor *alarm*, tetapi semua itu kembali pada persepsi masing-masing.

Akhirnya, geliat masyarakat untuk berinvestasi perlu didukung oleh perusahaan-perusahaan broker yang kredibel. Jangan sampai, stigma negatif pada investasi *trading Forex* semakin menguat hanya karena ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka itu, kredibilitas broker adalah kunci bagaimana nasabah merasa gembira untuk berinvestasi. **(azhar)**





PATGULIPAT RUU KUHP

Setelah hampir 3 tahun mandek, pemerintah dan DPR kembali mulai membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Tapi begitu, pembahasan kembali draf tersebut menuai pro dan kontra dari publik, sebuah hal yang sebetulnya bisa dihindari jika pembahasan memberikan ruang aspirasi yang adil kepada masyarakat.

Pada akhir Juni lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai RUU tersebut. Namun hingga kini, pemerintah belum berkenan membuka draf terbaru RUU tersebut, padahal revisi RKUHP ditargetkan rampung pada bulan Juli tahun ini.

Terbaru, Wamenkumham, Edward

Omar Sharif Hiariej menyebut draf terbaru RKUHP telah selesai dan pembahasannya masih terus berlangsung selama menyangkut pembahasan 14 isu krusial. Target rampung Juli tahun ini pun harus tertunda, karena saat ini masih berbenturan dengan masa reses. Pembahasan RKUHP akan segera dilanjutkan bersama DPR setelah selesai masa reses yaitu 16 Agustus mendatang. Omar Sharif Hiariej menyebut, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk segera mengesahkan RKHUP tersebut.

Draf terbaru RKUHP masih memuat pasal-pasal kontroversial yang dikritik tajam oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah pasal mengenai Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara yang

sebelumnya di dalam draf versi 2019 termuat dalam Pasal 353 dan 354 berubah menjadi pasal 351 dan 352.

Pasal-pasal yang dicabut dari draf versi 2019 menurut Edy Hiariej, justru tentang advokat curang dan praktik Kedokteran. Sedangkan pasal mengenai kritik terhadap presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan dengan mencantumkan penjelasan pada kata kritik.

Sebetulnya pasal penghinaan presiden ini sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006. Maka, jika kini Presiden Joko Widodo hendak mengembalikannya melalui KUHP, sungguh ia presiden paling buruk dalam sejarah Indonesia: berkuasa dengan melindungi diri melalui hukum yang dibuatnya sendiri.

Pada tahun 2019 lalu, pembahasan

RUU KUHP ditunda lantaran mendapatkan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Beberapa pasal yang dimuat dalam RUU tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet.

Beberapa pasal yang menuai banyak penolakan di antaranya pasal terkait penghinaan kepada pemerintah. Pada Pasal 240 dan 241 draf RKUHP misalnya, tindak penghinaan terhadap pemerintah dapat dikenai hukuman maksimal 3 sampai 4 tahun penjara.

Masih Bernuansa Kolonial

RUU KUHP dinilai oleh banyak pihak masih bernuansa kolonial. Nuansa kolonial tersebut masih terlihat dari ketentuan terkait 14 pasal krusial dalam RUU KUHP, terutama dalam pasal yang mengatur tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Karena itu, RUU KUHP justru terkesan berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Ini karena ada pasal menyangkut kebebasan berekspresi yang berpotensi menjerat pidana.

KUHP yang berlaku sekarang adalah dokumen yang dibuat pada 1946, yang mengadopsi begitu saja *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881. Karena dibuat untuk mengatur penduduk pribumi, konsep aturan hukum ini mencurigai segala gerak-gerik penduduk Hindia Belanda agar tak merongrong kekuasaan pemerintah Belanda. Ada hukuman mati, perzinaan, hingga pasal pidana untuk penghina penguasa.

Ada 14 tema yang berbau kolonial dalam RKUHP yang seharusnya diperbaiki pemerintah dan DPR kita. Alih-alih mengubahnya dengan mengikuti perkembangan zaman, DPR malah mau mengesahkan rancangan yang dibuat pemerintah

dengan menambah hukuman yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Misalnya, tentang penodaan agama dan lain sebagainya.

Para pembuat hukum kita tak hanya kian konservatif, tetapi juga hendak membunuh keberagaman Indonesia. Mereka hendak menegakkan hukum yang berangkat dari pemikiran tunggal atau menginginkan keseragaman dengan memberangus perbedaan, ketika kini pemikiran dan konsep-konsep keberagaman berbasis hak asasi manusia kian maju.

Hukum memang perlu, terutama untuk membangun harmoni hubungan sosial dengan tujuan membuat manusia berbahagia karena ada hukuman atas kejahatan. Tapi, hukum yang rigid dan terlalu jauh mengatur hak privasi justru akan menghambat harmoni karena tak lagi menjadi pelindung bagi mereka yang tak berbuat jahat. Dus, hukum yang berlebihan akan mencederai demokrasi. Sementara demokrasi menuntut kebebasan individu. Jika mengkritik penguasa dipidanakan, demokrasi tumpas dengan sendirinya.

Penghilangan Pasal di Proses Legislasi

Proses legislasi/pengesahan undang-undang di DPR selama ini terbukti sangat rawan penyelundupan maupun penghilangan pasal. Publik barangkali sudah lupa bahwa pada 2010 ada beberapa orang anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus penghilangan ayat soal rokok dalam Pasal 113 UU Kesehatan.

Ayat tersebut tiba-tiba hilang ketika UU yang telah disahkan DPR tersebut akan dimasukkan ke Lembaran Negara. Sekretariat Negara dan DPR saat itu beralasan ada kesalahan teknis. Namun para aktivis anti rokok

menduga ada tangan-tangan kotor industri rokok yang bermain. Mereka main mata dengan sejumlah anggota DPR. Media menyebutnya saat itu sebagai “skandal korupsi ayat rokok.”

Kecurigaan adanya pihak tertentu yang mencoba bermain dalam proses legislasi di DPR, bukanlah *hoax*. Salah satu isu krusial dan kontroversial adalah tentang pelegalan praktik LGBT dalam draf RKUHP. Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal adanya lima fraksi di DPR RI yang mendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bikin heboh. Muncul pro dan kontra yang sangat keras.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo, mengakui banyak NGO dan aktivis LGBT dari dalam dan luar negeri melakukan lobi bahkan tekanan, agar masalah tersebut segera masuk dalam pembahasan undang-undang. Apalagi pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak mengkriminalkan praktik kumpul kebo dan LGBT. MK melempar persoalan tersebut ke DPR.

Dalam draf awal RUU KUHP dirumuskan bahwa praktik LGBT bisa dipidana bila dilakukan di bawah usia 18 tahun. Artinya, secara hukum, praktik tersebut legal bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Tim perumus RUU juga menyepakati bahwa praktik LGBT dapat dipidana apabila dilakukan secara terbuka.

Sementara yang dilakukan secara klandestin (tertutup) tidak bisa dipidana. Tentu menjadi pertanyaan apakah dengan begitu pesta sex para LGBT yang belakangan marak di berbagai kota, tidak bisa dipidana, hanya karena dilakukan di ruang tertutup?

Imroatus Shaliha



LPSK SIAP LINDUNGI BHARADA E SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR

Ketika artikel ini ditulis, Selasa (9/8), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang akan ke Bareskrim Polri untuk menemui Bhayangkara Dua Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dalam rangka koordinasi terkait dengan justice collaborator (JC). Selain menemui

Bharada E, LPSK juga mengagendakan bertemu dengan penyidik untuk berkoordinasi tentang JC dengan pemohon Bharada E.

“(Kita akan sampai) Di Bareskrim pukul 10.00 WIB,” kata Wakil Ketua LPSK Erwin Partogi kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa pagi.

Pada waktu yang sama, kata Erwin, LPSK juga mengagendakan mendatangi Putri Chandrawathi, istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, di rumahnya, Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Iya (ke rumah Putri),” kata Erwin.

Sebelumnya, Bharada E melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan

surat tertulis permohonan menjadi JC guna mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai saksi.

Tim pengacara Bharada E, Muhammad Burhanuddin, Senin (8/8), menegaskan bahwa Bharada E merupakan saksi kunci yang mau mengungkap fakta yang sebenarnya dan mengungkap pelaku tindak pidana lain yang terkait dengan dirinya dan sepengetahuannya.

Oleh karena itu, pihak Bharada E berharap LPSK dapat beri perlindungan kepada Bharada E, baik dipindahkan ke tahanan lain atau bentuk perlindungan lainnya yang akan diputuskan oleh LPSK.

“Jadi, harapannya, bisa diterima permohonan *justice collaborator*-nya dan dilindungi oleh LPSK,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya dikatakan oleh Ketua LPSK Hasto A. Suroyo bahwa Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J masih bisa dilindungi oleh pihaknya selama bersedia menjadi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama.

“Kalau ditetapkan sebagai tersangka, LPSK tidak ada kewenangan lagi memberikan perlindungan, kecuali yang bersangkutan bersedia menjadi *justice collaborator*,” kata Hasto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/8).

Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri pada hari Rabu (3/8) menetapkan Bharada E sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J dengan sangkaan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dalam kasus tewasnya Brigadir J, penyidik juga menetapkan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR sebagai tersangka lainnya dengan sangkaan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan



Ketua LPSK Hasto A. Suroyo

berencana jo. Pasal 338 jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Rencananya pada hari ini (9/8) Polri bakal mengumumkan tersangka lainnya yang terlibat dalam peristiwa meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).

Polisi Tersangkakan Dua Ajudan Istri Sambo

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan alasan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, ajudan istri Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup.

“Alasannya dua alat bukti sudah cukup untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka,” kata Andi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Andi tidak merinci dua alat bukti tersebut apa saja, dan bagaimana peran Brigadir RR dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Komplek Polri Duren

Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7).

“Itu materi penyidikan, bukan untuk publikasi,” ujar ketua Tim Penyidikan Tim Khusus Bareskrim Polri itu.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menahan sopir dan ajudan Putri Chandrawathi, istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, berisinal Bharada RE dan Brigadir RR.

Bharada RE adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada Rabu (3/8).

Sedangkan Brigadir RR ditahan mulai Minggu (7/8) di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Brigadir RR dtersangkakan dengan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 338 *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal ini berbeda dengan sangkaan pasal terhadap Bharada E, yakni Pasal 338 *juncto* Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi dari pihak keluarga Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, *juncto* 338, *juncto* 351 ayat (3) *juncto* 55 dan 56 KUHP.

“Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi, *Inshaallah*.”

Mahfud MD

Sementara itu, terkait kasus ini, Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri memeriksa 25 orang personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.

Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri.

Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.

Kemudian untuk pertama kalinya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi muncul ke hadapan publik saat menjenguk suaminya di Mako Brimob Klapa Dua Depok, Minggu (7/8).

Kepada media, Putri menyampaikan bahwa dirinya mencintai suaminya, dan sudah mengikhlaskan semua peristiwa yang dialami oleh keluarganya.

“Saya Putri, bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya, saya mohon doa agar kami

sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami,” kata Putri.

Hingga hari ini, genap satu bulan kasus penembakan Brigadir J bergulir, sejak peristiwa terjadi pada Jumat (8/7). Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini.

Konstruksi Hukum akan Tuntas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD mengatakan bahwa konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi.

“Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi, *insyaallah*,” ucap Mahfud dalam cuitannya di akun resmi *Twitter* dengan nama pengguna *mohmahfudmd*, Selasa (9/8). Jika tidak ada halangan, tersangka akan diumumkan hari itu juga.

M a h f u d m e n a m b a h k a n bahwa sudah sejak lama memiliki impresi Polri hebat di dalam penyelidikan dan penyidikan. “Kasus mutilasi yang mayatnya s u d a h

terserak di berbagai kota saja bisa dibongkar. Ingat kasus Ryan?” ucap Mahfud.

Kasus Ryan atau Very Idham Henyansyah merupakan seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang, Jawa Timur. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta.

Mahfud juga mencontohkan kasus ketika Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang dikeroyok orang di gang sempit dan orang-orang memperkirakan tidak akan ada yang tahu pelakunya.

“Saya langsung kontak Kapolda Fadil. Saya bilang, Polri punya semua alat dan keahlian untuk menemukan mereka. Cari!”, tutur Mahfud mengisahkan.

Setelah Fadil menyatakan siap, para pengeroyok sudah ditangkap dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Dengan demikian, Polri telah menunjukkan kapabilitas dalam mengungkap berbagai kasus menggunakan alat dan keahliannya.

“Begitu juga di dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku,” kata Mahfud

Hal itu mengingat, kata dia, *locus delicti* atau lokasi tempat kejadian perkara sudah jelas berada di sebuah gedung, korban juga jelas, dan orang-orang yang berada di sana juga jelas. “Bismillah dan alhamdulillah tuntas. Ayo, kita kawal pengadilannya!” kata Mahfud.

Chairul Hidayah



MENCARI MODEL BELAJAR PASCA PANDEMI

Pasca melandainya jumlah angka pasien Covid-19, pemerintah masih terkendala model Pendidikan Tatap Muka (PTM) yang terbaik bagi peserta didik. Pola belajar yang baru dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi peserta didik agar tidak gagap untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka kembali, setelah dua tahun belajar melalui dalam jaringan. Model pembelajaran berbasis bauran merupakan solusi yang bisa dipraktikkan para *stakeholder* pendidikan.

Hingga hari ini, pemerintah bersama beberapa *stakeholder* masih terus-menerus melakukan kegiatan diskusi guna menerima masukan dari tenaga pendidik dan juga para ahli dari berbagai ilmu dan bidang profesi, yang nantinya akan digunakan sebagai formula terbaik dari pengembangan proses pembelajaran, sebagai tindak lanjut dari masukan-masukan yang dihasilkan.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kegiatan diskusi di *Darul Hikam Bandung* mengatakan, pola pendidikan dalam bentuk PTM belum dapat dilakukan secara penuh karena status pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

“Problemnya adalah pendidikan hari ini belum bisa secara *full* kita selenggarakan karena masih dalam

ancaman pandemi,” ujar Ahmad Muzani.

Namun di lain sisi, Ahmad Muzani juga optimis terhadap keberhasilan PTM yang dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk menentukan masa depan Indonesia, karena bagaimanapun para peserta didik adalah harapan bangsa ke depan, dan dalam beberapa tahun ke depan, mereka akan sampai pada usia yang baik.

“Mereka (anak didik) yang sekarang belajar, di tahun 2035 akan memasuki usia produktif,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, untuk menghasilkan angkatan kerja berkualitas tentu diperlukan satu pola pendidikan yang memungkinkan dijalankan secara langsung untuk menghadapi usia produktif jelang 2035.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Hikam Sodik Mudjahid menuturkan, pendidikan di Indonesia sedang bertransisi dari model pendidikan kala pandemi menuju pendidikan pasca pandemi yang memerlukan persiapan matang untuk diterapkan di lingkungan sekolah.

“Selama ini diskusi-diskusi kita fokus pada pola pendidikan saat pandemi, tetapi kini kita melangkah kepada pola pendidikan pasca pandemi,” ujarnya.

Sodik menjelaskan ada beberapa masukan yang dapat dilakukan oleh



pemerintah guna mencari model pendidikan terbaik pascapandemi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pemangku kebijakan, maupun masyarakat umum.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola pembelajaran bauran (*blended learning*). Model belajar ini penting terlebih untuk merespons kebutuhan peserta didik yang sudah mulai terbiasa mengikuti proses pembelajaran dalam jaringan.

Hal lain yang bisa diupayakan, menurut Sodik, perlunya keberpihakan politik dari komponen pembuat undang-undang guna mewujudkan pola pendidikan yang baru, yaitu salah satunya melalui revisi undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan



Senangnya para peserta didik bisa kembali belajar di kelas secara tatap muka.

nasional.

Sodik juga menyoal persoalan *road map* pendidikan serta digitalisasi pendidikan yang masih terkendala akibat pandemi yang melanda Indonesia. Meski demikian, upaya digitalisasi itu mulai dirintis walaupun jumlahnya masih terbatas.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makariem dalam wawancara dengan CNBC Indonesia menilai pendidikan di Indonesia menghadapi *compounding problem* yang diakibatkan oleh pandemi.

“Kita membutuhkan perubahan kebijakan sehingga sekolah-sekolah punya kemerdekaan untuk mengatasi apa pun permasalahan urgennya di masing-masing tempat,” katanya.

Ketika ditanyakan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah guna mendukung pola pendidikan bagi sekolah-sekolah, Nadiem menjelaskan salah satunya melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara fleksibel yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah secara langsung tanpa melalui Kas Pemda seperti yang selama ini dilakukan.

Pemerintah juga menyadari bahwa diperlukan fleksibilitas dalam penggunaan dana-dana BOS oleh sekolah-sekolah sehingga lebih afirmatif untuk menutup kesenjangan teknologi pendidikan di berbagai daerah.

“Kita memberikan fleksibilitas bantuan (BOS) kepada sekolah-sekolah ini untuk membeli kebutuhan tatap

muka,” ujarnya.

Secara tersirat, Nadiem juga mengakui adanya tantangan dan disparitas pendidikan di daerah-daerah karena kondisi geografis alam Indonesia yang beragam dan ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata di sekolah-sekolah.

Nadiem menambahkan pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu program digitalisasi sekolah yang dapat digunakan oleh guru dan murid dalam menunjang proses pendidikan.

Program digitalisasi ini penting, meski pandemi mulai melandai. Ini dalam rangka menjembatani pola pengajaran tatap muka yang mulai berlangsung, dengan tidak



meninggalkan sepenuhnya model daring yang sudah dilakukan ketika pandemi.

Pembelajaran daring tetap bisa dilakukan agar peserta didik tidak bosan, dan pendidik juga memiliki alternatif cara dan model pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif sesuai dengan target pembelajaran.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan platform-platform guru berbagi dan belajar yang akan menunjang guru-guru terhadap bentuk adaptasi pada perubahan teknologi pendidikan yang selama ini terjadi sejak pandemi.

“Saat ini sudah hampir 255 ribu guru yang terdaftar di dalam platform ini. Ini jelas-jelas bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan guru di berbagai daerah tertentu yang

masih terbatas dari sisi jumlah dan keterampilan,” jelas Nadiem.

Pemerintah juga mengapresiasi bagi para guru-guru maupun para peserta didik terhadap pola pendidikan yang saat sekarang ini telah diterapkan dan akan secara terus menerus dilakukan perbaikan mengingat wabah pandemi yang masih belum mereda.

Sebagai informasi pada periode ajaran baru 2021/2022 pemerintah sudah mulai melakukan pola transisi model pendidikan dari pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menuju pola PTM terbatas yang mulai diselenggarakan oleh sekolah-sekolah.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian dengan tetap berpedu pada kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama

yang harus dilaksanakan bersama sebagai wujud usaha terbebas dari berbagai macam penyakit terutama Covid-19.

Aturan tersebut disepakati oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021 yang lalu dan mulai diberlakukan pada Januari 2022.

Dikutip dari kontan.co.id, pemerintah juga telah menyesuaikan aturan pelaksanaan PTM di sekolah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 kementerian. Pada penyesuaian kali ini, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru dan capaian vaksinasi dosis lengkap (2 dosis). Untuk cakupan vaksinasi dihitung pada kalangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta masyarakat lanjut usia (lansia) di wilayah tersebut.

Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Muhammad Hasbi menyampaikan, sekolah-sekolah yang daerahnya sudah boleh melaksanakan PTM 100 persen, terdapat beberapa kesiapan yang perlu diperhatikan. Seperti penyediaan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, ketersediaan toilet yang bersih, serta bentuk operasional kantin yang sesuai anjuran SKB 4 Menteri. **Amir Rifai**

Kita memberikan fleksibilitas bantuan (BOS) kepada sekolah-sekolah ini untuk membeli kebutuhan tatap muka.

Nadiem Anwar Makarim
Mendikbudristek





Citayam Fashion Week

PANGGUNG BARU KOMUNITAS SUBKULTUR

Jeje, selebgram yang populer karena tampil di Citayam Fashion Week, tak pernah menyangka bila hobi ngontennya itu akan dibicarakan publik. Di awal tak bermaksud ingin menjadi terkenal, apalagi bisa sepongung dengan pejabat dan artis papan atas. Tapi berkat nongkrong dan berkreasi di Citayam Fashion Week, celotehnya "slebew" viral. Bisa mendatangkan popularitas dan uang berlimpah.

Komunitas subkultur kembali “naik ke puncak” menjadi perbincangan populer. Berkat *Citayam Fashion Week* yang viral di media sosial, sejumlah remaja yang tidak memiliki pelatihan keterampilan sebagai model profesional, membongkar kuasa kapitalisme industri permodelan. Kehadiran mereka di atas panggung catwalk, lebih tepatnya Zebra Cross, menarik perhatian masyarakat luas untuk mengikutinya.

Tak hanya artis, pejabat, dan kreator konten dari dalam negeri, tapi juga berbagai seleb dan promotor industri permodelan juga menanggapi. *Citayam Fashion Week* menjadi bukti yang ke sekian kali bahwa Indonesia kaya dengan industri di bidang ini. Namun, yang lebih penting, bahwa untuk menjadi model tidak harus memiliki postur tubuh yang menarik, seksi, apalagi berekonomi premium.

Para artis *Citayam Fashion Week* seperti Bonge, Jeje, dan Roy sudah membuktikannya. Mereka tak lagi menjadi bagian dari komunitas yang dipinggirkan oleh kerakusan ibu kota. *Citayam Fashion Week* yang viral berkat media sosial, menempatkan mereka ke panggung yang sama seperti model profesional Paula Verhoeven, artis kenamaan seperti Ivan Gunawan dan Baim Wong, serta berjalan bersama dengan sejumlah pejabat seperti Ridlwan Kamil dan Anies Baswedan.

Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Luluk Dwi Kumalasari menyebut *Citayam Fashion Week* sebagai wujud kreasi remaja kekinian yang berhasil memadukan kecanggihan teknologi informasi dengan kreasi



komunitas subkultur melalui fashion.

Menurut Luluk, meski popularitas *Citayam Fashion Week* menuai pro dan kontra, itu sangatlah wajar. Sebagai sebuah karya yang terpublikasi secara luas, pastilah setiap orang akan memberikan komentar secara berbeda. Sebagian orang menilai aksi para remaja ini mengganggu dan membuat kumuh kawasan Sudirman, tapi sebagian besar berpendapat tidak masalah asal bisa dikelola secara baik dan berdampak positif.

Pada aspek sosiologis, cara kreatif para remaja tersebut haruslah diapresiasi. *Citayam Fashion Week* merupakan fenomena yang wajar. Hal ini didasarkan pada naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk kelompok sesuai karakteristik dan

tujuan tertentu.

“Itu bagian dari bentuk mengekspresikan diri mereka melalui fashion,” kata Luluk kepada *Majalah Carapandang*, Minggu (24/7).

Citayam Fashion Week terbentuk dari beberapa anak muda yang tinggal di daerah Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok. Sebagai daerah penyangga ibu kota, di mana para anak muda ini memiliki kreativitas dan minat di bidang fashion.

“Saya melihat keberadaan *Citayam Fashion Week* ini merupakan sarana para anak muda untuk mengungkapkan jati diri mereka secara jujur melalui



Luluk Dwi Kumalasari
Ketua Prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang



sebuah fashion,” terangnya.

Luluk menambahkan, selain perkembangan tren fashion, perkembangan sosial media juga turut mempengaruhi keberadaan tren ini, utamanya *TikTok*. Para remaja di *Citayam Fashion Week* ini memanfaatkan sosial media untuk menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Hal ini juga melahirkan banyak seleb *Instagram* dan seleb *TikTok* seperti Jeje, Bonge, Kurma, Roy, dan lainnya.

“Masifnya keberadaan sosial media mempengaruhi cara para remaja untuk berkreasi dan *Citayam Fashion Week* menjadi wadah baru untuk mereka. Selain itu, dengan munculnya komunitas ini juga menjadi sebuah wacana baru bahwa fashion yang selama ini identik dengan kalangan atas, juga bisa dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah,” kata Luluk.

Dampak positif lain, kata Luluk, dari kemunculan tren ini yaitu para remaja menjadi lebih memahami kehidupan bersosial. Kreatifitas para remaja

sebagai content creator di media sosial juga meningkat. Selain itu, keberadaan para remaja ini juga meningkatkan penghasilan para Pedagang Kali Lima (PKL) yang berada di sekitar Sudirman.

“Selain dampak positif, tentu saja hal ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif seperti budaya buang sampah sembarangan dan cara berpakaian yg dinilai terlalu terbuka,” ujar dosen kelahiran Jombang itu.

Untuk melakukan pengurangan dampak negatif, tegas Luluk, perlu dilakukan kerja sama dari berbagai pihak, utamanya pemerintah. Hal-hal yang bisa dilakukan dengan mengedukasi, mengarahkan dan pendampingan kepada para remaja agar komunitas ini tetap berlangsung namun dengan minim dampak buruk.

“Secara keseluruhan saya memandang bahwa tren ini sebagai hal yang positif. Saya berharap *Citayam Fashion Week* dapat menjadi komunitas yang dikenal secara positif tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Internasional. Saya juga berharap komunitas ini dapat menunjukkan sebuah budaya fashion baru yang memiliki karakter sendiri,” tandas Luluk.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wahyudi Akmalia mendukung aktifitas *Citayam Fashion Week* yang melahirkan model jalanan seperti Roy. Bahkan, ketika Roy ditawarkan beasiswa oleh Sandiaga Uno untuk berkuliah dan menolaknya.

“Karena itu, saya dukung sih Roy untuk terus *ngonten*, mumpung lagi laku. Kalau enggak laku *yah* ngamen atau jadi tukang parkir. *Eenggak* apa-apa, yang penting ada duitnya,” ujar Wahyudi yang dikutip dari akun *Facebook* pribadinya, Minggu (24/7).

Meski penolakan atas dasar sedang laku itu tampak tidak masuk akal,

karena menganggap pendidikan merupakan langkah besar dan akan menjadi lompatan Roy untuk perbaikan ekonominya di masa depan.

“Tentu saja jawaban ini sangat klise dan melanggengkan kelas berpendidikan yang sebenarnya soal urusan honor kerja-kerja intelektual yang dilakukan oleh akademisi, misalnya, cenderung *ngaco*,” jelasnya.

Secara praktis, dari sisi pragmatis, memang pendapatan Roy ini besar. Wahyudi menyebutkan, setiap konten yang bersama Roy, ia dibayar minimal 400 ribu sampai 1 juta. Kalau sehari lebih dari 5 kali, kita bisa menghitung pendapatan Roy ini. Secara kasar, ia bisa mendapatkn kurang lebih sehari Rp5 juta. “Jumlah itu tentu saja lebih banyak dari gaji bulanan awal ASN, apalagi dosen honorer. Jumlah itu juga jauh lebih banyak dari bayaran honor jadi pembicara seminar,” kata Wahyudi.

Pernyataan Wahyudi memang ada benarnya, sekalipun sesungguhnya secara tersirat peneliti muda BRIN ini ingin menyindir pihak-pihak yang tidak menganggap peran akademisi sebagai tonggak peradaban bangsa. Meski demikian, pendidikan bukan semata untuk mendapatkan gaji yang besar tapi pembangunan mental, karakter, pemupukan kerangka berfikir yang dewasa dan kritis, serta tugas mulia untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar.

Selain itu, fenomena *Citayam Fashion Week* ini sekaligus menjadi kritik bagi dunia pendidikan, tak hanya membandingkan dari sisi honor *influencer* dengan pendidik atau akademis, tapi juga supaya lebih memperhatikan berbagai komunitas subkultur yang keberadaannya tidak bisa dinomorduakan.

Naff



DIGEMBLENG DI SENTRA KEMENSOS, TATIK BERJAYA DI ASEAN PARA GAMES 2022

CARAPANDANG - Gemerlap lampu warna warni menghiasi panggung penutupan ASEAN Para Games XI 2022 di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (5/8). Meriah, namun khidmat, perhelatan ASEAN Para Games resmi ditutup oleh Presiden RI, Joko Widodo yang dihadiri pula oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tidak kurang 10.000 penonton bersorak sorai menggelora di Stadion

Manahan semakin menguatkan semangat dan rasa bangga kontingen Indonesia yang berhasil meraih juara umum di ASEAN Para Games ke-11 ini.

Dibalik keberhasilan tersebut, ada kisah menarik, perjuangan Sri Hartatik, mantan penerima manfaat dari Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta milik Kementerian Sosial.

Dengan segala keterbatasan yang ia miliki, Sri Hartatik berhasil membuktikan, bahwa keterbatasan

bukan suatu hambatan. “Selama tekun dan gigih berlatih, akhirnya saya bisa ikut dalam perhelatan level internasional ini dalam bidang panahan. Di kesempatan berikutnya, saya akan berusaha lebih baik lagi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mohon doanya semua,” ucapnya penuh haru.

Perempuan 40 tahun itu merupakan alumni penerima manfaat Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di

Surakarta, Kementerian Sosial tahun 2000 yang mengikuti perhelatan para penyandang disabilitas berbakat ini. Bukan hal mudah menembus jajaran atlet profesional tingkat internasional.

Tatik harus berjibaku di Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2021. Di ajang serupa Pekan Olahraga Nasional (PON) ini, Tatik menyabet emas di cabang olahraga panahan, yang sejak 2019, ia tekuni. Medali emas ini jadi tiket masuk sebagai atlet ASEAN Para Games.

“Ya pasti karena doa, latihan keras, dan rasa percaya diri,” kata Tatik, berbagi kiat suksesnya. Kepercayaan dirinya muncul sejak ia diberi kesempatan mengembangkan diri saat masuk di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta, di bawah naungan Kementerian Sosial.

Sejak usia 3 tahun, ia menjadi penyandang disabilitas karena polio pada kaki sebelah kanan. Perasaannya campur aduk. Ia malu, tidak percaya diri, bahkan merasa tidak punya masa depan.

“Setelah masuk Sentra, seperti kata R.A. Kartini, ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, saya mulai percaya diri,” katanya. Selama menjalani rehabilitasi di Sentra, ia mendapat berbagai layanan, baik rehabilitasi sosial, medis maupun pelatihan vokasional, sehingga ia memiliki keterampilan untuk dapat mengembangkan diri. “Di situ, saya diajarkan untuk mandiri. Di situ juga, saya menemukan bakat dan minat saya,” katanya.

“Setelah berbagai rehab saya jalani, dari Sentra, tumbuh rasa percaya diri saya. Seolah-olah dunia terbuka. Belajar berbagai keterampilan, ternyata saya bisa,” katanya dengan suara bergetar.

Dari tangannya yang berbakat,

“Solidaritas antar bangsa-bangsa ASEAN yang ditunjukkan oleh para atlet akan menjadi kekuatan besar bagi ASEAN dan bagi para penyandang disabilitas. Kita mendukung setiap inisiatif dari penyandang disabilitas.”

Presiden RI, Joko Widodo

ibu dua anak ini tidak hanya piawai membidik sasaran dengan panah. Ia juga terampil mengolah masakan. Sebelum berlatih merentang busur panah, ia membuka pesanan nasi kotak dan makanan kecil untuk berbagai kegiatan.

Namun sayang, saat pandemi, usahanya sepi orderan. Tak hilang akal, ia menekuni olahraga panahan yang pernah ia pelajari di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta. Pelatih melihat ada bakat pada dirinya.

Akhirnya, ia ditawarkan untuk menjadi atlet panahan. “Saya optimistis kok, Bu. Niat saya memamah pertama adalah karena ini salah satu jenis olahraga (sunnah) anjuran Rasul, namun juga ada prestasinya. Jadi, semboyan saya ‘Gapai Sunnah dan Raih Prestasi,’” katanya yakin.

Banyak kesan yang ia dapatkan selama dibimbing di Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta. Tatik mengaku Sentra ini merupakan surganya teman-teman disabilitas. “Dari sini, rasa percaya diri mereka tumbuh dan optimis menggapai hidup,” katanya.

Indonesia Juara Umum

Indonesia menjadi juara umum di ASEAN Para Games 2022. Total 425 medali yang terdiri dari 175 medali emas, 144 medali perak dan 106 medali perunggu diraih oleh atlet Indonesia.

Tak hanya itu, Indonesia juga bangga kembali dipercaya menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11. “Indonesia sangat bangga menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN,” kata Presiden RI, Joko Widodo pada *Closing Ceremony* ASEAN Para Games ke-11.

Presiden menekankan, prestasi membuktikan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Pesan solidaritas juga tergambar di ASEAN Para Games ini.

“Solidaritas antar bangsa-bangsa ASEAN yang ditunjukkan oleh para atlet akan menjadi kekuatan besar bagi ASEAN dan bagi para penyandang disabilitas. Kita mendukung setiap inisiatif dari penyandang disabilitas,” katanya.

Pesta olahraga disabilitas se-Asia Tenggara ini diikuti oleh 11 negara, yaitu Indonesia (tuan rumah), Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Negara-negara ini tergabung dalam Federasi Olahraga Para Asean (APSF).

Acara ini sukses digelar dengan waktu persiapan 5 bulan. Indonesia, sebelumnya, sudah berpengalaman pada *event* perlombaan yang sama. Indonesia sukses menjadi tuan rumah di ASEAN Para Games 2011 dan Sea Games 2011.



PANGAN GLOBAL GOYANG EFEK PERANG

Perang antara Rusia dan Ukraina tampaknya belum akan segera berakhir. Hingga 6 bulan terakhir ini, belum ada negosiasi di antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik. Justru, situasi keduanya semakin memanas, karena sejumlah negara Barat berkoalisi ikut campur dalam seteru tersebut.

Amerika Serikat (AS) dan sejumlah sekutunya terus memasok senjata ke Ukraina. Tentu saja, ekonomi global berpotensi goyah akibat disrupsi rantai pasok yang mengerek harga komoditas, seperti energi dan pangan global. Beberapa negara telah dan sedang mengalami krisis pangan seperti yang dialami Mesir dan Sri Lanka.

Konflik antara Rusia dan Ukraina

dimulai dengan operasi militer Rusia berskala besar pada 24 Februari 2022. Rusia menganggap bahwa keinginan Ukraina untuk bergabung dalam keanggotaan NATO berdampak kedaulatan Rusia. Negara “beruang putih” itu merasa terancam jika perbatasan Rusia-Ukraina menjadi area pelatihan militer AS dan beberapa negara sekutu NATO. Jelas, ini menjadi ancaman bagi mereka, sehingga konflik Rusia-Ukraina akhirnya menjadi kenyataan.

Sejak saat itu, peperangan tak terbendung. Ledakan demi ledakan terjadi di sejumlah kota besar di Ukraina, seperti Kyiv, Odessa, Kharkiv dan Mariupol. Penduduk lokal banyak yang bermigrasi ke kota-kota lain di sebelah bagian barat Ukraina, bahkan keluar dari negara tersebut. Selain



karena khawatir terjebak pada perang yang berkepanjangan, pasokan gandum dan kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipastikan ketersediaannya.

Bahkan, hingga saat ini, lebih dari 110 hari ketegangan masih berlangsung. Banyak korban jiwa berguguran dari kedua belah pihak. Entah sampai kapan perang ini akan berakhir. Sebab, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan perang akan berhenti. Mediasi damai dari pemerintah Indonesia pun tak bisa membuat kedua pemimpin negara tersebut punya intensi untuk menghentikan perang.

Mengutip *BBC*, dalam pidato Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum serangan diluncurkan mengungkapkan, alasan Rusia menyerang Ukraina adalah karena Rusia

merasa tak aman, tak bisa berkembang, dan tidak eksis. Ukraina modern adalah ancaman yang konstan bagi Rusia. Vladimir Putin sendiri menolak serangan ke Ukraina itu disebut sebagai invasi. Sebab, tujuan serangan tersebut, adalah untuk melindungi orang-orang yang terintimidasi atas kejahatan genosida Ukraina. Selain itu, Putin mengatakan, serangan ke Ukraina bertujuan untuk melakukan

demiliterisasi dan denazifikasi.

Mendengar pernyataan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah bahwasanya tak ada kejahatan genosida di Ukraina. Ia mengungkapkan Ukraina adalah negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden keturunan Yahudi. “Bagaimana bisa saya menjadi seorang Nazi?” dengan tegas dikatakan oleh Zelensky.

Sementara itu, banyak pihak menilai perang antara Rusia dan Ukraina tidak lain dipicu oleh rencana Ukraina yang ingin bergabung ke *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Menurut Putin, ekspansi NATO melalui Ukraina yang bergabung dengan aliansi militer barat lainnya adalah ancaman besar bagi Rusia. Sebab, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Maka, apabila Ukraina bergabung, tidak menutup kemungkinan NATO akan membangun pangkalan militer di negara tersebut.

Pengamat militer, Connie Rahakundini, dalam kanal Youtube Helmi Yahya menyebut bahwa Putin mengerahkan pasukannya untuk menyerang Ukraina bukan tanpa sebab. Menurut Connie, Rusia ingin

Kasus Uni Soviet jatuh dan pecah kemudian Lithuania dan Latvia diambil NATO atau masuk ke dalam NATO enggak apa-apa karena jauh, tapi Ukraina dekat. Pada 2008 malah Ukraina dan Georgia diundang NATO untuk masuk. Nah di situ awal kisruh. Putin sudah bilang jangan.



Connie Rahakundini, Pengamat militer
Vol. IX, Agustus 2022

memberi pelajaran kepada AS dan NATO bahwa dunia tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok saja. Kekesalan Putin terhadap AS dan NATO tampaknya sudah berlangsung lama sejak 2008.

“Kasus Uni Soviet jatuh dan pecah kemudian Lithuania dan Latvia diambil NATO atau masuk ke dalam NATO *enggak* apa-apa karena jauh, tapi Ukraina dekat. Pada 2008 malah Ukraina dan Georgia diundang NATO untuk masuk. Nah di situ awal kisruh. Putin sudah bilang jangan.” pungkas Connie.

Bahkan, jauh-jauh hari Putin sudah mengingatkan agar AS dan NATO tidak mengganggu kedaulatan di bagian perbatasan Rusia. Karena, hal ini jelas akan mengancam eksistensi Rusia yang saat ini menjadi salah satu deretan negara *super power* setelah AS. Tentu, negara-negara Atlantik utara tersebut tak menginginkan Rusia menjadi pesaingnya. Maka, untuk mewujudkan itu eksistensi dan kedaulatan Rusia harus dihancurkan.

Embargo Ekonomi

Setelah perang konflik antara Rusia dan Ukraina berlangsung sengit, tak lama kemudian negara-negara yang tergabung dalam aliansi Uni Eropa dan NATO, seperti AS, Jepang, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan memberikan sanksi dengan mengembargo Rusia.

Tujuan embargo ini tak lain sebagai respons Barat atas invasi Rusia terhadap Ukraina. Tentu, embargo itu bertujuan untuk mengisolasi dan mengguncangkan kestabilan ekonomi Rusia sehingga Rusia mengalami krisis dan mengakhiri invasinya ke Ukraina. Meski demikian, nyatanya hingga 6 bulan berlangsungnya perang, nyatanya Rusia tetap bertahan



dari krisis. Rusia tidak bisa diprediksi lumpuh dari sisi ekonomi secara cepat. Rusia merupakan negara besar, yang kuat secara ekonomi dan pertahanan militernya.

Dalam konflik ini, embargo yang dilakukan barat kepada Rusia jelas akan berdampak terhadap guncangan ekonomi global. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha M. Rachbini mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina berpotensi mengacaukan perekonomian global di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi

Covid-19. Selain itu, embargo terhadap Rusia juga dapat mengancam tindakan perang yang membahayakan kemanusiaan.

Padahal, kebutuhan energi *fossil oil* negara-negara yang mengembargo, terutama Uni Eropa saat ini masih sangat bergantung kepada Rusia. Mengutip resourcetrade.com, selama periode 2015–2020 kebutuhan impor minyak bumi Uni Eropa berkisar 990 juta ton *oil equivalent* (toe) per tahun. Dari seluruh produk impor tersebut, sekitar 236 juta toe atau 24 persen di antaranya dipasok dari Rusia.



Transaksi impor minyak bumi yang dilakukan Uni Eropa tersebut setiap tahunnya memerlukan dana sekitar 431 juta USD. Artinya, Uni Eropa membayar 93 juta USD kepada Rusia sebagai imbal dari jasa transaksi komoditas minyak.

Sementara itu, pada komoditas gas bumi, dari total kebutuhan gas bumi Eropa yang mencapai 453 juta toe, 68 juta toe di antaranya berasal dari Rusia. Total nilai ekonomi

gas bumi yang harus dibayarkan Uni Eropa kepada Rusia rata-rata 19 miliar USD per tahun.

Nilai impor tersebut setara dengan 15 persen dari seluruh impor gas bumi Uni Eropa. Apabila ditotal, ketergantungan Uni Eropa terhadap Rusia dari komoditas minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 20 persen dari kebutuhannya per tahun. Tentu, transaksi komoditas migas ini

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, apabila terjadi ketegangan seperti perang Rusia-Ukraina saat ini, maka akan merugikan salah satunya.

Di sisi lain, dampak global yang dirasakan oleh berbagai negara di antaranya meroketnya harga komoditas seperti minyak dan gas bumi karena Rusia memiliki peran strategis dalam rantai pasok perdagangan. Rusia merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia setelah AS. Per hari, Rusia mampu memproduksi minyak hingga 9,7 juta barel.

Selanjutnya, komoditas pangan. Rusia dan Ukraina merupakan lumbung pangan dunia. Lebih dari 30 persen gandum global disuplai oleh kedua negara tersebut. Dalam hal ini, ketegangan konflik tersebut menjadikan distribusi pangan tidak berjalan stabil, berpotensi menyebabkan krisis pangan global.

Hingga saat ini, perang Rusia-Ukraina belum menemukan titik terang. Banyak yang memprediksi perang akan berakhir manakala Rusia berhasil mencapai misinya. Namun, apabila ketegangan itu berlangsung lama, efeknya tentu akan semakin luas.

Negara-negara berkembang, seperti Indonesia patut waspada, terutama dari sisi perkonomian karena beberapa kebutuhan impor kita masih sangat bergantung kepada negara-negara Barat. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan pernyataan supaya pelaku ekonomi dalam negeri, khususnya UKM-UKM dan *Start-up* untuk melakukan pengetatan anggaran untuk mengantisipasi krisis global yang tidak bisa diprediksi.

Aldi Bintang/Naff



Eisha M. Rachbini, Peneliti INDEF

PRESIDENSI G20 DI TENGAH TEKANAN

Perang Rusia dan Ukraina telah menciptakan dua poros kekuatan global. Di setiap forum internasional, kedua kekuatan itu terlihat dibawa-bawa secara *head to head*, yakni Rusia dan Barat (Amerika Serikat, Uni Eropa dan para sekutunya). Sebagai negara penyelenggara agenda paling bergengsi yang membahas isu krisis perekonomian seantero dunia, Indonesia menghadapi permasalahan ini tampak begitu dilematis.

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen pada Kamis (14/7), secara terang-terangan mengultimaturnya Rusia melalui forum G20 melalui ajakan boikot. Rusia dianggap sebagai 'biang kerok' atas krisis pangan yang dampaknya secara signifikan terjadi diseluruh dunia.



Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat

Yellen berdalih bahwa bukan karena kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS)-lah yang menyebabkan kenaikan harga pangan di negara-negara berkembang, namun karena pembatasan ekspor minyak Rusia-lah penyebabnya.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Rusia Oleg Salagay menyatakan, Barat telah mempolitikasi pertemuan G20, sehingga alur pembicaraan di dalamnya tidak lagi kontekstual. Terlihat juga bahwa bolak-balik *walk-out* juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, lantaran sering dikecam dan ditanya terkait kapan Rusia akan berhenti menginvasi Ukraina? Jauh-jauh hari, pada dasarnya Vladimir Putin sudah sering mengingatkan bahwa Rusia tidak ingin masalah perang dengan Ukraina diikutcampuri.

Jauh-jauh hari Indonesia acap kali diserukan oleh negara blok Barat – terkhusus AS – agar tidak mengundang, bahkan mengeluarkan Rusia

dari G20. Respons sebaliknya, ternyata pihak Rusia bahkan menegaskan bahwa mereka akan turut hadir pada rangkaian

pertemuan G20 di Bali, Indonesia. Kedua pendapat yang saling bertolak belakang di atas, menunjukkan bahwa keduanya saling unjuk 'taring' atas dominasinya terhadap Indonesia.

Sesuai dengan prinsip politik internasional Indonesia yang bebas-aktif, pada dasarnya Indonesia tidak semerta-merta mau tunduk dengan apa yang diserukan Barat ataupun Rusia. Tidak pula maksud Indonesia untuk sekedar netral dan tidak memihak siapapun. Politik bebas-aktif Indonesia pada dasarnya menjiwai sikap yang independen (tanpa intervensi dan tekanan) dari pihak lain. Indonesia berdasarkan pertimbangan matang demi kemaslahatan global membuat keputusan, bukan hanya soal fanatisme blok semata.

Hiruk-Pikuk Presidensi G20

Landasan utama Pemerintah Negara Indonesia dalam menyelenggarakan G20 adalah konsensus multilateral yang diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dapat dilihat adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang hingga kini sudah diubah dua kali melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2021 dan Keppres Nomor 3 Tahun 2022.

Setidaknya Pasal 2 ayat (1) Keppres



12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa agenda-agenda pertemuan dalam G20 meliputi enam, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *sherpa*, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat *working group*, dan pertemuan tingkat *engagement group*. Apabila seluruh pertemuan tersebut sudah dilaksanakan dan mendapatkan hasil ‘sepakat’ maka dapat dilanjutkan penyerahan komunikasi.

Terdapat tujuh pembahasan utama yang ditekankan pada setiap tingkat pertemuan G20, di antaranya kesehatan global, digitalisasi ekonomi, sumber daya energi hijau, rancangan arsitektur keuangan global, sistem keuangan berkelanjutan, sektor finansial, infrastruktur, dan pajak

internasional, serta ketahanan pangan. Khusus permasalahan ekonomi global, permainan saham melalui *cryptocurrency* selama pandemi ternyata mengalami banyak ekses yang sehingga dengannya perlu untuk diatur dalam lintas masing-masing negara.

Sejak dimulai tanggal 1 Desember 2021 yang lalu, rangkaian kegiatan G20 sudah hampir berada pada klimaksnya. Tinggal satu tahap lagi menuju KTT yang rencananya akan diselenggarakan pada November tahun ini. Namun demikian, berdasarkan

Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan Dan Gubernur Bank Sentral yang ketiga kalinya, ternyata masih juga tidak memunculkan suatu komunikasi. Sebagai catatan, komunikasi merupakan satu catatan bersama yang menjadi kesepakatan pada kerjasama multilateral.

M e r a n g k u m
penyebab atas
t i d a k



Oleg Salagay, Menteri Kesehatan Rusia



munculnya komunike, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa sesungguhnya dengan dilandasi suatu kesadaran yang besar, tidak sepemahaman muncul lantaran dua kondisi yang benar-benar menantang ekonomi global, yakni pandemi Covid-19 dan pertentangan geopolitik (Rusia dan Ukraina).

Kendati demikian, ternyata masih banyak juga yang dapat Indonesia raih dalam kontribusi G20. Semisal dana perantara keuangan, setidaknya Presidensi G20 di Indonesia sudah dapat mengamankan 1,28 Milyar Dollar Amerika dalam rangka penanggulangan pandemi, sistem keuangan berkelanjutan, kontribusi swasta dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,

perpajakan internasional, dan isu pangan untuk membantu negara-negara berekonomi lemah yang mengalami krisis pangan.

Tantangan Blok Barat dan Rusia

Hiruk-pikuk penyelenggaraan G20 di Indonesia telah membuktikan bahwa tendensi geopolitik masih memainkan peran yang begitu signifikan. Pada satu posisi, hal ini seakan merupakan kelaziman mengingat bahwa sanksi pada forum-forum ekonomilah yang hanya mampu melawan tangan dingin Rusia. Adapun pada sisi yang lainnya, negara-negara Barat begitu kekanak-kanakan menyampingkan substansi G20 hanya karena faktor tendensi semata.

Negara blok Barat berulang kali

memaksa Indonesia untuk turut memboikot Rusia pada G20, terutama KTT nanti. Inggris, Kanada, dan AS kerap kali *walk out* hanya untuk menegaskan bahwa seharusnya Rusia tidak pernah ada dalam G20, terlebih pada KTT-nya. Blok Barat seakan ingin menunjukkan bahwa seharusnya Indonesia patuh pada keyakinan sikap politik mereka.

Menghadapi permasalahan ini, Hikmahanto Juwana, pakar hukum Internasional Universitas Indonesia menyebutkan bahwa perbuatan blok Barat – khususnya AS – adalah tidak *fair*. Sikap bermusuhan antara AS dan Rusia terjadi, namun Indonesia dipaksa untuk menghadapinya. Seperti yang sudah terjadi, hal yang sama juga pernah dialami Ukraina. Saat Ukraina diserang Rusia, AS berdalih bahwa perang tersebut bukan merupakan urusan negaranya. Sisi yang lain, Rusia dengan kekuatannya menurut Hikmahanto akan tetap hadir dalam KTT G20 mendatang – dengan kemungkinan pertemuan secara *online*. Hal ini ditunjukkan sebagai langkah Putin untuk tidak didiskreditkan oleh negara Barat.

Adapun terhadap posisi Indonesia yang dilematis, Hikmahanto menegaskan, apa-apa yang diusahakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sudahlah tepat. Indonesia tetap mengusahakan agar seluruh pihak, tanpa terkecuali, untuk hadir pada forum yang menentukan perekonomian dunia tersebut.

Setidaknya, menurut Hikmahanto, jika usaha ini pun gagal, kemudian berujung pada kemungkinan terburuk akan bubarnya G20, Indonesia tidak secara pasrah menerima takdir semata, namun Indonesia sudah pernah memperjuangkannya.

PROSPEK DAN DILEMA INDUSTRI HALAL



Dwi Erlina Wulandari
Pemerhati Ekonomi Islam

Beberapa tahun terakhir, *brand* fesyen islami begitu diminati oleh konsumen Indonesia. Ramainya fesyen islami itu, membuat pelaku industri fesyen berbondong-bondong menggeluti industri fesyen halal. Tapi, industri halal adalah jenis industri yang berkarakter khas, yang di dalamnya memiliki fungsi menguatkan spiritualitas kelompok muslim.

Salah satu *brand* ternama global yang kini ikut meramaikan industri halal adalah merek fesyen ternama asal Jepang, Uniqlo, yang selalu meng-*upgrade* inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan gaya hidup kekinian.

Tak pelak, ketika industri busana muslim berkembang sangat pesat, Uniqlo akhirnya mulai melirik pasar fesyen islami dengan menggandeng desainer busana muslim ternama dari Inggris: Hana Tajima, dengan memberikan label Uniqlo x Hana Tajima. Koleksi Uniqlo dari Hana Tajima ini tidak tersedia di semua negara, melainkan hanya di negara yang memiliki tren produk halal kuat seperti Indonesia, Singapura, dan Thailand.

Perkembangan tren tersebut menunjukkan

bahwa pasar fesyen islami mulai diminati produsen global. Yang harus kita sadari adalah bahwa produk halal itu, pada awalnya hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, namun saat ini fesyen islami berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tren perdagangan global. Bahkan, negara-negara yang penduduk muslimnya relatif kecil tak mau ketinggalan, mereka ikut serta meramaikan persaingan pasar produk halal, sebut saja Brazil, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Perkembangan pasar fesyen islami ini juga sangat dipengaruhi oleh kalangan Kelas Menengah Muslim karena menguatnya pola konsumsi kelas menengah muslim yang berorientasi terhadap gaya hidup hidup halal dan jika merujuk pada analisis pakar *marketing*, Philip Kotler, pasar terbesar itu ada tiga yaitu anak muda, perempuan dan *netizen* yang biasa disingkat YWN (*youth, women, netizen*). Anak muda jadi pasar strategis karena mereka inovatif dan adaptif terhadap produk baru. Perempuan jadi pasar strategis karena merekalah yang mengelola keuangan rumah tangga, dan *netizen* juga menjadi penentu lantaran mereka terlibat langsung dalam perbincangan perihal produk tersebut di media sosial. Jika tiga pasar besar tersebut dikombinasikan dengan konsep kelas menengah muslim maka terbentuklah karakter kelas menengah muslimah, yakni kelompok muslimah urban yang sudah sadar media sosial dan memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi.

Hal ini sejalan dengan hasil riset skripsi saya yang membahas mengenai Kelas Menengah Muslim, yang dimana posisi Kelas Menengah

Kelas Menengah Muslim tidak hanya menjadi pasar terbesar produk halal, namun juga sekaligus menjadi penentu perubahan gaya hidup halal (halal lifestyle) dalam masyarakat.

Muslim sangat strategis dalam mempengaruhi gaya hidup halal, termasuk secara spesifik mempengaruhi pasar produk halal. Saat ini, harus diakui bahwa dalam konteks Indonesia, kelas menengah merupakan pasar paling potensial mengingat secara demografis merupakan kelompok kelas yang jumlahnya paling banyak di Indonesia.

Secara lebih khusus, pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa kelas menengah muslim diperkirakan akan menjadi pasar terbesar ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal. Berkaitan dengan itu, ada empat sektor yang disebutkan pemerintah sebagai potensi besar industri halal yang diprakarsai oleh kelas menengah muslim, yaitu sektor industri produk halal, sektor industri keuangan syariah, sektor dana sosial syariah, dan penguatan kegiatan usaha syariah

Tidak mengherankan jika kelas menengah muslim dipandang sebagai potensi terbesar ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil temuan Alvara Research Center, masyarakat kelas menengah muslim Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1999, penduduk kelas menengah mencapai kisaran 45 juta jiwa atau sebanyak 25% dari total populasi, lalu pada tahun 2009 mencapai 57% dari total populasi, pada tahun 2010 menjadi 207 juta jiwa.

Kelas Menengah Muslim tidak hanya menjadi pasar terbesar produk halal, namun juga sekaligus menjadi penentu perubahan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dalam masyarakat. Sekalipun, yang

menjadi perdebatan bagi sejumlah kalangan adalah apakah *halal lifestyle* itu sejalan dengan kesadaran halal (*halal awareness*). Dalam artian, bisa jadi seseorang mengikuti gaya hidup halal hanya karena mengikuti tren, bukan lantaran menyadari bahwa aspek halal itu sangat penting bagi kehidupan seorang muslimah. Dengan pandangan tersebut, sangat mungkin label halal hanya menjadi alat komoditas untuk mendulang pasar besar muslimah kelas menengah.

Bahkan, jika kita merujuk data *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, industri fesyen muslim Indonesia berada pada posisi 3 besar dunia. Indonesia hanya kalah dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Kementerian Perindustrian RI juga turut mengamini data tersebut dengan menyatakan bahwa perkembangan industri halal di tanah air dua tahun terakhir ini semakin tumbuh pesat dan eksponensial.

Menariknya, industri halal fesyen muslim mendapatkan perhatian khusus dari Trade Expo Indonesia (TEI) 2021. Indonesia diyakini siap menjadi pusat industri halal dan kiblat fesyen muslim dunia di masa yang akan datang, apalagi pangsa pasar produk halal di dunia semakin besar. Sebagai salah satu upaya mendorong upaya mengisi pasar Indonesia tersebut, TEI 2021 sampai menyediakan platform khusus untuk mempromosikan produk halal. Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan *Jakarta Muslim Fashion Week* yang digelar secara *back to back* dengan TEI.

Industri halal pun berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Besarnya

jumlah konsumen produk halal di Indonesia dapat menumbuhkan potensi pengembangan industri halal untuk memasok permintaan. Apalagi, jika dilihat secara demografis, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya, pasar produk halal sangat menjanjikan bagi ekonomi Indonesia.

Salah satu bukti dampak positif fesyen islami bagi ekonomi nasional bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh *The State Global Islamic Economy* (2021). Laporan tersebut mengungkapkan bahwa konsumsi busana muslim Indonesia mencapai 20 miliar USD dengan tingkat pertumbuhan mencapai 18,2% per tahun. Lebih-lebih, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memasukkan industri fesyen islami sebagai salah satu bagian dari sektor ekonomi kreatif (ekraf). Ke depan, tentu saja, sektor industri fesyen halal diperkirakan akan berkontribusi penting bagi geliat industri kecil dan menengah di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenparekraf, sektor ekonomi kreatif menyumbang 1.100 triliun rupiah pada Produk Domestik Bruto (PDB), di mana subsektor utama didominasi oleh fesyen, kuliner, dan kriya. Capaian itu hanya kalah dari AS dengan kekuatan Hollywood dan Korea Selatan dengan magnet K-Pop. Dengan besarnya konsumen muslim, dapat dikatakan bahwa busana muslim merupakan salah satu penentu pasar fesyen yang berpotensi berkontribusi besar bagi PDB nasional Indonesia.

Dilema Ideologis

Kendati demikian, ada tantangan besar di tengah euforia pasar fesyen muslim, yakni pentingnya keseimbangan antara peningkatan ekonomi di satu sisi dan menjaga spiritualitas di sisilain. Secara ekonomi, berbagai data di atas telah menunjukkan bahwa pasar fesyen dan Industri halal di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan sangat menguntungkan. Namun

begitu, hal itu tidak menjamin bahwa peningkatan tren busana muslim berjalan beriringan dengan peningkatan spiritualitas.

Dari segi kandungan nilainya, busana muslim telah bergeser. Semula, busana muslim ditujukan untuk kebutuhan spiritual, yaitu sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang mewajibkan perempuan muslim menutup aurat. Tapi, kini, busana muslim sudah mengarah sebagai bagian dari gaya hidup muslim. Dari sini muncul apa yang disebut sebagai gaya hidup halal (*halal life style*). Gaya hidup halal sebenarnya adalah hal yang positif karena merupakan bagian dari ekspresi beragama dalam pergaulan sosial masyarakat muslim.

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika gaya hidup halal itu hanya menjadi simbol dan pencitraan agar terlihat keren dan kekinian belaka, tanpa ada kesadaran sebagai bagian dari pengalaman ajaran Islam. Inilah yang lantas dimanfaatkan oleh produsen produk-produk halal dengan mem-*branding* produk-produknya agar memiliki kesan islami dengan tetap mengkombinasikan ciri khas kekinian, baik dari segi desain, warna, maupun kegunaan.

Terlepas dari dilema ideologis itu, tak diragukan lagi bahwa industri halal di Indonesia, termasuk industri fesyen islami, mengalami peningkatan luar biasa sehingga sangat menjanjikan dari segi ekonomi. Namun, yang lantas menjadi pekerjaan rumah yaitu bagaimana agar peningkatan industri halal itu dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran beragama.

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kiblat fesyen islami dunia. Saat ini, Indonesia hanya kalah dari UEA dan Turki sebagai *trendsetter* busana muslim dunia. Peluang itu akan sangat berharga jika produsen tak hanya berpikir soal keuntungan material belaka, namun juga peningkatan spiritual masyarakat muslim. Tapi, mampukah keseimbangan itu tercapai? Saya sendiri sulit menjawabnya.

KEKERASAN SEKSUAL DAN TUMBUHNYA KESADARAN PEREMPUAN

Dwi Putri Ayu

Peneliti di Rumah Baca Cerdas
Institute A. Malik Fadjar



Perbincangan tentang kasus kekerasan seksual masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Tetapi, di sisi lain, kekerasan seksual dijadikan topik privat, sekadar selentingan gosip dari mulut ke mulut di sudut-sudut tongkrongan warga.

Nahasnya, sorotan masyarakat tidak ditekankan pada pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman setimpal. Namun, lebih kepada korban yang dianggap tidak mampu menjaga diri dengan baik.

Implikasi dari perspektif yang berkembang di masyarakat tersebut akhirnya membawa kasus kekerasan seksual selalu diukur dengan indikator moralitas. Bagi masyarakat, jika perempuan mampu menjaga dirinya dengan baik, berpakaian dengan santun, berperilaku secara sopan, maka kekerasan seksual tidak akan

terjadi. Sementara ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat menjulukinya tidak bermoral.

Padahal, selama ini telah terbukti, bahwa pakaian dan perilaku korban bukan faktor penentu terjadinya kekerasan seksual.

Berbagai kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang belakangan memenuhi media membuktikan bahwa perempuan dengan hijab dan rok panjang masih rentan menjadi korban. Jika selama ini kita menganggap kekerasan seksual, utamanya pemerkosaan, hanya menimpa perempuan dengan rambut terurai dan pakaian serba mini, sungguh ini adalah anggapan instingtif dan keliru.

Kasus yang masih ramai disorot ialah kasus pencabulan santriwati pondok pesantren Shiddiqiyah,

Jombang, Jawa Timur dengan pelaku Moch Subchi Azal Tsani, alias Mas Bechi. Mas Bechi akhirnya harus mendekam di penjara karena kasus pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual tiga santriwati di pondok pesantren tersebut.

Jika kita mengingat, saat pertama kali kasus ini diungkap, warga sekitar pondok pesantren kukuh menyangkal atas terjadinya kasus tersebut. Mereka menilai anak pengasuh pondok pesantren tidak mungkin melakukan pencabulan.

Memang, di level kultural, kekerasan seksual selalu ditopang oleh budaya *victim blaming* atau menyalahkan korban, dan dibenarkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa. Asimetris kekuatan sosial membuat pihak-pihak pemegang kekuasaan merasa berhak melakukan apa pun pada orang-orang dengan strata di bawahnya, termasuk menjadikannya objek seksualitas.

Akibatnya, saat kekerasan seksual terjadi, alih-alih mendapatkan ruang aman dan perlindungan, para korban justru dirundung, dihina, dan disalahkan. Para korban terkurung seorang diri, bergelut dengan kesakitan dan dihantui perasaan bersalah.

Menanggapi kasus kekerasan seksual yang kian marak, bijak kiranya untuk melepaskan berbagai atribut-

atribut sosial dalam penanganannya secara hukum. Misalnya jika pelaku ternyata adalah anak seorang kiai atau tokoh masyarakat, maka atribut tersebut bukan hal yang perlu untuk disorot. Toh, semua individu sama kedudukannya di mata hukum.

Terlepas dari keruhnya dinamika di atas, realitas bahwa akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual yang ramai diperbincangkan publik, menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit korban kekerasan seksual mulai berani melaporkan kasus ke pihak berwajib. Diyakini, ketika ada satu saja korban yang berani bicara maka akan mendorong korban lain yang selama ini bungkam untuk turut angkat suara.

Lebih-lebih, dewasa ini semakin banyak lembaga pengaduan kasus kekerasan seksual yang responsif, serta mengedepankan perspektif penyintas (*survivor-centered*). Lembaga-lembaga tersebut siap menjamin keamanan dan keselamatan penyintas. Hal ini membuat penyintas lebih percaya diri untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Keberanian para penyintas juga semakin besar sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Melalui UU ini, para penyintas optimis untuk mendapatkan keadilan karena mereka dilindungi payung hukum yang komprehensif. UU TPKS ini diharapkan mampu menjadi poros hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual yang selama ini banyak luput dari jerat hukum.

Tumbuhnya Kesadaran

Di tengah tumbuhnya kesadaran publik akan pentingnya membicarakan kekerasan seksual, perlu diketahui

bahwa tantangan terbesar bagi korban adalah sulitnya mendapatkan dukungan dan perlindungan orang sekitar.

Dukungan dan perlindungan di sini tidak selaluberartipenanganan hukum. Namun, lebih kepada dukungan moral layaknya seorang teman atau keluarga. Kendati melaporkan kasus kekerasan seksual adalah hal yang penting, namun pemulihan korban jauh lebih utama.

Survei yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID tahun 2020 mengungkap, sebetulnya mayoritas responden tahu ke mana harus melapor saat kekerasan seksual terjadi (94,4% responden) dibanding dengan yang tidak tahu harus melapor ke mana (6,6%).

Dari mayoritas responden yang mengetahui ke mana harus melapor tersebut, persentase terbesar lebih memilih untuk mengadu ke keluarga (43,8%) sebagai orang terdekat yang dipercaya. Selebihnya memilih untuk melapor kepada pihak berwajib dan lembaga lain seperti polisi (41,6%), Komnas perempuan (5,1%), RT/RW setempat (4,9%), dan lainnya (4,6%).

Dapat dipastikan keluarga masih menjadi pilihan utama korban kekerasan seksual untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya, tugas terbesarnya adalah bagaimana keluarga atau teman yang dipercaya mampu menyediakan ruang aman.

Ada banyak cara, tentu, yang pertama kali harus dilakukan adalah mendengarkan cerita korban dan parafrase pernyataannya. Sebagai pendengar, perlu untuk menyadari bahwa korban memiliki trauma dan krisis kepercayaan diri, maka menunjukkan empati dan rasa percaya atas cerita korban dapat memberikan

rasa aman.

Selebihnya, ketika korban sudah pulih dan mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala risiko, maka menawarkan penanganan hukum bisa menjadi saran. Dengan tetap menyadari bahwa keputusan untuk melaporkan kasus tetap berada di tangan korban.

Andil Dunia Maya

Selain di dunia nyata, dukungan atas korban kekerasan seksual di dunia maya juga kian gencar disuarakan. Kalangan perempuan milenial yang melek teknologi menggunakan media sosial sebagai alternatif ruang mengadu.

Polanya hampir selalu sama. Dimulai dari kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan namun tidak ditangani secara baik oleh pihak berwajib. Alhasil, penyintas tidak mendapatkan keadilan sedangkan pelaku bebas berkeliaran dan berpotensi melakukan kejahatan yang sama pada orang lain.

Atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapat, para penyintas memilih untuk membagikan perjalanan kasusnya di media sosial, fenomena ini lazim disebut "*speak up*".

Untungnya, setiap kali ada kasus yang digiring ke media sosial, perempuan milenial lain memberikan dukungan secara utuh dengan cuitan positif dan penuh empati. Tak lain, hal ini adalah bukti bahwa kesadaran untuk saling mendukung sesama perempuan telah tumbuh. Barangkali benar, pengalaman sosial, biologis, dan spiritual perempuan yang dipenuhi stigma, hanya mampu dipahami oleh sesama perempuan, "*women supporting women.*"

PEREMPUAN BUKAN PROPERTI PELECEHAN



Aisyah Citra Wangsa
Mahasiswa Jurusan Ilmu
Komunikasi FISIP
Universitas
Muhammadiyah Malang

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, namun dapat pula melalui ucapan/lisan, permintaan atau bahkan melalui isyarat maupun perilaku lain bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan serta terintimidasi. Kasus pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang sangat serius. Tingginya angka kriminalitas dalam kasus pelecehan seksual semakin melonjak dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bentuk pelecehan seksual yang terjadi mulai dari kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, hingga berupa lelucon atau candaan verbal yang bersifat memermalukan dan melecehkan. Kasus pelecehan seksual terus terjadi ditengah masyarakat. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun seperti di tempat kerja, di jalan, di universitas, di sekolah, di angkutan umum atau bahkan dirumah.

Perempuan merupakan subjek paling atas dalam kasus korban pelecehan seksual. Artinya, kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan jauh lebih tinggi dibanding yang terjadi pada laki-laki. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memunculkan celah adanya pelecehan bisa terjadi. Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan disebabkan atas lemahnya moral seorang pria dalam memandang dan memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang lemah.

Korban pelecehan seksual seringkali disalahkan dalam kasus ini, padahal adanya kasus pelecehan terhadap perempuan dapat terjadi tergantung bagaimana cara pandang pada perempuan. Kurangnya moralitas pada kepribadian seseorang merupakan faktor pemicu dari adanya pelecehan seksual. Kasus ini terjadi terus menerus sehingga memunculkan rasa tidak aman pada perempuan dimanapun mereka berada.

Pelecehan seksual telah dianggap sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan terkait tubuh dan juga seksualitas terutama bagi perempuan yang selalu membutuhkan perhatian penuh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Maka dari itu, perempuan merupakan pihak yang paling rentan mendapat pelecehan seksual, namun mirisnya mereka juga tidak jarang disalahkan dengan berbagai persoalan yang tidak logis dan merenggut kebebasan mereka untuk bersosialisasi dan mengekspresikan diri.

Kurang adanya pemahaman yang sama di antara penegak hukum, pelaku, masyarakat serta pemerintah mengenai persoalan pelecehan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran

Bentuk pelecehan seksual dapat terjadi mulai dari berupa kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, hingga berupa lelucon atau candaan verbal yang bersifat mempermalukan dan melecehkan perempuan.

terhadap HAM dan salah satu kasus serius yang harus segera ditangani. Melihat saat ini tengah marak dan semakin banyak adanya kasus pelecehan yang terjadi, bahkan di lingkungan yang dianggap aman seperti sekolah atau rumah sekalipun.

Hampir semua perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi sangat variatif, mulai dari pelecehan secara sentuhan fisik maupun pelecehan verbal. Tindakan pelecehan secara fisik yang sering terjadi seperti menyentuh atau meraba bagian tubuh, mencium, dan lain sebagainya. Sedangkan pelecehan non-fisik berupa gambaran, tulisan maupun perkataan.

Pelecehan seksual secara fisik sering kali terjadi di berbagai tempat seperti di dalam angkutan umum, halte, bandara, sekolah, atau tempat kerja. Para pelaku tindak pelecehan seksual tidak mementingkan waktu ataupun situasi keramaian, jika mereka melihat adanya peluang untuk melakukan aksinya maka mereka akan melakukannya. Korban pelecehan seksual di tempat umum biasanya hanya bisa terdiam dan takut.

Tidak banyak korban pelecehan seksual di tempat umum yang memiliki keberanian untuk *speaks up* atau melaporkan kepada pihak berwajib. Mereka memilih diam karena beberapa

hal, yang pertama mereka malu, mereka malu jika masyarakat tahu dan mendapat perlakuan atau pandangan yang berbeda dari masyarakat. Kedua, para korban takut jika disalahkan atas apa yang menimpa mereka.

Dampak yang diterima oleh korban kekerasan seksual bukanlah persoalan yang sepele. Korban yang mengalami pelecehan akan mengalami trauma yang berat, ketakutan yang terus menerus dalam waktu yang cukup lama, kehilangan kepercayaan diri, susah mempercayai orang lain, hingga depresi yang tinggi karena korban akan terus terbayang akan pelecehan seksual yang ia alami.

Banyak kasus pelecehan seksual yang menyalahkan korban atas kejadian memprihatinkan ini. Beberapa dari korban pelecehan yang berani membuka suara atas pelecehan seksual yang mereka alami, mendapat tanggapan yang kurang baik dari masyarakat. Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa pelecehan dapat terjadi karena salah dari korban. Mulai dari penampilan hingga tingkah laku yang dianggap mengundang pelecehan seksual.

Pameran berjudul *"is it my fault?"* yang digelar di Ibu Kota Belgia, merupakan salah satu upaya untuk membantu menyuarakan kasus para korban pelecehan seksual yang disalahkan atas pakaian yang mereka

kenakan. Dalam pameran ini dipajang beberapa pakaian seperti piyama, pakaian lari, gaun bahkan pakaian anak-anak yang dikenakan korban saat mendapat perlakuan pelecehan seksual.

Hal ini menunjukkan bahwa penampilan bukanlah faktor yang mendukung pelecehan seksual dapat terjadi. Korban pelecehan kerap disalahkan dan mendapat berbagai tekanan dari masyarakat sekitar yang mengakibatkan mereka enggan untuk melapor pada pihak berwajib. Para korban memilih untuk diam dan merahasiakan apa yang telah mereka alami.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, data kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender pada perempuan di tahun 2021 sebanyak 338.496 kasus. Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual masih termasuk relatif tinggi.

Perempuan merupakan objek yang dipandang lemah dibanding dengan laki-laki. Hal ini adalah akar dari masalah yang menyebabkan mengapa perempuan lebih rentan mendapat pelecehan seksual. Pandangan laki-laki yang mempunyai maksud tersendiri pada perempuan mendorong pelaku untuk melakukan tindak pelecehan seksual demi mendapat kepuasan atas

apa yang mereka inginkan.

Kasus pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik secara langsung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, pelecehan seksual di ranah personal sebanyak 1.149 kasus (25%), sementara di ranah komunitas kasus pelecehan seksual di dunia siber menempati urutan tertinggi yaitu berjumlah 875 kasus (69%) dan kasus kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus (8%).

Media sosial merupakan *platform* digital yang cukup luas untuk menjangkau seluruh dunia. Sayangnya, pemanfaatan media sosial tidak selamanya digunakan dengan bijak. Berdasarkan data yang diperoleh dari webinar literasi yang diselenggarakan oleh Kominfo, di Indonesia terdapat sebanyak 38% responden yang mengalami kekerasan berbasis gender *online*.

Data tersebut membuktikan bahwa pelecehan dalam dunia siber atau *online* menempati urutan pertama sebagai kasus pelecehan yang paling banyak terjadi. Menurut laporan yang dikeluarkan dari State Of The World Girls, terdapat 58% anak dan remaja perempuan di dunia yang mengalami pelecehan dalam *platform online*. Sebanyak 96% anak dan remaja perempuan di Indonesia telah mengalami dan mendengar bahwa temannya mendapat perlakuan ataupun ancaman pelecehan seksual di media sosial.

Pelecehan yang paling umum terjadi melalui beberapa media sosial seperti pada Instagram (23%), WhatsApp (14%), Snapchat (10%),

Twitter (9%) dan TikTok (6%). Bentuk pelecehan yang terjadi secara *online* dapat berupa komentar yang bersifat seksual, candaan yang bersifat seksual, komentar yang mengandung unsur *body shaming*, pesan singkat dan ancaman seksual yang tidak diinginkan.

Korban pelecehan seksual berbasis *online* akan mendapatkan dampak yang sangat buruk dan mempengaruhi keadaan psikologisnya. Ciri secara umum bagi anak yang mendapat perlakuan tindak pelecehan seksual diantaranya mereka akan mengisolasi diri dan menghindari pembicaraan panjang dengan teman secara *online* atau telepon, menyembunyikan layar ponsel ataupun laptop, mengalami *panic attack* dan merasa ketakutan dengan individu tertentu.

Kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang terbilang cukup tinggi yang terus terjadi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual hanya biasa ditangani dan dihentikan atas kesadaran dari diri pelaku sendiri untuk memandang perempuan bukan sebagai objek yang rendah.

Pembentukan moralitas sejak dini dan seks edukasi merupakan dua hal yang harus mulai ditanamkan dalam diri setiap individu. Penting bagi setiap individu untuk memahami apa dan bagaimana dampak yang akan dialami seseorang ketika mendapat tindak pelecehan seksual. Begitu pula bagi korban pelecehan seksual agar berani untuk bersuara mengenai pelecehan yang mereka alami.

Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk mencegah dan melindungi buah hati mereka

dari kejahatan pelecehan seksual. Karena remaja dan anak perempuan merupakan korban yang sangat rentan. Dengan adanya *parenting*, diharapkan orang tua dapat memberi ruang terbuka bagi anaknya untuk menceritakan segala kejadian yang mereka alami tanpa rasa takut.

Sehingga dengan banyaknya masyarakat yang *aware* dengan kasus tindak pelecehan seksual, maka kasus ini akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah serta adanya hukum yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual. Dengan begitu maka kebebasan perempuan untuk berekspresi baik melalui penampilan maupun tindakan akan tercipta kembali.

Tindak kekerasan berupa pelecehan seksual adalah kejahatan yang merenggut HAM dan kebebasan perempuan. Para perempuan menjadi takut dan tidak nyaman berada di tempat umum yang ramai. Kekhawatiran dan rasa tidak tenang akan selalu menghantui mereka baik para korban maupun individu lain yang *aware* dengan kasus ini.

Pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan serius yang harus diperangi bersama. Apapun yang mendasari terjadinya kekerasan seksual bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan adanya. Para korban pelecehan seksual membutuhkan tempat dan wadah untuk mereka bercerita dan menyuarkan perasaan mereka. Tanpa rasa takut akan dihakimi, disalahkan ataupun dipermalukan.

MEMBACA PEMBELAAN AKYOL PADA KEBEBASAN



AS Rosyid
Direktur eksekutif The Reading Group
for the Social Transformation (RGST);
Penikmat Novel dan Tinggal di Bima

Mustafa Akyol adalah salah seorang sarjana kenamaan asal Turki yang tekun mengadvokasi ide-ide kebebasan dalam Islam. Sayang sekali saya baru mengoleksi buku-bukunya. Saat ini saya sedang membaca “*Why, As a Muslim, I Defend Liberty*” (Kenapa, Sebagai Seorang Muslim, Saya Membela Kebebasan). Buku berbahasa Inggris ini tergolong ringan dan mudah dipahami. Saya berniat menerjemahkannya suatu hari nanti, tapi untuk sementara saya tulis dulu semacam refleksi kecil atas buku ini, tepatnya atas bab-bab awal yang sudah saya baca.

Akyol, pada buku ini, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kebebasan (*liberty*) beragama. Pengertian kebebasan yang digunakan Akyol merujuk pada *The New Oxford American Dictionary*, yakni “kondisi terbebasnya seseorang di

dalam masyarakatnya dari berbagai bentuk pemaksaan oleh suatu otoritas atas cara hidup seseorang, cara berperilakunya atau pandangan politiknya.” Singkatnya, kebebasan adalah kondisi *tiadanya paksaan otoriter*.

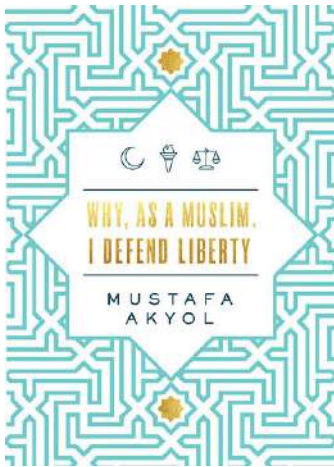
Konteks yang diajukan Akyol, sebetulnya, jamak di kalangan sarjana muslim. Namun, bagi pembaca yang awam akan literatur studi Islam kontemporer, contoh-contoh yang dikutip Akyol mungkin agak “menggangu”. Di awal, Akyol mengkritik negara yang memaksa, lewat hukum negara dan elit agama, warga perempuan menggunakan hijab dan sigap menghukum setiap perempuan yang memilih berpakaian dengan cara yang berbeda.

Paksaan itu bersifat otoritarianistis dan menurut Akyol ia dapat menyerang siapa saja. Di negara-negara Barat, larangan menggunakan hijab telah merugikan Umat Islam. Akyol menolak

dan mengkritik setiap jenis paksaan dalam beragama, siapapun pelaku dan korbannya. Memang idealnya tiap orang menghayati ajaran agama dan mengamalkannya secara sukarela.

Dari sini tampak Akyol membicarakan problem yang lebih makro, yakni bahaya otoritarianisme, oleh negara atau organisasi keagamaan dengan preferensi agama atau mazhab tertentu. Dampaknya sangat luas: persekusi tanpa pengadilan, rusaknya dialog, dan hilangnya kesempatan untuk menghargai perbedaan. Akyol menganggap otoritarianisme berbahaya karena dengan klaim “pemegang otoritas” suatu kelompok dapat melarang kegiatan atau menutup paksa berbagai fasilitas (lembaga penelitian, lembaga pendidikan, rumah ibadah, kegiatan ibadah, forum diskusi, forum seni budaya) dengan anggapan mereka sedang membebaskan umat dari dosa tentu saja dosa versi mereka sendiri.

Mereka menentukan versi pengetahuan yang sah, menyingkirkan



Dua orang muslim bahkan bisa berbeda pendapat karena satu dalil sahih yang sama namun berbeda interpretasi! Ini menarik karena sepanjang sahih riwayatnya dan sesuai dengan konteks aslinya, suatu dalil dapat menjadi hujjah dan orang yang berdalil dengannya layak dihormati dan dilindungi kendati pun berbeda dari otoritas.

versi lain dan memaksa masyarakat menerimanya, walaupun paksaan itu dilakukan dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Kritik Akyol pada otoritarianisme, pada setiap bentuk paksaan dalam beragama, menurutnya telah sesuai dengan visi al-Qur'an. Mungkin saja kritik Akyol akan ditanggapi dengan senewen oleh banyak pihak, sebab jamak dipahami bahwa yang haram itu paksaan untuk masuk *ke dalam* Islam, namun *di dalam* Islam umat boleh dan bahkan perlu dipaksa untuk mengamalkan ajarannya. Namun, Akyol juga menolak logika otoritarian tersebut karena mengandung dan memicu problem.

Problem pertama adalah standar ganda, ini tampak pada larangan konversi/pindah agama. Fikih menganjurkan hukuman mati bagi murtadin (biasanya dilakukan oleh pihak berwenang). Hukum ini bersifat standar ganda karena terkesan Islam mengakui kebebasan manusia untuk mengalami pergumulan batin dan melakukan konversi-ke-dalam, tapi kebebasan untuk mengalami pergumulan batin dan melakukan konversi-ke-luar tidak diakui.

Bahkan, muslim-karena-keturunan (*muslim by birth*, menjadi muslim tanpa didahului pergulatan intelektual/batin) tetap tidak memiliki kebebasan untuk pindah agama, kendati sangat mungkin mereka mengalami pergumulan batin dan mempertanyakan kebenaran agama, atau sekadar tidak lagi merasakan kedamaian sebagai

pemeluknya.

Sebuah analogi dikutip Akyol sebagai contoh yang keliru dalam membenarkan larangan murtad (sekaligus membenarkan paksaan *di dalam* agama): "Seseorang tidak boleh dipaksa menjadi warga negara lain, tapi sekali ia pindah ke negara yang dimaksud, ia wajib menaati hukum-hukumnya." Logika ini keliru mencocokkan dua entitas yang berbeda.

Kenyataannya negara adalah kontrak sosial yang umumnya tidak menghukum mati warga karena pindah kewarganegaraan. Kekuatan pun negara terbatas: negara, atau otoritas sosial lainnya, hanya dapat memaksa warga melaksanakan kewajiban sosial, bukan memaksa beriman. Iman tak dapat dipaksakan. Hati tak dapat diberedel. Mulut bisa menyatakan A, tapi A akan batal sebagai A bila hati, yang tidak dapat diberedel itu, meyakini B.

Problem kedua adalah stigmatisasi. Mereka yang memiliki pilihan kebenaran, pilihan keyakinan dan pilihan pandangan politik yang berbeda dari versi kebenaran otoritas akan distigma sebagai pendosa, munafik, atau minimal telah tercuci otaknya oleh ide-ide Barat.

Akyol sendiri yakin kebebasan tidak bertentangan dengan Islam. Keyakinan Akyol mengingatkan saya pada satu ciri utama masyarakat Islam, yakni demokratis. Individu dalam Islam untuk memilih suatu pemikiran/tindakan berdasarkan dalil/referensi

yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Islam, referensi moral sangatlah kaya dan beragam.

Dua orang muslim bahkan bisa berbeda pendapat karena satu dalil sahih yang sama namun berbeda interpretasi! Ini menarik karena sepanjang sahih riwayatnya dan sesuai dengan konteks aslinya, suatu dalil dapat menjadi hujjah dan orang yang berdalil dengannya layak dihormati dan dilindungi kendati pun berbeda dari otoritas. Akyol mengkritik otoritarianisme karena sangat berpotensi memberangus kebebasan berdinamika.

Karena itulah Akyol mendukung saran John Locke agar negara sebaiknya bersikap netral-agama (*religiously neutral*). Kenetralan menjaga negara agar tidak terlalu mengatur ekspresi keagamaan warga, sepanjang ekspresi keagamaan itu tidak melanggar hukum. Tugas negara adalah melindungi dan memberi ruang. Bila negara menetapkan satu agama/aliran/keyakinan sebagai versi resmi kebenaran, negara akan berakhir dalam pemaksaan dan penghancuran versi lain sehingga timbul gesekan sosial sosial yang lebih hebat.

Dalam konteks sehari-hari, sebagian besar muslim mungkin akan tergoda untuk berpikir bahwa paksaan itu memang perlu. Tiga dalil yang kerap diulang sebagai contoh bolehnya paksaan adalah: (1) hadis riwayat

Bukhari dan Muslim tentang geramnya Nabi pada orang-orang yang enggan salat berjamaah di masjid hingga rumah mereka sebetulnya ingin sekali dibakarnya; (2) hadis riwayat Abu Dawud tentang anjuran Nabi untuk mulai mengajarkan salat pada anak sejak ia berusia 7 tahun dan boleh memukulnya apabila sejak usia 10 ia meninggalkan salat; (3) surat an-Nisa': 34 tentang bolehnya "mendidik" istri yang membangkang dalam tiga tahap yang terakhir boleh memukulnya.

Bila diperhatikan dengan seksama, tiga dalil tersebut memiliki kesamaan, yakni bahwa *kekerasan merupakan cara yang paling tidak diinginkan*. Pada dalil pertama, Nabi hanya mengungkapkan kegeramannya, namun pada akhirnya ia memilih bersabar dan menekuni 1001 cara kreatif dalam berdakwah.

Pada dalil kedua, Nabi hanya mengatakan "boleh", bukan harus, dan seperti jamaknya teladan lain dari beliau, orangtua perlu memilih bersabar dan menekuni 1001 cara kreatif dalam mendidik anak. Pada dalil ketiga, sejumlah tafsir menerangkan 1001 ikhtiar yang bisa dilakukan oleh suami sebelum sampai ia harus memukul; pukulan itu pun diatur sampai-sampai itu tak cocok lagi disebut "pukulan".

Penyelidikan seksama agaknya tidak mungkin menjadi tren di kalangan muslim konservatif yang menyukai ide kontrol-paksa. Akyol, yang percaya pada nilai kebebasan, mengingatkan dua konsekuensi yang mungkin terjadi bila kebebasan itu

dirusak oleh kediktatoran religius. *Pertama*, kemunafikan: manusia terpaksa menipu sekitarnya hanya agar selamat dari kekerasan yang pasti mengikut dalam agenda kontrol-paksa. *Kedua*, kejenuhan: paksaan hanya akan mendorong sikap tidak respek pada agama dan pada akhirnya memicu keraguan. Akyol mengamati, gelombang ateisme baru di Timur Tengah muncul lebih banyak di negara-negara dengan Islam sebagai agama resmi tapi di saat yang sama kehidupan warga jauh dari keadilan.

Akyol adalah sarjana yang telah mengamati berbagai masalah otoritarianisme pada banyak negara berpenduduk muslim dan mendapati versi wajah Islam yang sangat keras dan zalim, jauh dari slogan "rahmat bagi sekalian alam". Mungkin ia sedih dengan fakta-fakta lapangan itu, atau entahlah, tapi membaca laporan-laporannya saya dapat memaklumi konsistensinya menolak segala bentuk paksaan.

Saya sendiri percaya, misalnya dalam konteks pendidikan, yang kita perlukan bukanlah paksaan atau kekerasan, melainkan usaha terus menerus dan kreatif untuk menumbuhkan kecintaan seseorang pada syariat berikut hikmah-hikmahnya. Saya percaya beragama itu harus merupakan petualangan spiritual yang asyik dan khusyuk dalam tiap-tiap lembar pengalaman personal manusia. Ia tidak bisa dan tidak untuk dikedang.

SEMUA TENTANG RASA

Setiap saat kita harus siap melangkah. Melangkah untuk maju. Meskipun itu harus dibayar dengan meninggalkan sesuatu yang amat kita cintai. (Rasa, hal. 102)

Novel-novel Tere Liye selalu mudah ditemukan di pusat-pusat pertokoan buku di negeri ini. Satu hal yang membuat berbagai tulisannya banyak diminati, dia pandai memainkan emosi pembaca dengan realitas keseharian yang dialami masyarakat (anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa). Tak pelak, pengagumnya selalu memburu buku-buku terbarunya.

Kali ini, yang saya akan bahas adalah buku terbarunya berjudul “Rasa” (April 2022). Buku ini mengisahkan perjalanan persahabatan antara Lin dan Jo yang sangat menginspirasi. Begitu banyak badai yang dihadapi oleh keduanya. Namun mereka bisa menghadapinya hingga menjadi kisah yang sangat menarik untuk disimak. Selain itu Novel ini cukup menginspirasi bagi kita khususnya kalangan remaja untuk tetap semangat belajar dan berprestasi. Bagaimana kisahnya? Mari simak bersama.

Bang Tere Liye sebagai nama pena dalam setiap tulisannya yang bernama asli Darwis, menulis novel cerita dengan tokoh bernama Lin atau Linda. Lin, Sapaan akrab Linda, remaja yang

terkenal sebagai ramaja yang mandiri, periang, pintar, juga sering menjadi panutan teman-temannya.

Meski demikian dia juga dikenal keras kepala, egois juga jail kepada teman-temannya. Lin sebagai remaja yang aktif hobi membaca dan memotret dan selalu berfikiran positif, Karena baginya pikiran harus selalu positif, jikalau berfikiran negative akan berdampak pada sesuatu yang selalu negative.

Novel ini menceritakan tipikal Linda sebagai orang yang supel dan suka edit foto, bahkan bisa dibilang gatal tangan. Kalau fotonya sudah bagus, Lin hanya memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kalau nggak, ya lewat, nggak usah diapa-apain. Iseng otak-atik malah membuat foto itu jadi jelek. Lin penilai yang baik. Kalau tidak belajar, Lin lebih suka membaca untuk menghabiskan waktu. Yah, maklumlah, sejak kecil sudah dibiasakan Bunda seperti itu.

Lin suka memotret, Selain jago dalam bidang fotografer, Lin juga pintar dalam pelajaran Kimia dan ikut seleksi ICO (International Chemistry Olympic). Gadis ceria ini ketua LiFo (Liga

Fotografi) di SMA 1, tinggal bersama bunda dan kakaknya, Kak Adit.

Selain itu Lin mempunyai sahabat yang sering disapa JO. Sahabat terbaik Lin sejak masuk SMA 1. Anak orang kaya di Jakarta, tapi sikapnya bumi dan sangat sederhana, bahkan saking sederhananya, Jo pulang pergi sekolah juga masih mau naik angkot. Selain terkenal dengan kesederhanaannya dia selalu juara di kelas, Jo jago banget jika berurusan dengan mata pelajaran Matematika.

Penulis mengisahkan dalam novelnya tentang Lin dan Jo, dua sahabat yang saling melengkapi. Jo si juara 1 di kelas, dan Lin si juara 2 di kelas, mereka duduk satu bangku, pernah mengikuti Olimpiade Kimia, dan untuk ukuran kelas 11 kemampuan mereka sangat hebat. Persahabatan mereka sangat indah, tetapi hanya karena menyukai orang yang sama, persahabatan mereka diambang kehancuran.

Ragam Keindahan dan Pesan Moral

Tere Liye memang sangat lihai menyihir para pembacanya melalui karya-karyanya termasuk beberapa hal menarik bisa kita jumpai dalam novel ini, mulai dari cover nya, yang terlihat sangat ramai dan penuh warna yang juga menggambarkan isi dari karakter tokoh Lin dalam cerita ini.

Lin mempunyai karakter serba suka dengan hal-hal positif seperti fotografi, tanaman, juga memiliki taman bunga di rumahnya yang ditanami dengan bunga mawar serta anggrek langka, suka memakai topi butut dan mengikuti gaya fotografer idolanya, suka belajar dan jago pelajaran kimia, suka membaca buku, dan covernya

didominasi oleh warna cokelat.

Selain Cover yang begitu rame, novel *Rasa* ini memang memiliki rasa berbeda dari novel-novel pada umumnya. Di novel ini terasa sekali permasalahan dan kehidupan khas anak-anak remaja khususnya SMA. Ada banyak kata baru yang bisa kita jumpai, banyak kata-kata gaul, yang membuat novel ini terasa *fresh*, seru, asyik, dan menyenangkan, cocoklah untuk segmen pembaca anak remaja.

Bagi para pecinta novel remaja sepertinya rekomen banget buat anak-anak sesusia remaja. Juga bagi siapa pun yang suka membaca, novel ini sangat menyenangkan untuk dibaca. Bahkan kita akan diajak bernostalgia ke masa SMA, saat ketika pulang dan pergi naik angkot, sangat seru, meskipun tidak sama persis dengan apa yang dialami dalam buku ini, setidaknya dengan membacanya kita bisa banyak belajar dari Lin yang luar biasa, anak yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan serta selalu ceria dan semangat dalam menjalani kehidupan di tengah keterbatasan yang dimilikinya.

Sungguh, Lin berjanji. Dia akan menambah gula penerimaan, susu kata maaf, dan menaburkan krim ketulusan. Maka seperti batang cokelat yang lezat, semoga masalah ini lebih mudah dilewati. Melegakan. Damai. (halaman 415)

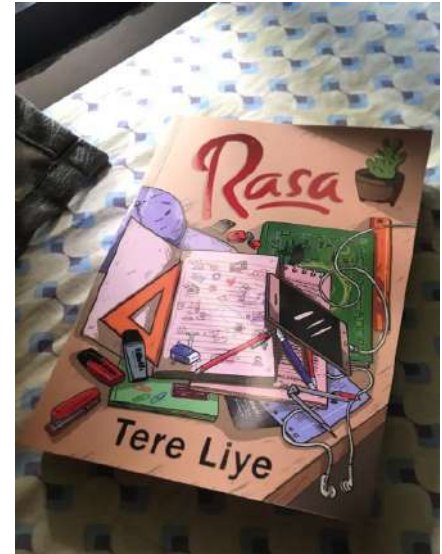
Meksipun ini novel remaja, namun masih sangat relevan bisa dinikmati oleh siapapun juga. Dengan judul *Rasa*, memang memberikan rasa dalam alur ceritanya yang penuh dengan ragam rasa. Mulai dari rasa senang, bahagia, ceria, kecewa, marah, bête, sebal, terluka, hingga menderita, tersaji dengan apik melalui karakter-karakter dalam buku novel ini.

Selain dari beberapa hal diatas ada juga pesan moral yang diajarkan dalam novel ini, yaitu hidup yang selalu mempunyai pilihan, memaafkan atau tidak. Ketika menghadapi rasa sakit hati yang membuat perasaan kita menderita. Maka, memaafkan adalah obat paling hebat yang bisa kita pilih, tentu saja jika kita memiliki keberanian untuk memaafkan. Sebab, memberi maaf bukan hal mudah, tapi siapa pun bisa melakukannya agar memperoleh kedamaian di hati, seperti yang dilakukan Bunda dan Lin, mereka memeluk erat rasa sakit, dan memaafkan masalah bertahun-tahun yang sudah menyakiti perasaan mereka, agar bisa berdamai dengan masa lalu.

“Kamu boleh tetap menyalahkan siapa saja. Itu manusiawi. Kamu juga boleh tetap menolak bertemu siapa pun. Itu juga amat manusiawi. Tetapi dengan mulai bersedia mengambil solusi, kita sudah melangkah ke tahap yang lebih baik. Kita tidak akan pernah bisa melupakannya, tetapi bisa memaafkannya. Kita bisa berdamai.” (halaman 403).

Tidak hanya kisah persahabatan Jo dan Lin yang seru, persahabatan dengan Putri yang pindahan dari SMA di Bali juga tak kalah seru, dia anak yang cukup misterius dan sering datang mengunjungi guru BK. Dari sini kita bertanya-tanya, kira-kira masalah apa yang dihadapi Putri? Sehingga harus bolak-balik ke ruang BK? Apakah ada hubungannya dengan Lin atukah Jo?

Lalu ada apa dengan Lin dan Jo tentang perasaannya? Dan Siapa lelaki yang Jo dan Lin sukai? Lantas bagaimana cara Lin dan Jo memperbaiki persahabatan mereka? temukan jawabannya dengan membaca buku *Rasa*.



Judul Buku :
RASA

Penulis :
Tere Liye

Penerbit :
PT Sabak Grip Nusantara

Tahun Terbit :
April 2022

Tebal Buku :
421 hlm. ; 20 cm.

ISBN :
978-623-97262-3-2

Kategori :
Novel Umum 15+ /
Remaja

Peresensi :
Amir rifa'I, Staff Pengajar
AIK UMM dan Penikmat
Novel

WARTAWAN DI PUSARAN POLITIK?

Rusdi Mathari, yang akrab dipanggil Cak Rusdi, merupakan wartawan, juga penulis produktif. Salah satu tulisannya yang dibukukan adalah buku dengan judul “Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan”. Dalam buku tersebut pada bagian pertama Cak Rusdi menceritakan banyak kejadian di masa lampau yang ia beri judul “Menjadi Pewarta”.

Ketika membaca bagian pertama ini kita dapat memahami kenapa buku ini diberi judul “Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan”, karena pada praktiknya tidak ada satu berita pun yang lahir tanpa campur tangan pemilik modal yang menggerakkan usaha media. Beberapa yang sekarang justru jumlahnya semakin banyak justru digerakkan oleh kepentingan politik tertentu. Tulisan ini sekaligus sebagai sebuah kritik atas konsep ideal sebuah media dan tugas pewarta yang harusnya bebas dari segala sarat kepentingan politik.

Buku dengan ketebalan 258 halaman ini merupakan kumpulan esai-esai karya Cak Rusdi dan masih pada bagian pertama tulisan ini, ia tulis sebagai gambaran rasa hormatnya kepada pendiri Kompas Grup, Jakob Oetama.

Bahkan Cak Rusdi menyimpan sebuah niat untuk suatu hari berkesempatan mewawancarai Jakob. Dalam esai ini, Cak Rusdi juga menceritakan bagaimana sikap Jakob sebagai pemilik modal sebuah media ternama yang turut menentukan arah pertumbuhan media di masa Orde Baru pada waktu itu.

Selanjutnya terdapat juga esai pada bagian awal bab pada buku ini, yang ditulis dengan menggambarkan tentang seorang penduduk Mesir bernama Wael dan lahirnya jurnalisme warga dalam sejarah dunia. Ada pula esai berjudul “Wartawan” yang menceritakan secara ringkas namun detail tentang perjalanan karier Cak Rusdi sebagai wartawan.

Adapun pada bab kedua, buku yang terbit di penerbit Buku Mojok menceritakan berbagai jenis keburukan wartawan dan dunia jurnalistik. Esai tersebut ada pada tulisan yang berjudul “Wartawan dan Kebohongan”, Cak Rusdi mengisahkan kebohongan seorang wartawan The Washington Post yang menghebohkan seluruh kota akibat cerita fiktifnya. Usut punya usut, cerita tersebut dilahirkan akibat tekanan terus menerus dari sang redaktur supaya reporternya menghasilkan sesuatu. Sekali lagi ada

unsur politik dalam dunia jurnalistik.

Pada bab selanjutnya buku ini banyak bercerita tentang berbagai peristiwa yang terjadi di media. Mulai dari penyerangan majalah Charlie Hebdo di Prancis, PHK massal wartawan Trust yang juga melibatkan dirinya, hingga Kematian Soeharto yang “menyusahkan” Tempo. Dalam esai berjudul “Bahkan Hingga Mati, Soeharto Tak Berpihak ke Tempo” Cak Rusdi menceritakan betapa tak hanya semasa hidup Soeharto sengit kepada Tempo, saat kematiannya pun Soeharto membawa majalah Tempo mengalami kerugian finansial hingga berujung konflik dengan warga Katolik.

Hingga pada bagian akhir dalam buku ini penulis mengabadikan beberapa cerita yang menerangkan kepada kita, akan seperti apa masa depan media di Indonesia. Salah satu tulisan yang mengakhiri buku ini adalah esai berjudul “Mari Menjual Agama Bu Hera” yang memotret kejadian pra-pilpres yang diwarnai dengan “gorengan” isu SARA, khususnya pada pilpres 2010 yang melibatkan identitas pribadi Herawati Boediono (istri cawapres Boediono).

Sebagai seorang penulis pemula ada banyak hal yang saya pelajari dari kumpulan esai Cak Rusdi ini. Dan



Judul Buku :
Karena Jurnalisme Bukan
Monopoli Wartawan

Penulis :
Rusdi Mathari

Jumlah Halaman :
258 hlm.

Penerbit :
Buku Mojok

Tahun Terbit :
2018

Peresensi :
Suryo, Staff AIK Universitas
Muhammadiyah Malang

harus kita akui bahwa menjadi penulis, khususnya penulis berita ternyata tidak harus selalu idealis-idealisme amat. Karena apalah artinya idealisme seorang wartawan di hadapan para pemilik modal dan para redaktur pendulang klik yang hanya mencari keuntungan pribadi, bahkan justru merusak citra dunia kepenulisan.

Hal-hal yang menarik dari buku ini adalah menyajikan informasi pengetahuan bagaimana media bekerja. Sehingga berita tidak hanya diurus bahkan dimonopoli oleh wartawan. Penting bagi kita untuk membedakan, mana saja berita-berita yang disebarluaskan yang didasari kepentingan redaksi, kepentingan perusahaan, kepentingan orang perorangan yang kebetulan menjadi pemimpin media atau kepentingan sumber berita itu sendiri.

Menariknya lagi, dalam buku yang setidaknya terdapat 38 artikel yang berasal dari status Facebook, catatan blog, materi pelatihan jurnalistik, juga liputan yang dilakukan oleh Rusdi Mathari ketika masih berkerja di media. Yang mana sebagian besar artikel merupakan ulasan dan kritik tentang media, baik di Indonesia maupun dunia global.

Selain itu pengalaman Cak Rusdi,

begitu sang penulis akrab disapa, selama lebih dari 25 tahun di dunia jurnalistik membuat buku ini menjadi begitu menarik, karena ia memberikan perspektif kepada publik bagaimana seorang jurnalis memandang secara kritis jurnalisme itu sendiri. Walaupun demikian kritikan-kritikan ia sampaikan tidak bermaksud untuk mengerdilkan jurnalisme, sebaliknya, yakni untuk menjaga martabat jurnalisme dan kebebasan pers.

Lebih lanjut, buku ini juga mengulas beberapa peristiwa terakut jurnalisme. Di antaranya tentang Wael Abbas, blogger asal Mesir yang memberitakan aksi-aksi aktivis Mesir jelang pemilu 2005; Peristiwa yang terjadi di Balibo Timor Leste pada 16 Oktober 1975; Isu agama saat pemilu era SBY; Charlie Hebdo; Obor Rakyat; hingga seputar buku 'Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Century' tulisan George Junus Aditjondro.

Walaupun buku ini terbit pertama tahun 2018 dan terus dicetak hingga tahun ini begitu relevan dengan keadaan jurnalis kita sekarang. Buku ini membawa kita berjalan ke berbagai suasana yang mungkin tidak dapat di temukan dari buku lain atau layar depan media, bahkan sekalipun ada hanya sedikit. Cak Rusdi dalam

karyanya ini juga menampakan kepedulian akan masa depan media di Indonesia yang sudah mulai terlihat kurang baik, bahkan saat ia masih menjadi pewarta.

Lantas bagaimana isi ulasan lengkap kritikan-kritikan Rusdi Mathari tentang dunia jurnalistik? Akankah kita menemukan simpul benang merah untuk mengetahui bagaimana seharusnya menjadi penulis yang baik? Mari simak bersama dalam buku "Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan".

TERJEBAK BAHASA IKLAN

Ludwig Wittgenstein: "Kita memang tidak pernah sanggup memikirkan apa pun yang tidak logis. Karena seandainya pun bisa, kita juga harus berpikir secara logis."



Oleh: Achmad San
Editor Bahasa Jawa Pos

Bagi Anda seorang perantau yang tengah mencari tempat tinggal di kota, pasti pernah menjumpai informasi tentang sejumlah iklan perumahan dengan segala *tetek bengkek* promosinya. Umumnya iklan memang berfungsi untuk mendorong, membujuk, atau merayu khalayak agar terpikat dengan produk yang ditawarkan. Karena itu, ciri khas bahasa iklan terkesan bombastis dan hiperbolis.

Dari segi harga, misalnya, pengembang (*developer*) perumahan galib memakai kata-kata yang sepintas lalu terlihat murah bagi calon pembeli, tapi tidak demikian setelah dipelajari lebih lanjut. Saya sendiri sebagai perantau di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, beberapa kali mengalaminya dan karena itu sudah hafal strategi mereka.

Katakanlah ada rumah yang dijual seharga Rp 300 jutaan, sudah tentu faktanya tidak persis nominal itu. Jangankan persis, mendekati pun tidak. Maka, yang akan dijumpai adalah harga hunian yang bahkan justru mendekati angka Rp

400 juta. Ada yang Rp 370 juta, Rp 380 juta, atau Rp 390 juta. Bahkan mungkin ada pula yang seharga Rp 399 juta. Padahal, makna sufiks *-an* di situ seharusnya adalah mendekati atau menyerupai. *Gunungan* maknanya menyerupai gunung, *piringan* artinya seperti piring, *rumah-rumahan* berarti yang menyerupai rumah, *mobil-mobilan* juga mainan yang menyerupai mobil. Logikanya, Rp 300 jutaan *ya* mendekati atau bahkan menyerupai harga Rp 300 juta.

Itu baru soal harga. Belum lagi bahasa-bahasa iklan lain yang menjadi daya tarik berikutnya. Daya tarik lainnya biasanya terkait dengan lokasi yang strategis. Misalnya, dekat bandara, terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan. Maka, iming-imingnya seperti berikut ini:

- 5 menit ke Bandara Abdurachman Saleh
- 5 menit ke *exit toll* Pakis
- 6 menit ke wisata Mendit
- 15 menit ke wisata Lembah Tumpang

Itu contoh perumahan yang dijual di wilayah Malang, Jawa Timur. Di ibu kota Jawa Timur, Surabaya, tempat saya menetap kini, tak kalah menjanjikan. Seperti yang saya temukan di bawah ini:

- 3 menit ke Bandara Juanda
- 6 menit ke Kota Surabaya
- 6 menit ke Cito dan Bundaran Waru

Pertanyaannya, apakah benar-benar akurat bahwa jalan ke lokasi-lokasi yang dimaksud dapat ditempuh dengan sekian menit itu? Bagaimana cara mengukur dan membuktikannya? Apakah ada landasan yang kuat? Belum lagi jika terjebak macet dan lain-lain, misalnya.

Terlepas dari karakter bahasa iklan, informasi seperti itu di sisi lain juga menyesatkan. Dari aspek bahasa, kasus ini mengingkari prinsip-prinsip logika dan penalaran. Penalaran memiliki

prinsip bahwa sebuah pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Adapun prinsip itu, menurut Tri Guntur Narwana dalam buku *Logika, Bahasa, dan Modus Kuasa*, salah satunya adalah kecukupan alasan: asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir bahwa segala sesuatu mempunyai dasar atau alasan yang memadai atas keberadaannya.

Nah, informasi tentang waktu tempuh yang tentatif itulah yang dapat mengingkari logika. Karena itu, ada jalan lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain memakai parameter jarak. Dan cara ini juga pernah saya temukan pada promosi perumahan yang lain. Jadi, promosinya kurang lebih seperti ini: 500 meter ke Bandara Abdulrachman Saleh, 300 meter ke Bandara Juanda, 500 meter ke Kota Surabaya, dan seterusnya. Penggunaan parameter itu, meskipun tidak selalu akurat 100 persen, masuk akal dan lebih dari itu dapat dipertanggungjawabkan.

Klaim dan Persepsi Khalayak

Materi-materi iklan memang manasuka. Karena itu, bahasanya bombastis nan hiperbolis. Pembuat iklan juga dituntut kreatif mungkin. Tujuannya menarik, bahkan dalam kondisi tertentu mengekang/menguasai, pikiran konsumen. Iklan makanan atau minuman biasanya mendayagunakan cara-cara ini sebagai bentuk promosi. Dari sejumlah iklan, ada tiga yang menonjol dan cukup legendaris pada masanya: *Orang pintar minum Tolak Angin*, *Apa pun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro*, dan *Aku dan kau suka Dancow*.

Orang pintar minum Tolak Angin adalah slogan khas obat herbal Tolak Angin. Produk ini seakan-akan ingin menanamkan persepsi terhadap masyarakat bahwa orang pintar pilihannya

Bahasa iklan memang berbeda dengan bahasa berita. Iklan tak sekadar mengandung unsur opini, lebih dari itu juga berisi anjuran, ajakan, bahkan paksaan. Kendati begitu, iklan tak boleh serta-merta mengabaikan fakta

minum Tolak Angin kalau sedang menderita masuk angin. Lantas, apakah jika tidak minum Tolak Angin dianggap tidak pintar? Juga, apakah orang yang pintar selalu minum produk buatan PT Sido Muncul itu?

Begitu pula slogan *Apa pun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro* dan *Aku dan kau suka Dancow*. Dalam kasus Teh Botol Sosro, mereka jelas menghendaki bahwa minum Teh Botol Sosro bersifat harus apa pun makanan yang disantap. Entah itu soto, bakso, rawon, rendang, atau sate. Sementara untuk konten iklan susu Dancow, mereka menggunakan kata "suka" untuk dua pronomina: aku dan kau. Klaim yang hendak menguasai pikiran masyarakat bahwa aku dan kau (kami) saja suka Dancow, apakah kalian tidak ikut suka?

Di dunia perkopian, ada iklan Top Coffee yang punya slogan *Bongkar kebiasaan lama!*. Di sini mereka hendak mengklaim bahwa minum Top Coffee adalah salah satu cara mendekonstruksi kebiasaan lama konsumsi kopi. Lalu, ada iklan White Coffee yang memakai slogan meyakinkan: *Kopi nikmat tidak bikin kembang*. Kalau dimaknai secara leterlek (tekstual), kopi ini tidak akan membuat perut pengonsumsi kembang sebagaimana yang kejadian yang sudah-sudah. Lantas, kalau minum kopi merek ini tapi masih juga kembang, siapa yang disalahkan?

Sebagai bagian dari praktik komunikasi dan berbahasa, materi atau slogan iklan tidak akan lepas dari penilaian. Bahasa iklan memang berbeda dengan bahasa berita. Iklan tak sekadar mengandung unsur opini, lebih dari itu juga berisi anjuran, ajakan, bahkan paksaan. Kendati begitu, iklan tak boleh serta-merta mengabaikan fakta.



THOR: LOVE AND THUNDER, MENDOMINASI BOX OFFICE

“Thor: Love and Thunder” bercerita tentang aksi perlawanan Thor dan kelompoknya untuk menyelamatkan para dewa. Film yang disutradarai oleh Taika Waititi ini mengawali ceritanya dengan sosok Thor yang kehilangan tujuan setelah event Avengers: Endgame berakhir dan kehilangan perannya di Asgard.

Thor lalu mencari arti mengapa dirinya ada setelah kehilangan berbagai orang penting di sekitarnya. Hingga suatu waktu, Thor dan Korg yang juga diperankan oleh Taika Waititi pergi ke planet terpencil dan mengetahui kalau Falligar the Behemoth telah dikalahkan oleh seseorang. Kemudian New Asgard pun diserang oleh

pasukan kegelapan, Thor mencoba meminta bantuan pada King Asgard yang baru, Valkyrie agar bisa bertahan dan siap melawan. Thor berusaha menyelamatkan warga New Asgard dengan mencoba menggenggam kembali Mjolnir, palu andalannya.

Akan tetapi ternyata kini Mjolnir telah memiliki majikan baru bernama The Mighty Thor, dan Jane Foster adalah orang di balik identitas terbaru tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya Thor mengetahui dalang di balik penyerangan tersebut adalah Gorr the God Butcher dan pasukan Black Berserkernya yang berencana menghapuskan

para dewa.

Untuk bisa menggagalkan rencana tersebut, Thor bersama Valkyrie, Jane Foster, dan Korg kemudian menyerang Gorr sembari mencari cara keluar dari situasi buruk tersebut.

Film *Thor: Love and Thunder* merupakan sekuel keempat karakter Thor dan merupakan film ke-29 di Marvel Cinematics Universe (MCU). Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama yaitu: Chris Hemsworth sebagai Thor, Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher, Tessa Thompson sebagai Valkyrie, Taika Waititi sebagai Korg, dan Natalie Portman sebagai Jane Foster/The Mighty Thor.

Film ini mengalahkan film lain selama dua minggu berturut-turut untuk menduduki puncak *box office* Amerika Utara dengan menambahkan pendapatan 46 juta dolar AS (Rp689,6 miliar) pada akhir pekan, menurut laporan industri Exhibitor Relations pada Minggu (17/7) waktu setempat.

Sekuel dari “Thor: Ragnarok” (2017) itu dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, viking luar angkasa, yang berusaha untuk mengalahkan Gorr the God Butcher (diperankan oleh Christian Bale) bekerja sama dengan mantan pacarnya Jane Foster (diperankan oleh Natalie Portman).

Dikutip dari AFP, Senin, pendapatan pada akhir pekan itu turun tajam dibandingkan debutnya



yang berhasil mengumpulkan 144 juta dolar AS (Rp2,15 triliun) pada akhir pekan lalu.

Walau demikian, “Thor” masih dengan mudah mengalahkan film “Minions: The Rise of Gru” yang meraih peringkat kedua untuk minggu kedua berturut-turut setelah akhir pekan pembukaan yang fenomenal selama pada 4 Juli.

Film kelima dalam waralaba animasi “Despicable Me” itu bercerita tentang Gru, yang masih berusia belia, ingin menjadi penjahat super bersama dan menjalani petualangan bersama Minion kuningnya. Film ini menghasilkan 26 juta dolar AS (Rp389,8 miliar) pada periode Jumat (15/7) hingga Minggu (17/7).

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh “Where the Crawdads

Sing”, sebuah adaptasi novel karya Delia Owens tentang seorang gadis terlantar yang tumbuh di tanah rawa pada tahun 1950-an dan 60-an di North Carolina. Pada akhir pekan, film ini mampu mengumpulkan pendapatan sebanyak 17 juta dolar AS (Rp254,8 miliar).

Kemudian film “Top Gun: Maverick” turun dari urutan ketiga ke urutan keempat. Sekuel “Top Gun” (1986) itu sekali lagi menampilkan Tom Cruise sebagai pilot uji Angkatan Laut AS bernama Pete “Maverick” Mitchell. Film ini masih bertahan selama delapan pekan di bioskop, kini telah meraup total 618 juta dolar AS (Rp9,26 triliun) di seluruh dunia.

Film biografi musik “Elvis” karya Baz Luhrmann turun satu peringkat ke posisi kelima pada akhir pekan keempat sejak dirilis Warner Bros, dengan menambahkan 7,6 juta dolar AS (Rp113,9 miliar). Film ini dibintangi Austin Butler sebagai Elvis Presley bersama Tom Hanks yang berperan sebagai manajernya, Kolonel Tom Parker.

Film lain yaitu komedi animasi “Paws of Fury: The Legend of Hank” mencetak pendapatan 6,3 juta dolar AS (Rp94 miliar) untuk menduduki posisi keenam di *box office*. Film yang baru memulai debutnya ini menceritakan kisah seekor anjing malang yang ditugaskan untuk melindungi sebuah desa kucing. **(berbagai sumber)**

FUJINTI UTAMI PUTRI

DITUNTUT BERAKTING CEWEK JUTEK

Fuji memulai karier di dunia akting. Dirinya mendapatkan peran dalam film 'Bukan Cinderella'. Kekasih Thariq Halilintar ini mengaku sulit saat berakting. Lantaran Fuji harus beradegan menjadi orang baik, yang berbanding terbalik dengan sifat aslinya.

Fuji akhirnya menunjukkan kemampuannya di dunia hiburan. Ia didapuk berperan dalam film 'Bukan Cinderella'. Adik ipar Vanessa Angel ini mengaku sulit saat jalani syuting menjadi karakter yang baik. Sebab Fuji mengaku dirinya judes.

"Iya itu yang susah sih, dari yang jutek tiba-tiba disuruh kaya welcoming dia, sayang, suka," kata Fuji dalam gala premiere film 'Bukan Cinderella'



kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juli 2022.

"Pas part terakhir yang di mobil itu susah banget jujur. Kayak ngomong hal-hal manis itu di aku susah," sambungnya.

Fuji mengklaim mendapat banyak pelajaran setelah jalani syuting. Ia harus disiplin dalam bekerja.

Dara usia 19 tahun itu juga mengaku sempat menghadapi beberapa kendala dalam berakting. Sampai Fuji harus mengulang-ngulang saat berakting.

"Ada banget (kendala syuting) karena syuting itu harus ontime, harus ngikutin kata sutradara. Aku belajar banget main film pertama," ujar Fuji.

"Terus ada beberapa adegan yang menurut aku susah banget, nggak berani, sampai harus diulang-ulang," pungkasnya.

Film 'Bukan Cinderella' menceritakan tentang kehidupan Amora Olivia (Fuji), seorang siswi SMA.

Amora adalah remaja yang tangguh dan tidak segan melawan orang yang menggangukannya. Suatu hari, Amora mendapatkan sepatu impian yang sudah diinginkannya sejak lama.

Setelah sekian lama menabung, ia pun bisa membeli sepatu converse impiannya. Adapun, konflik bermula ketika kegirangan Amora tidak berlangsung lama.

Sebab sepatu sebelahnya tertukar dengan milik orang lain yang ukurannya jauh lebih besar. Amora berteriak di sepanjang koridor sekolah agar mendapatkan kembali sepatunya, Amora bertemu dengan Adam Wijaya (Rafael Adwel).

Di satu sisi, ada Adam merupakan ketua OSIS yang dingin dan disiplin. Ia pun membawa Amora ke ruang Bimbingan Konseling (BK) karena tingkahnya tersebut.

Penasaran bagaimana kisah mereka selanjutnya? Film yang diadaptasi dari Wattpad ini baru tayang pada 28 Juli 2022 di Bioskop.

ANDIKA MAHESA

BERSYUKUR BISA LULUS PAKET C

Andika Mahesa atau yang dulu dikenal sebagai Andika Kangen Band baru-baru ini bikin publik terkejut. Andika yang kerap dipanggil pula dengan sebutan Babang Tamvan itu membagikan berita bahagia.

Dia ternyata baru berhasil lulus ujian Paket C, yaitu pendidikan setaraf SMA. Bukti jika Andika Kangen Band lulus paket C, penyanyi yang biasa disapa Babang Tamvan ini pajang foto kelulusan sekolahnya di media sosial. Andika Kangen Band mengunggah sebuah foto di akun instagramnya @babang_andikamahesa berisikan dirinya tengah memegang berkas mirip Surat Tanda Kelulusan dengan dicap tiga jari.

Berkas yang diduga surat kelulusan itu diperkuat dengan kalimat Andika Kangen Band dalam kolom captionnya di instagram.

“Alhamdulillah..... Kelulusan sekolah adalah momentum yang tepat bagi kita untuk menyadari bahwa setiap perjuangan itu tidaklah mudah,” kata Andika Kangen Band, dikutip Wartakotalive.com, Kamis (21/7).

Dalam keterangannya, vokalis grup band Kangen Band itu bangga bisa menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA. Ke depannya, Andika Kangen Band bersiap menata diri untuk menatap masa depannya usai meraih kelulusan sekolah.

“Banggalah karena engkau sudah melewati proses, nikmati sejenak, dan setelah itu mari kita racik rencana untuk hari esok,” tulis Andika.

Diketahui kalau Andika Kangen Band mengaku ijazah dirinya hanyalah tamatan SD.

Ia sempat menjalani pendidikan Paket B setara dengan SMP dan sudah lulus. Kemudian, Andika Kangen Band meneruskan pendidikannya dengan mengambil Paket C setara SMA, yang baru saja lulus.



PENDIDIKAN BERBALUT KONSERVATISME AGAMA

Baiturrahman

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Konservatisme agama masih menjadi pekerjaan rumah hingga hari ini. Pemikiran ini mulai tumbuh dan berkembang pasca pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.

Penganut konservatisme agama mendapatkan ruang bergerak ketika demokratisasi gencar digelorkan di tengah masyarakat yang memasuki era Reformasi (1998). Mereka umumnya bergerak secara aktif dalam bidang sosial, pendidikan, dan aksi kedermawanan sosial (filantropi).

Gejala ini kemudian dilihat oleh seorang antropolog asal Belanda, Martin van Bruinessen sebagai gejala “*conservative turn*,” kecenderungan konservatif atau membelok menjadi konservatif (Bruinessen, 2004:4). Namun perlu digarisbawahi, gejala konservatisme agama tak melulu disematkan pada agama tertentu.

Gejala tersebut dialami juga oleh setiap agama di Indonesia – khususnya agama-agama yang diakui

oleh pemerintah. Di dalam Kristen misalnya, sebagaimana disinyalir oleh Azyumardi Azra (2020), paham konservatisme agama ini diwujudkan dalam bentuk perekrutan penganut agama secara agresif dalam satu payung ajaran, struktur, dan doktrin.

Di dalam Islam, utamanya di Indonesia, pemikiran ini diwakili oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai kelompok salafi. Istilah salafi atau “*salafiyah*” merujuk pada gerakan untuk kembali pada perilaku ulama-ulama salaf (*al-salaf al-shalih*) yaitu para sahabat-sahabat nabi, *tabi’in*, *tabi’in-tabi’in*.

Umumnya mereka memiliki karakteristik beragama yang khusus; berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, argumentasi atau dalilnya harus jelas mengambil dari Alquran dan hadis, penggunaan rasio yang harus selaras dengan *nash*, dan rasio dalam hal ini hanya digunakan untuk pembenaran terhadap *nash*.

Karakteristik pemikiran ini pada ruang tertentu, seperti politik,

termanifestasikan ke dalam ilusi untuk membangun negara berdasarkan agama (Islam) dengan sebutan negara “*khilafah*.” Mereka meyakini bahwa ajaran Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw dan para sahabat-sahabatnya, sudah meletakkan dasar bagaimana mengatur masyarakat di dunia ini dalam satu payung kekhilafahan yaitu *khilafah Islamiyah* yang diambil dari syariat Islam. Keyakinan inilah yang kemudian ingin dipaksakan untuk diterapkan di negara yang masyarakatnya plural seperti Indonesia.

Gejala konservatisme agama di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan sikap intoleransi, kebencian, kekerasan atas nama agama yang puncaknya bahkan menciptakan perilaku-perilaku radikal-teror; pengeboman, perusakan rumah ibadah, dan beragam aksi *vigilantisme* lainnya.

Dalam laporan SETARA Institute tahun 2021 misalnya, tentang KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) mengungkapkan masih adanya tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas; intoleransi (62 tindakan), ujaran kebencian (27 kasus), penolakan pendirian tempat ibadah (20 kasus), pelaporan penodaan agama (15 kasus), penolakan kegiatan (13 kasus), penyerangan (12 kasus), perusakan tempat ibadah (10 kasus).

Sementara pada kasus-kasus tindakan radikal-terorisme, menurut laporan *Global Index Terrorism* (GTI)

Salah satu permasalahan krusial dalam menghadang gelombang konservatisme agama adalah lemahnya bangunan pemahaman ideologi bangsa yang diajarkan di lembaga pendidikan kita.

tahun 2020 yang dirilis oleh *Institute for Economics and Peace* (IEP) menunjukkan bahwa dalam skala global, Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia berada di posisi ke-4.

Perilaku destruktif yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentu perlu menjadi perhatian bersama, utamanya umat muslim yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Oleh karenanya, Islam Indonesia perlu mempertahankan sikapnya yang toleran, ramah, dan menjunjung tinggi perdamaian antar-manusia.

Problem Lembaga Pendidikan

Salah satu permasalahan krusial dalam menghadang gelombang konservatisme agama adalah lemahnya bangunan pemahaman ideologi bangsa yang diajarkan di lembaga pendidikan kita. Mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Dalam beberapa kasus sekolah salafi contohnya, mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan diterapkan hanya sebagai instrumen pelengkap untuk diakui sebagai salah satu bagian dari pendidikan nasional.

Mereka ini ingin dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengakomodir aspek nasionalisme, kewarganegaraan, dan Pancasila (Muthohirin et al, 2022: 95). Sehingga, pemahaman murid mengenai identitas bangsa Indonesia yang multikultural (suku, ras, agama, dan budaya) menjadi sempit dan tak meluas.

Sedangkan di tingkat perguruan

tinggi, penangkapan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang diduga terpapar ideologi teroris adalah fenomena gunung es di lingkungan akademisi kita hari ini. Perguruan tinggi yang diharapkan akan terbangun lingkungan dialogis, debat argumentatif, dan laboratorium pengujian intelektual, nyatanya tidak terjadi atau dengan kata lain tidak efektif.

Lingkungan tersebut didukung dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memungkinkan kelompok-kelompok radikal-teroris bergerak dalam ruang digital mensosialisasikan gerakan dan pemahamannya. Untuk sekedar informasi, menurut BNPT, di tahun 2014, ISIS bahkan mampu mengalokasikan 50 persen dananya untuk kepentingan media. Hal ini membuktikan masih lemahnya bangunan kurikulum kita mengenai ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara yang diterapkan di lingkungan pendidikan kita hari ini.

Bukti lainnya dari gejala konservatisme agama adalah hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2017. Dalam survei ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden yaitu sebesar 58,5 persen siswa dan mahasiswa punya opini yang cenderung radikal dan sangat radikal. Sementara yang memiliki sikap moderat hanya 20,1 persen.

Paham konservatisme agama yang direpresentasikan oleh kelompok salafi ini, memang tak perlu dicurigai secara berlebihan. Sebab kelompok salafi sendiri sebetulnya sangat beragam

corak dan pemahamannya. Setidaknya penulis menyebutkan dua; salafi murni dan salafi jihadis. Yang pertama, sebetulnya hanya menginginkan pemurnian dari ajaran Islam itu sendiri, yang setiap amalannya harus merujuk pada Alquran dan hadis secara tekstual.

Sementara yang kedua, ada upaya pemaksaan keyakinan dan doktrin ajaran dengan menebarkan kebencian, melakukan persekusi, dan menggunakan kekerasan. Yang terakhir inilah yang perlu menjadi perhatian besar, sebab penggunaan kekerasan yang bersifat destruktif ini tentu melanggar hak-hak beragama orang lain yang dijamin oleh konstitusi kita bahkan oleh Alquran sendiri (QS. Al-Baqarah: 256).

Karena itu, sudah semestinya paham moderasi beragama atau "*wasathiyah*" menjadi hal yang harus terus dikampanyekan bersama. Sebab moderasi menuntut para penganut agama, apa pun itu, untuk berpandangan tidak ekstrim ke "kanan" atau pun ke "kiri" melainkan berada di jalur tengah sesuai nafas kehidupan umat manusia sekarang. Program Moderasi Beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama maupun oleh ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, perlu melibatkan masyarakat banyak di berbagai sektor, khususnya di lembaga pendidikan kita, sehingga memungkinkan terciptanya suatu masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan di tengah perbedaan.

BNI Taplus Bisnis

Bisnis Laris Pakai QRIS

Bonus Cashback

Rp **250**
Ribu

Bonus

POIN⁺

Klik Disini 



1500046
BNI Call